



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM SAPI INVESTASI APARATUR PEMERINTAH DI KABUPATEN SOLOK DI ERA OTONOMI DAERAH

TESIS



AKMAL BADRI
0821202036

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
2011**

ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM SAPI INVESTASI APARATUR PEMERINTAH DI KABUPATEN SOLOK DI ERA OTONOMI DAERAH

Oleh : Akmal Badri, S. Pt

Dibawah bimbingan Dr. Asmawi, MS dan Dr. Ria Ariany

RINGKASAN

Pada awal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla, program swasembada daging sapi ditargetkan pada tahun 2005, kemudian direvisi menjadi tahun 2010. Namun hingga saat ini 67 persen dari kebutuhan daging sapi di Indonesia dipenuhi dari impor. Karena itu pemerintah membuat program agar 90% dari kebutuhan sapi dapat dipenuhi dari dalam negeri (swasembada daging) pada tahun 2014.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah (politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama) yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Salah satu kebijakan Pemerintah Kabupaten Solok yaitu program kerjasama investasi pengembangan pembibitan sapi aparatur di lingkungan pemerintah Kabupaten Solok yang diatur dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 43 Tahun 2006.

Dari latar belakang yang ada permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi dari Peraturan Bupati Solok Nomor 43 Tahun 2006 tentang Program Kerjasama Investasi Pengembangan Pembibitan Sapi Aparatur Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Solok dan hambatan-hambatan dalam implementasi Program Kerjasama Investasi Pengembangan Pembibitan Sapi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Dalam penelitian ini lokasi penelitian adalah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Solok, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Solok dan kelompok-kelompok penerima Program SIAP yang terdiri dari KPP-IB Kampung Baru Nagari Muaro Pingai, KPP-IB Kaloan Mas Nagari Sulit Air, KPP-IB Tunas Jaya Nagari Koto Sani, KPP-IB Koto Saiyo Nagari Tanjung Alai KPP-IB Bungo Durian nagari Aripin, KPP-IB Kapuah Sakato Nagari Sumani dan KPP-IB Ranah Saiyo Nagari Sumani. Data penelitian dilakukan dengan tehnik melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive. Data yang diperoleh dalam penelitian digambarkan dengan kata-kata, kemudian dianalisis sesuai dengan gejala atau objek yang diteliti dan diinterpretasikan secara etik yaitu pandangan dari peneliti.

Dari penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa Implementasi Program SIAP belum diadministrasikan dengan baik, dimana dalam implementasi tidak dilengkapi dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan serta belum lengkapnya pengaturan hak, kewajiban dan wewenang para pihak yang terlibat dalam Program SIAP.

Dinas teknis terkait dan kekuatan politik yang ada hanya mampu mendorong pejabat eselon II dan eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok untuk menjadi pemilik modal dalam Program SIAP dan peternak yang tergabung dalam KPP-IB untuk menjadi pemelihara ternak Program SIAP, namun belum mampu memengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat dalam program SIAP agar tujuan Program SIAP dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Hambatan-hambatan dalam implementasi Program SIAP adalah sulitnya mendapatkan bibit sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan oleh instansi teknis, rendahnya SDM Petani Peternak Kelompok Sasaran dimana Sasaran Program SIAP adalah masyarakat miskin yang hanya berpendidikan SLTP ke bawah, bahkan banyak yang tidak tamat SD. Sementara pelatihan, penyuluhan dan pendampingan yang diberikan sangat kurang. Sehingga dalam pelaksanaannya sebagian besar peternak memelihara ternak dengan cara yang masih tradisional, kurangnya Sosialisasi Program, dimana sosialisasi program intensif dilakukan kepada pejabat eselon II dan eselon III sebagai pemilik modal dan kurang sekali kepada peternak sebagai pemelihara sapi Program SIAP,

Program SIAP ini sangat baik untuk dilanjutkan dan dikembangkan dalam rangka meningkatkan perekonomian petani peternak dan meningkatkan populasi ternak di Kabupaten Solok, dengan pembenahan dalam implementasinya yaitu melengkapi Program SIAP ini dengan Petunjuk Teknis, Petunjuk Pelaksanaan, Protap, SOP, mengatur dengan tegas hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam program dan meningkatkan pembinaan dan pengawasan implementasi Program SIAP ini pada masa yang akan datang.



AYAT SUCI DAN MUTIARA KATA

“KEAGUNGAN TUHAN”

Merah merona bola api di atas cakrawala

Tanda terbitnya sang surya di ufuk pagi

Suara burung bernyanyi riang bergerak kian kemari

Menggugurkan sejuta embun dari kerindangan daun

Semua itu bukti Agungnya ciptaan Tuhan

Sebagai manusia hendaklah bersyukur

Ketemu lagi akan hari

Setelah sesaat mengunci rasa

Melupakan semua problema

Kini ditantang perjalanan hidup

Membuktikan semua impian dan harapan

Kalau kita sadar, nyata ataupun tidak

Itulah garis takdir Tuhan

Semuanya ini perjalanan waktu

Manusia hanya bercita

Namun begitu, yakinkan diri ini

Hidup ini jangan disia-siakan

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Pasir Lawas pada tanggal 28 Desember 1969, sebagai anak ke 3 dari 3 saudara anak dari ayah Ali Fahmi Dt. Bijo dan ibu Kamsani. Penulis menamatkan SDN 01 Pasir lawas pada tahun 1984, tamat SMPN Pasir Lawas, tahun 1986, tamat SPP Padang Mengatas tahun 1989, tamat APP Bogor tahun 1999, tamat S1 Universitas Taman Siswa Padang tahun 2004 dan pada tahun 2008 kuliah pada Program Pasca Sarjana Universitas Andalas pada Program Studi Pembangunan Wilayah Pedesaan (PWD) Pemusatan Politik Lokal dan Otonomi.

Sejak tahun 1990 diangkat menjadi CPNS Pada Dinas Peternakan Kabupaten Solok, tahun 2003 bekerja pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Solok dan tahun 2009 bekerja di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Solok

Nikah dengan Radiyatul Hayat, SH pada tanggal 8 Agustus 1997, pada tanggal 28 April 1998 lahir anak pertama “ Annisa Kamilia Amanda”, pada tanggal 23 Januari 2000 lahir anak kedua “Farhan Hafiz Ulwan”, pada tanggal 04 November 2002 lahir anak ketiga “ Annisa Rahmatul Khoir” dan pada tanggal 11 Juni 2004 lahir anak keempat “ Fadhila Amalia”.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmahnirrahim

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul *Analisis Implementasi Program Sapi Investasi Aparatur Pemerintah di Kabupaten Solok di Era Otonomi Daerah* dan shalawat beriring salam teruntuk Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia kepada kehidupan yang beradap.

Penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof.DR.Ir.H.Novirman Jamarun, M.Sc selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Andalas Padang.
2. Ibuk Dr. Sri Zul Choiriyah.MA selaku Ketua Program Study Politik Lokal dan Otonomi Daerah Pasca Sarjana Universitas Andalas Padang
3. Bapak Dr. Asmawi, MS selaku Ketua Komisi Pembimbing dan Ibuk Dr. Ria Ariany, M.Si selaku anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan bantuan kepada penulis berupa tenaga, fikiran, waktu serta arahan-arahan yang sangat berguna dalam penulisan tesis ini.
4. Ibuk Dr. Sri Zul Choiriyah.MA, Bapak Dr. Azwar. M.Si dan Bapak Drs. Alfitri. MS selaku tim penguji yang telah memberikan masukan, kritikan, serta saran demi penyempurnaan penulisan tesis ini.
5. Bapak dan Ibuk Dosen pada Jurusan Politik Lokal dan Otonomi Daerah Pasca Sarjana Universitas Andalas Padang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Bapak dan Ibuk staf pada jajaran Pasca Sarjana Universitas Andalas Padang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam penyelesaian administrasi kepada penulis.

7. Istri dan anak-anak tercinta yang telah membantu penulis secara total serta memberikan dorongan dan motivasi yang tidak terbatas dalam penulisan tesis ini.
8. Bapak dan Ibuk pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Solok yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan tesis ini.
9. Bapak Ketua Kelompok KPP IB sebagai pelaksana program sapi SIAP yang membantu penulis dalam memberikan informasi dan data-data penelitian.

Dengan segala keterbatasan yang penulis miliki dan menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik, saran dan masukan untuk kesempurnaan tesis ini sangat berharga bagi penulis.

Terima kasih

Padang Mei 2011
Penulis

Akmal Badri



DAFTAR ISI

	Hal
RINGKASAN	ii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Otonomi Daerah	7
B. Kebijakan Publik dan Implementasinya	11
C. Hambatan-hambatan dalam Implementasi Kebijakan	18
D. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, dan Pemberdayaan Masyarakat	21
E. Usaha Peternakan Sapi Dan Fungsi Ternak Sapi Bagi Petani Ternak serta Karakteristik Usaha Peternakan di Pedesaan	28
F. Alur Pikir Penelitian	36
BAB III. METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian	40
C. Peranan Peneliti	40
D. Unit Analisis	40
E. Teknik Pemilihan Informan	41
F. Teknik Pengumpulan Data	42
G. Cross Cek / Triangulasi Data	45
H. Analisis Data	45

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
B. Program Kerjasama Investasi Pengembangan Pembibitan Sapi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok (Program SIAP)	55
C. Implementasi Program Kerjasama Investasi Pengembangan Pembibitan Sapi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok (Program SIAP)	80
D. Pencapaian Program Kerjasama Investasi Pengembangan Pembibitan Sapi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok	119
E. Hambatan-hambatan dalam Implementasi Program Kerjasama Investasi Pengembangan Pembibitan Sapi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok	123
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	134
A. Kesimpulan.....	134
B. Saran.....	135
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Daftar Nama Informan	41
Tabel 4.1	Luas Daerah, Jumlah Penduduk dan Rata-rata Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan	48
Tabel 4.2	Luas Lahan Menurut Jenis Penggunaannya di Kabupaten Solok	50
Tabel 4.3	Populasi Ternak dan Hasil Ternak lainnya Menurut Jenis Tahun 2007-2009	51
Tabel 4.4	Populasi Ternak Unggas Menurut Jenis Ternak Tahun 2000-2009	52
Tabel 4.5	Banyaknya Rumah Tangga Pemelihara Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak	53
Tabel 4.6	Banyaknya Rumah Tangga Budidaya Ternak Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak	54
Tabel 4.7	Jumlah Produksi Daging Menurut Jenis Ternak	55
Tabel 4.8	Tim Verifikasi Kelayakan Calon Penerima Seduaan Ternak Sapi Program SIAP	70
Tabel 4.9	Jadwal Verifikasi Peternak Calon Penerima Sapi program SIAP	71
Tabel 4.10	KPP-IB Sasaran Program SIAP	76
Tabel 4.11	Analisa Ekonomi Usaha Pembibitan 1 Ekor Sapi Betina Selama 3 Tahun	77
Tabel 4.12	Kerangka Waktu Penyusunan Pedoman Teknis Sapi Investasi Pejabat Dalam Rangka Mendorong Ekonomi Kerakyatan di Kabupaten Solok	79
Tabel 4.13	Jadwal Pertemuan Pejabat dengan Peternak	96
Tabel 4.14	Jumlah Sapi yang Telah Diserahkan kepada Kelompok per tanggal 6 Pebruari 2007.....	98
Tabel 4.15	Rekapitulasi Target dan Realisasi Pengadaan Ternak Sapi pada Kelompok Sasaran (KPP-IB) sampai dengan 23 Maret 2007	99
Tabel 4.16	Rekapitulasi Target dan Realisasi Pengadaan Ternak Sapi pada Kelompok Sasaran (KPP-IB) sampai dengan 23 Mei 2007	102
Tabel 4.17	Rekapitulasi Target dan Realisasi Pengadaan Ternak Sapi pada Kelompok Sasaran (KPP-IB) sampai dengan 26 September 2007	103
Tabel 4.18	Harga Pembelian Sapi, Jumlah Anak dan Persentase Kelahiran Anak	132

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada awal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla, program swasembada daging sapi ditargetkan pada tahun 2005, kemudian direvisi menjadi tahun 2010. Namun hingga saat ini 67 persen dari kebutuhan daging sapi di Indonesia dipenuhi dari impor.¹ Karena itu pemerintah membuat program agar 90% dari kebutuhan sapi dapat dipenuhi dari dalam negeri (swasembada daging) pada tahun 2014.²

Menteri Pertanian Suswono mengatakan, upaya swasembada daging sapi akan ditempuh melalui sejumlah program, di antaranya memperbanyak jumlah populasi sapi induk melalui program kredit usaha pembibitan sapi. Selain itu juga memanfaatkan lahan-lahan yang masih potensial digunakan untuk peternakan dan meningkatkan jumlah kelahiran anak sapi menjadi 100.000 ekor dalam lima tahun. "Dengan berbagai upaya ini, populasi sapi potong ditargetkan meningkat dari 12 juta ekor pada tahun 2009 menjadi 14,6 juta ekor pada tahun 2014. Hal ini disampaikannya saat memaparkan rencana strategis kecukupan daging sapi 2010-2014 dalam seminar nasional pengembangan ternak potong untuk mewujudkan program kecukupan/swasembada daging di Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Sabtu 7 November 2010.³

Program pemerintah ini, tentunya harus dijawab pula oleh pemerintah daerah, terutama daerah-daerah yang memiliki potensi untuk dikembangkannya peternakan sapi. Apalagi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti

¹ Kompas Com,

² Samsul Fikar dan Dadi Ruhyadi, *Beternak dan Bisnis Sapi Potong*, Agromedia Pustaka, Jakarta, 2010, hal.1.

³ Kompas Com. Op.cit

daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah (politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama) yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kabupaten Solok memiliki keunggulan komparatif dalam bidang peternakan salah satunya sapi, karena sapi merupakan salah satu komoditi unggulan di Kabupaten Solok dalam upaya meningkatkan ekonomi kerakyatan dengan pertimbangan antara lain : (1) Masyarakat telah familier dalam budidaya sapi; (2) Cukup tersedianya sumberdaya lokal untuk berusaha ternak sapi seperti rumput unggul, luasnya padang penggembala, melimpahnya limbah pertanian dan industri pertanian seperti dedak dan ampas tahu; (3) Pesatnya perkembangan teknologi seperti telah banyaknya sapi unggul dan teknologi embrio transfer; (4) Telah terbentuknya sentra pertumbuhan seperti pembibitan ternak sapi di Arian dan peternak kelompok pelaksana IB (KPP-IB); (5) Permintaan terhadap ternak dan hasil ternak dari tahun ke tahun cukup meningkat yang ditunjang dengan pasar ternak Muara Panas dan Alahan Panjang serta tempat pemotongan hewan (TPH); dan (6) Tersedianya SDM yang berkualitas seperti inseminator, PKB, petugas Sterilycontrol (SC), Asisten Teknis Reproduksi (ATR), paramedis dan penyuluh yang ditunjang dengan 16 Pos IB dan 2 Pos Keswan.⁴

Populasi sapi potong di Kabupaten Solok pada tahun 2005 : 40.446 ekor dengan laju pertumbuhan 2,89% pertahun. Sedangkan jumlah kebutuhan ternak

⁴ Pidato Bupati Solok pada Acara Launching Program Sapi Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok tanggal 3 Januari 2007 di Gedung Solok Nan Indah.

sapi potong setiap tahunnya diperkirakan sebanyak 4500 ekor. Oleh karena itu permintaan masyarakat terhadap bibit sapi potong yang bermutu belum terpenuhi sehingga harus didatangkan dari luar daerah. Diperkirakan 6500 ekor ternak sapi masuk ke Kabupaten Solok setiap tahunnya.⁵

Berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki, serta kebutuhan masyarakat akan bibit dan daging sapi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006 sampai Tahun 2010 yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2008. Dalam Peraturan Daerah tersebut ditetapkan Tiga Pilar Pembangunan Kabupaten Solok yaitu pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan dan pembangunan ekonomi kerakyatan.

Salah satu alasan pembangunan ekonomi kerakyatan dijadikan tiga pilar pembangunan daerah Kabupaten Solok adalah karena sektor pertanian yang menjadi pendukung utama pertumbuhan ekonomi, dihadapkan pada kondisi yang memerlukan perhatian khusus. Banyak keluarga yang bekerja di sektor ini berada pada garis kemiskinan atau tergolong miskin. Mereka kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya.

Menyadari arti pentingnya pembangunan pertanian umumnya dan subsektor peternakan khususnya, di Kabupaten Solok telah dilaksanakan berbagai kebijakan, perencanaan, program dan proyek. Salah satu diantaranya adalah program kerjasama investasi pengembangan pembibitan sapi aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok yang diatur dengan Peraturan Bupati Solok Nomor

⁵ Expose Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Solok pada Acara Sosialisasi Program Kerjasama Investasi Pengembangan Pembibitan Sapi Potong Pejabat Eselon II dan III di Lingkup Pemerintah Kabupaten Solok, tanggal 26 Desember 2006.

43 Tahun 2006. Program ini merupakan suatu kegiatan meningkatkan peran serta pejabat berinvestasi terhadap pembangunan ekonomi kerakyatan pada sub sektor peternakan terutama dalam rangka membantu keluarga miskin dan meningkatkan populasi di kawasan sentra produksi peternakan yang berbasis agrobisnis.

Secara konsepsional, program kerjasama investasi pengembangan pembibitan sapi aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok merupakan salah satu pendekatan dalam rangka mengupayakan perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat, melalui strategi pemberdayaan ekonomi rakyat.

Pemilik modal dalam program ini 133 orang pejabat eselon II dan seselon III di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok yang terdiri dari 20 orang pejabat eselon II dan 113 orang pejabat Eselon III. Pejabat eselon II minimal menyediakan dua ekor sapi betina produktif dan siap kawin sedangkan pejabat eselon III menyediakan minimal satu ekor. Sehingga keseluruhannya tersedia 153 ekor sapi betina produktif dan siap kawin.

Sehubungan dengan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pelaksanaan Peraturan Bupati Solok Nomor 43 Tahun 2006 tentang Program Kerjasama Investasi Pengembangan Pembibitan Sapi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok dengan judul “IMPLEMENTASI PROGRAM SAPI INVESTASI APARATUR PEMERINTAH DI KABUPATEN SOLOK DI ERA OTONOMI DAERAH”

B. Perumusan Masalah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor 43 Tahun 2006 tentang Program Kerjasama Investasi Pengembangan Pembibitan Sapi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok (Program SIAP), 133 orang pejabat eselon II dan eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok

diikutsertakan dalam pemberdayaan ekonomi rakyat, dengan menanamkan investasi pengadaan sapi bagi masyarakat miskin pada Kelompok Peternak Pengguna Inseminasi Buatan (KPP-IB) di Kabupaten Solok.

Program SIAP merupakan terobosan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Melalui program ini pemerintah daerah Kabupaten Solok memotivasi pejabat berinvestasi dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi kerakyatan pada sub sektor peternakan terutama dalam rangka membantu keluarga miskin dan meningkatkan populasi di kawasan sentra produksi peternakan yang berbasis agrobisnis. Sepengetahuan penulis program ini hanya ada di Kabupaten Solok dan belum ada di Kabupaten/Kota lain di Sumatera Barat bahkan di Indonesia.

Perumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi dari Peraturan Bupati Solok Nomor 43 Tahun 2006 tentang Program Kerjasama Investasi Pengembangan Pembibitan Sapi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok?
2. Apakah hambatan-hambatan dalam implementasi Program Kerjasama Investasi Pengembangan Pembibitan Sapi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan diatas yang merupakan masalah yang akan diteliti, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan implementasi dari Peraturan Bupati Solok Nomor 43 Tahun 2006 tentang Program Kerjasama Investasi Pengembangan Pembibitan Sapi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.

2. Menganalisis implementasi dari Peraturan Bupati Solok Nomor 43 Tahun 2006 tentang Program Kerjasama Investasi Pengembangan Pembibitan Sapi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.
3. Mengidentifikasi hambatan-hambatan implementasi Peraturan Bupati Solok Nomor 43 Tahun 2006 tentang Program Kerjasama Investasi Pengembangan Pembibitan Sapi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat untuk :

1. Sebagai tambahan referensi bagi pembuat kebijakan tentang konsep, perencanaan dan pelaksanaan strategis pembangunan peternakan di Kabupaten Solok melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat di suatu daerah dengan melibatkan aparatur pemerintah daerah.
2. Sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan pada umumnya berdasarkan konsep pemberdayaan masyarakat di suatu daerah pada masa yang akan datang.
3. Untuk tambahan informasi bagi instansi terkait dalam upaya menentukan suatu kebijakan dalam menangani permasalahan pembangunan peternakan.
4. Sebagai bahan referensi strategis bagi peneliti berikutnya yang berminat untuk mendalami permasalahan implementasi Peraturan Bupati Solok Nomor 43 Tahun 2006 tentang Program Kerjasama Investasi Pengembangan Pembibitan Sapi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Otonomi Daerah

Indonesia sejak awal kemerdekaan telah mengakui adanya keragaman dan hak asal-usul daerah yang merupakan bagian dari sejarah panjang bangsa Indonesia. Sehingga meskipun negara Republik Indonesia menganut prinsip negara kesatuan dimana pusat kekuasaan berada pada pemerintah namun dengan menyadari berbagai heterogenitas yang dimiliki bangsa Indonesia baik kondisi sosial, ekonomi, budaya maupun keragaman tingkat pendidikan masyarakat maka otonomi daerah atau distribusi kekuasaan/kewenangan dari pemerintah pusat perlu dialirkan kepada Daerah Otonom. Sejak kemerdekaan sampai saat ini, distribusi kekuasaan, kewenangan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah selalu bergerak pada titik keseimbangan yang berbeda. Perbedaan itu sangat jelas terlihat dengan menggunakan konsep bandul yang selalu bergerak secara simetris pada dua sisi yaitu Pusat dan Daerah. Dengan kata lain bahwa pada suatu waktu bobot kekuasaan terletak pada pemerintah pusat pada kesempatan lain bobot kekuasaan ada di Pemerintah Daerah. Menurut J. Kaloh kondisi yang demikian itu disebabkan karena dua hal, pertama, karena pengaturan Undang-Undang (UU) tentang Pemerintahan Daerah dan kedua karena perbedaan interpretasi dan implementasi terhadap Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang disebabkan kepentingan penguasa pada masa berlaku undang-undang tersebut.⁶

Menurut Conyers 1984:187; Smith 1985:2-7; Smoke 2003:8 dalam Said Otonomi daerah (Desentralisasi) bisa diartikan dalam berbagai cara tergantung pada kepentingan-kepentingan dan perspektif dari masing-masing pengamat.⁷

⁶ J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal.1.

⁷ M. Nias'ud Said, *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2005, hal. 5.

Para ahli mendefenisikan otonomi daerah sebagai berikut :

Menurut Said otonomi daerah dipahami sebagai sebuah proses devolusi dalam sektor publik dimana terjadi pengalihan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah propinsi dan kabupaten/kota. Dengan kata lain, dalam konteks Indonesia otonomi daerah sebagai sebuah proses pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada baik pemerintah propinsi maupun kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan oleh UU.⁸

Rondinelli dan Cheema mendefenisikan otonomi daerah sebagai berikut :

Decentralization is the transfer of planning, decision making, or administrative authority from the central government to its field organizations, local administrative units, semi autonomous and parastatal (italics in original) organizations, lokal government or non-governmental organization. (Otonomi daerah adalah proses pelimpahan wewenang perencanaan, pengambilan keputusan atau pemerintahan dari pemerintah pusat kepada organisasi-organisasi kepada unit-unit pelaksana daerah, kepada organisasi semi otonom dan parastatal (teks aslinya berhuruf miring) ataupun kepada pemerintah atau organisasi non pemerintah.⁹

Defenisi otonomi daerah menurut Laporan Tahunan Bank Dunia tahun 1999 sebagai berikut :

Decentralization is the transfer of authority and responsibility for public functions from the central government to subordinate or quasi-independent government organizations and or the private sector. (Otonomi daerah adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab untuk menjalankan fungsi-fungsi publik dari pemerintah pusat kepada organisasi-organisasi pemerintah yang menjadi bawahannya atau yang bersifat semi independen dan atau kepada sektor swasta.¹⁰

Sedangkan menurut Kaloh, Otonomi Daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah yang melekat baik pada negara kesatuan maupun pada negara federasi. Di dalam negara kesatuan, Otonomi Daerah lebih terbatas daripada di negara yang berbentuk federasi. Kewenangan

⁸ Ibid, hal 6.

⁹ Ibid. hal 5.

¹⁰ Ibid, hal 6.

mengatur dan mengurus rumah tangga Daerah di negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan.¹¹

Namun Gustav dan Stewart (1994) mengidentifikasi tiga makna berbeda dari otonomi daerah saat menganalisis kasus Indonesia yakni:

Pertama, dekonsentrasi (*deconcentration*) dimana pemerintah pusat menempatkan para pegawainya di level pemerintah daerah; *Kedua*, pendelegasian (*delegation*) dimana pemerintah pusat secara bersyarat mendelegasikan kekuasaannya kepada pemerintah daerah namun dengan tetap memiliki kesanggupan untuk mengambil kekuasaan itu kembali dan secara keseluruhan tetap memiliki dominasi kekuasaan atas pemerintah daerah; dan *Ketiga*, devolution (*devolution*) dimana pemerintah pusat secara aktual menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah daerah.¹²

Dalam hal ini hanya otonomi daerah dalam artian yang ketiga sajalah yang akan menciptakan sebuah kemajuan yang berarti dalam otonomi daerah jika dibandingkan dengan prakarsa-prakarsa otonomi daerah yang sebelumnya.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan¹³.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.¹⁴

¹¹ J. Kaloh., op.cit, hal 3.

¹² M. Mas'ud Said, op.cit, hal 6.

¹³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁴ Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pemerintahan Daerah

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memerhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut sekurang-kurangnya ada 4 perspektif yang mendasari segi positif otonomi daerah:

- Pertama, bahwa otonomi daerah adalah sarana untuk demokratisasi.
- Kedua, bahwa otonomi daerah membantu meningkatkan kualitas dan efisiensi pemerintahan.
- Ketiga, bahwa otonomi daerah dapat mendorong stabilitas dan kesatuan nasional.
- Keempat, bahwa otonomi daerah memajukan pembangunan daerah.¹⁵

Dengan demikian daerah dapat membuat kebijakan sesuai dengan kondisi daerah dan kebutuhan masyarakatnya. Misalnya di Kabupaten Solok salah satu kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat adalah dengan menerapkan Program SIAP yang diatur dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 43 Tahun 2006 dan perubahannya.

¹⁵ M. Mas'ud Said, op.cit, hal 22.

B. Kebijakan Publik dan Implementasinya

Seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan yang dibuat daerah antara lain adalah peraturan daerah yang ditetapkan kepala daerah dengan persetujuan DPRD, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta peraturan dan keputusan pimpinan organisasi perangkat daerah.

Menurut Leslie A. Pal kebijakan adalah *“As a course of action or inaction chosen by public authorities to address a given problem or interrelated set of problems.”*¹⁶

Menurut Dye (1992:2) kebijakan diartikan sebagai *“whatever government choose to do or not to do”*. Kebijakan publik adalah apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.¹⁷

Edward III dan Sharkansky dalam Islamy yang mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah *“what government say and do, or not to do. It is the goals or purpose of government programs.* Kebijakan publik adalah apa yang

¹⁶ Ibid. hal.12.

¹⁷ Ibid.

pemerintah katakan dan dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah.¹⁸

Menurut Ramlan Surbakti dalam Mas Roro Lilik Ekowati kebijakan publik adalah kebijakan yang menyangkut masyarakat umum. Kebijakan publik ini adalah bagian dari keputusan politik. Keputusan politik itu sendiri adalah keputusan yang mengingat pilihan terbaik dari berbagai bentuk alternatif mengenai urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah.¹⁹

Anderson mengartikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu.²⁰

Friedrich mengartikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.²¹

Penulis sependapat dengan Anderson bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu.

Menurut Riant Nugroho, ada dua pilihan langkah implementasi kebijakan publik, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program

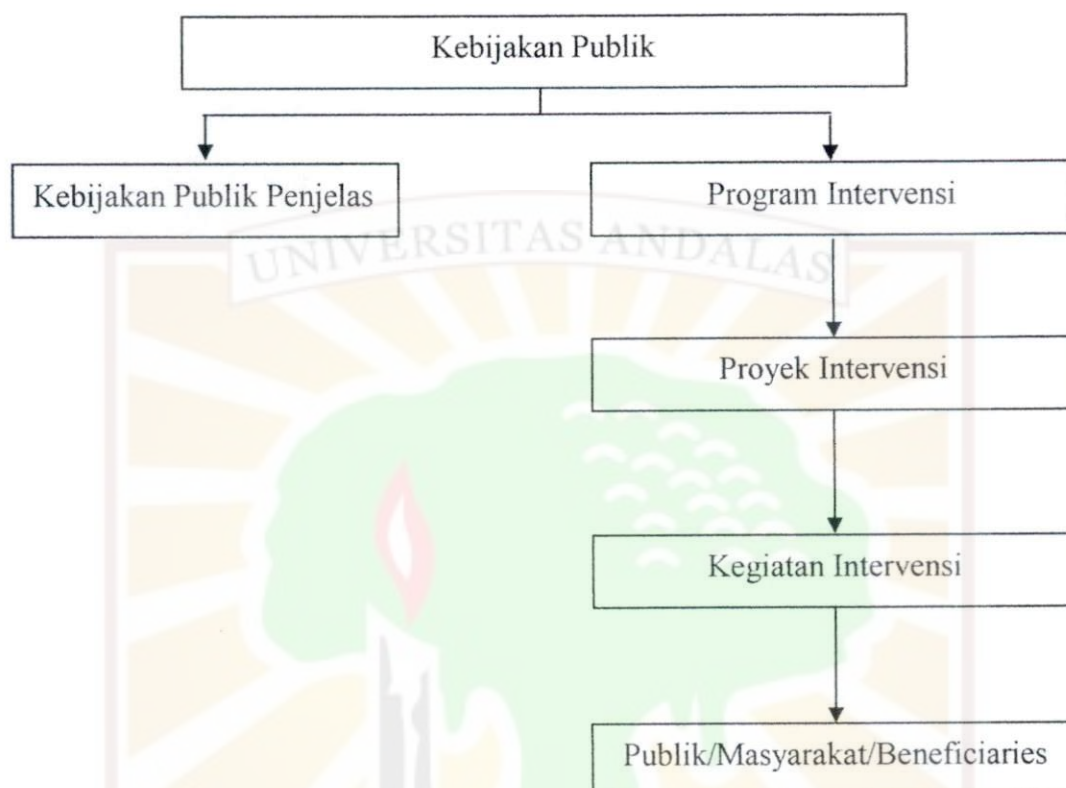
¹⁸ Ibid.

¹⁹ Mas Roro Lilik Ekowati, *Perencanaan, Implementasi & Evaluasi Kebijakan atau Program*, Pustaka Cakra, Surakarta, 2009, hal 1.

²⁰ Joko Widodo, *op.cit*, hal 13.

²¹ Ibid.

atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut²². Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

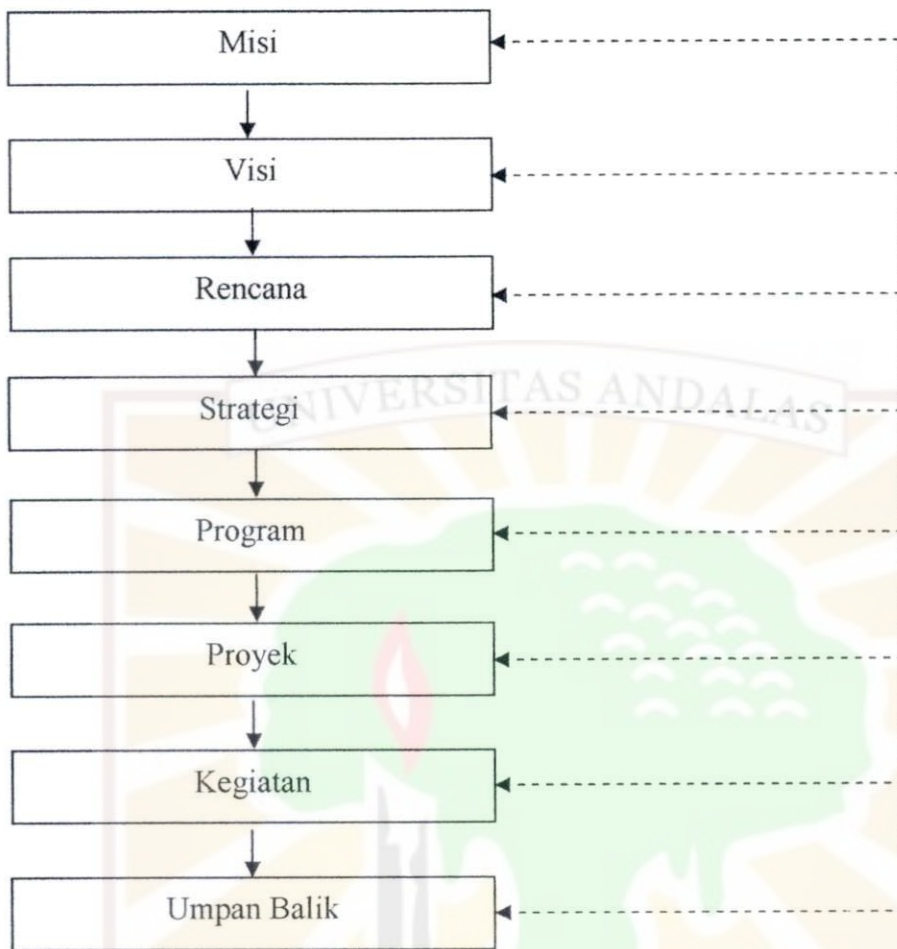


Sumber : Riant Nugroho, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, hal.159

Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Perda adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung operasional antara lain Keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas dan lain-lain.

Rangkaian implementasi kebijakan, dari gambar di atas, dapat dilihat dengan jelas, yaitu dimulai dari program, ke proyek, dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi model yang lazim di dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik, sebagaimana digambarkan berikut ini.

²² Riant Nugroho, D., *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, PT. Gramedia, Jakarta, 2004, hal. 158.



Sumber : Riant Nugroho, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, hal.160

Kebijakan publik sejak formulasi hingga implementasi perlu mengikuti kaidah-kaidah tersebut karena memang kaidah tersebut bersifat given atau tidak dapat ditolak.

Mazmanian dan Sabatier dalam Riant Nugroho Dwidjowijoto mengatakan :

Hakikat utama implementasi adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tadi mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Definisi ini menekankan tidak hanya melibatkan perilaku badan-badan administrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, tetapi juga menyangkut jaringan kekuatan politik ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat memengaruhi perilaku dari semua pihak yang

terlibat dan akhirnya berdampak pada yang diharapkan (intended) maupun yang tidak diharapkan (unintended) dari suatu program.²³

Lebih lanjut Mazmanian & Sabatier menjelaskan lebih rinci proses implementasi kebijakan dengan mengemukakan :

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan tujuan sasaran yang ingin dicapai secara tegas dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksanaan, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata baik yang dikehendaki atau yang tidak dari output tersebut, dampak keputusan sebagaimana dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang-undang/peraturan-peraturan yang bersangkutan.²⁴

Donald S. Van Mater dan Carl E. Va (1974:447) menguraikan batasan implementasi sebagai *"Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions. This include both one time efforts to transform decisions into operational terms, as well as continuing efforts to achieve the large and small changes mandated by policy decisions"*. Terjemahan bebasnya (Joko Widodo 2006:86) implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok) swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Pada suatu saat

²³ Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2006, hal. 119.

²⁴ Joko Widodo, op.cit, hal 88.

tindakan-tindakan ini, berusaha mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik besar maupun kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan tertentu.

Menurut Joko Widodo implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan. Sementara itu pelaksanaan kebijakan merupakan suatu kegiatan untuk menimbulkan hasil (outputs), dampak (outcome) dan manfaat (benefit), serta dampak (impacts) yang dapat dinikmati oleh kelompok sasaran (target groups).²⁵

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan para ahli tersebut, penulis sependapat dengan Joko Widodo, bahwa implementasi adalah proses yang melibatkan sejumlah sumber termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok).

Menurut Joko Widodo yang perlu mendapat perhatian dan persiapan dalam proses implementasi kebijakan interpretasi, organisasi penyediaan risorsis, dana manajemen program, serta penyediaan layanan dan manfaat pada publik.²⁶

Selanjutnya menurut Joko Widodo implementasi kebijakan publik mencakup tahap interpretasi (interpretation), tahap pengorganisasian (to organized), dan tahap aplikasi (application).²⁷

²⁵ Ibid. hal 88.

²⁶ Joko Widodo, op.cit. hal 89

Dalam penelitian dan penulisan ini, penulis melakukannya berdasarkan pendapat dari Joko Widodo, yaitu implementasi kebijakan publik yang meliputi tahap interpretasi, tahap pengorganisasian, dan tahap aplikasi.²⁸

1. Tahap Interpretasi

Tahap interpretasi merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang masih bersifat teknis operasional. Kebijakan umum atau kebijakan strategis (strategic policy) akan dijabarkan ke dalam kebijakan manajerial (managerial policy) dan kebijakan manajerial akan dijabarkan dalam kebijakan teknis operasional (operational policy). Kebijakan umum atau kebijakan strategis diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah (perda) yang dibuat bersama antara lembaga legislatif (DPRD) dan lembaga eksekutif (pemerintah daerah). Kebijakan manajerial diwujudkan dalam bentuk keputusan-keputusan kepala daerah (peraturan bupati atau keputusan bupati) dan kebijakan teknis operasional diwujudkan dalam bentuk kebijakan kepala dinas, kepala badan atau kepala kantor sebagai unsur pelaksana teknis pemerintah daerah.

2. Tahap Pengorganisasian

Tahap pengorganisasian ini lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentuan lembaga organisasi mana yang akan melaksanakan, dan siapa pelakunya); penetapan anggaran (berapa besarnya anggaran yang diperlukan, dari mana sumbernya, bagaimana menggunakan dan mempertanggungjawabkan); penetapan prasarana dan sarana apa yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, penetapan tata kerja (juklak dan juknis); dan penetapan manajemen pelaksanaan

²⁷ Ibid, hal 90.

²⁸ Ibid.

kebijakan termasuk penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan.

3. Tahap Aplikasi

Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan ke dalam realitas nyata. Tahap aplikasi merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahapan yang telah disebutkan sebelumnya.

C. Hambatan-hambatan dalam Implementasi Kebijakan

Dalam implementasi kebijakan tentunya ditemui hambatan-hambatan. Dalam hal ini Edward III menggunakan istilah faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi. Menurut Edward III dalam Joko Widodo faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi antara lain meliputi faktor communication, resources, dispositions dan bureaucratic structure.²⁹

1. Faktor Komunikasi (Communication).

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.

Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah kelompok sasaran kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

²⁹ Joko Widodo, op.cit, hal 96.

Komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transformasi, kejelasan, dan konsistensi. Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik langsung ataupun tidak langsung terhadap kebijakan publik tadi. Oleh karena itu dimensi komunikasi mencakup transformasi kebijakan, kejelasan dan konsistensi. Dimensi transformasi menghendaki agar kebijakan publik dapat ditransformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran dan pihak lain yang terkait dengan kebijakan. Dimensi kejelasan menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima dengan jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan dan sasaran serta substansi dari kebijakan publik tersebut. Jika tidak jelas, mereka tidak akan tahu apa yang seharusnya dipersiapkan dan dilaksanakan agar tujuan kebijakan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

2. Sumber Daya (Resources)

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan, serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan kurang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan, kurang mempunyai sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sumber daya dimaksud meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya peralatan (kandang, padang rumput dan lain-lain yang dapat jadi pakan ternak sapi) yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan.

3. Disposisi

Edward III dalam Joko Widodo menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan (implementator) mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang diimplementasikan.³⁰

Disposisi ini merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Disposisi ini akan muncul diantara para pelaku kebijakan, manakala akan menguntungkan tidak hanya organisasinya tetapi juga dirinya. Mereka akan tahu bahwa kebijakan akan menguntungkan organisasi dan dirinya, manakala mereka cukup pengetahuan dan mereka sangat mendalami dan memahaminya. Pengetahuan, pendalaman dan pemahaman kebijakan ini akan menimbulkan sikap menerima, acuh tak acuh dan menolak terhadap kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya. Namun menurut Edward III implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena adanya

³⁰ Joko Widodo, hal.104.

ketidak efisienan struktur birokrasi (deficiencies in bureaucratic structure).³¹ Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit yang ada dalam organisasi yang bersangkutan dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya.

D. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.

Ramainya perbincangan mengenai ekonomi rakyat, ekonomi kerakyatan, dan perekonomian rakyat akhir-akhir ini menimbulkan kesan seolah-olah terdapat pendekatan ekonomi baru yang hendak ditawarkan kepada masyarakat. Padahal dengan menelusuri perkembangan pemikiran ekonomi Indonesia pada masa pra kemerdekaan, akan segera diketahui bahwa istilah-istilah itu sebenarnya hanyalah sekedar lahir kembali. Istilah-istilah serupa telah dipakai oleh para pendiri republik ini jauh sebelum Indonesia memproklamkan kemerdekaannya. Bung Hatta misalnya, telah membuat sebuah artikel dengan judul Ekonomi Rakyat pada tahun 1933.³²

Menurut Revrisond Baswir ekonomi kerakyatan adalah suatu situasi perekonomian dimana berbagai kegiatan ekonomi diselenggarakan dengan melibatkan partisipasi semua anggota masyarakat, sementara penyelenggaraan kegiatan-kegiatan ekonomi itu pun berada di bawah pengendalian atau pengawasan anggota-anggota masyarakat. Bila dikaitkan dengan bunyi Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, maka situasi perekonomian seperti itulah yang disebut sebagai perekonomian usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.³³

³¹ Joko Widodo, hal.106

³² Revrisond Baswir, *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 1997, hal.3.

³³ Ibid. hal.4.

Sarman menggarisbawahi kenyataan tersebut dengan temuannya bahwa dalam realitasnya ekonomi rakyat sering berwujud sebagai suatu kegiatan usaha kecil yang marginal. Marginalisasi usaha ekonomi rakyat itu terutama dalam hal kemampuan mengakses sumber daya produktif yang mestinya dapat meningkatkan nilai tambah usaha produktif tersebut. Usaha ekonomi rakyat umumnya belum terjamah oleh instansi perkreditan yang dikelola oleh sektor perbankan.³⁴

Upaya yang menyangkut kemampuan untuk mengakses sumber daya produktif ini menjadi inti dari konsep pemberdayaan ekonomi rakyat, seperti yang dijelaskan oleh Moebyarto bahwa secara sederhana, pemberdayaan ekonomi rakyat mengacu kepada kemampuan masyarakat untuk mendapatkan dan memanfaatkan akses ke dan kontrol atas sumber daya potensial.³⁵

Firdaus mengemukakan beberapa langkah konkrit strategi pemberdayaan ekonomi rakyat, meliputi: (1) memotivasi masyarakat untuk menciptakan kegiatan ekonomi rumah tangga dengan maksud untuk konsumsi dan peningkatan pendapatan (*income generating program*), (2) akses masyarakat terhadap pasar dan fasilitas pemasaran, (3) akses terhadap fasilitas pembiayaan usaha, (4) membentuk kerjasama ekonomi dalam bentuk koperasi dan kemitraan, (5) akses terhadap fasilitas non ekonomi, (6) pembinaan manajerial dan latihan kewirausahaan, dan (7) adanya keterkaitan investasi pada kegiatan ekonomi masyarakat desa dengan penciptaan lapangan kerja di pedesaan.³⁶

³⁴ Darlim Darmawi, Thesis, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Usaha Pemeliharaan Ternak Sapi (studi Kasus Program gerakan Pembangunan Sentra Baru Pembibitan Pedesaan di Kabupaten Dati II Sawahlunto /Sijunjung*, Pascasarjana Universitas Andalas, Tahun 2000.

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid.

Sarman dalam Darlim Darmawi mengungkapkan bahwa kalangan praktisi dan pengamat ekonomi rakyat umumnya sependapat bahwa rentannya posisi ekonomi rakyat itu tidak terlepas dari kelemahan dalam hal, (1) keahlian dan keterampilan usaha, (2) akses pemasaran dan informasi pasar, sedangkan jiwa dan keuletan usaha atau semangat kewirausahaan justru sudah tidak diragukan lagi.³⁷

Sehubungan dengan kelemahan-kelemahan ekonomi rakyat tersebut, maka ada lima solusi alternatif yang ditawarkan oleh Sarman dalam strategi memberdayakan ekonomi rakyat, dan ini tidak jauh dari upaya untuk menjawab sisi lemah perekonomian rakyat tersebut, yakni: (1) dengan upaya memberikan konsultasi dan bantuan teknis dalam bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia, (2) pengelolaan keuangan usaha ekonomi rakyat, (3) Manajemen produksi, (4) riset pasar, dan (5) dengan mengkondisikan terjadinya kemitraan usaha kecil dengan perusahaan besar.³⁸

Sumadiningrat mencoba mengemukakan alternatif strategi pemberdayaan ekonomi rakyat dan melihatnya dari sisi upaya untuk penanggulangan kemiskinan, *Pertama*, strategi pemberdayaan ekonomi rakyat modern yang telah maju lebih diarahkan kepada penciptaan iklim yang menunjang dan peluang untuk tetap maju dan pemberdayaan ekonomi rakyat tertinggal yang tidak hanya dengan meningkatkan produktifitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama dan memberikan suntikan modal, tapi juga harus menjamin adanya kerjasama erat antara yang maju dengan yang tertinggal (kemitraan). *Kedua*, sehubungan dengan itu maka upaya pemberdayaan ekonomi rakyat perlu diprioritaskan pada penduduk miskin melalui antara lain peningkatan kualitas sumberdaya manusia

³⁷ Ibid. hal. 17.

³⁸ Ibid.

dan permodalan yang didukung sepenuhnya dengan pelatihan yang terintegrasi sejak kegiatan penghimpunan modal, penguasaan teknis produksi, pemasaran hasil, dan pengelolaan surplus usaha.³⁹

Menurut Baswir upaya pemberdayaan ekonomi rakyat cenderung menghadapi tantangan-tantangan yang makin berat dan untuk menjawab hal itu setidaknya dapat ditinjau dari dua hal yaitu, *pertama*, pada kemampuan kita dalam memahami hakekat dan keterkaitan antara berbagai tantangan pemberdayaan ekonomi rakyat tersebut. *Kedua*, kemampuan kita untuk merumuskan strategi yang tepat sehingga mampu mengubah tantangan menjadi peluang. Dengan demikian, strategi pemberdayaan ekonomi rakyat tidak hanya berkaitan dengan upaya pemanfaatan sumber daya produktif, tetapi juga berkaitan dengan aspek kelembagaan⁴⁰.

Selanjutnya Ida, menyatakan bahwa tantangan tatanan konsep yang peduli terhadap peran lembaga ekonomi desa (KUD, LPN, BPR, dll) dan lembaga alternatif (LSM, LPSM, dll) dalam membangun dan mempertahankan dasar-dasar keberlanjutan program yang dikembangkan.⁴¹

Pada Akhirnya upaya pemberdayaan ekonomi rakyat yang merupakan ekonomi sebagian terbesar rakyat Indonesia, dan menurut Kartasasmita harus menjadi agenda utama pembangunan nasional dan strategi pemberdayaan ekonomi rakyat yang berpusat pada upaya mendorong percepatan perubahan struktural yang memperkuat kedudukan serta peran ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional. Perubahan struktural ini meliputi proses perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi

³⁹ Ibid. hal 18.

⁴⁰ Ibid, hal. 19.

⁴¹ Ibid, hal 19.

tangguh, dari ekonomi sub sistem ke ekonomi pasar, dan dari sifat ketergantungan ke kedudukan kemandirian.⁴²

Konsep tentang pemberdayaan dalam pembangunan pedesaan belum begitu banyak dikemukakan oleh para ahli. Terminologi pemberdayaan itu sendiri pada saat ini masih isu penting dalam strategi pembangunan pedesaan.

Pada umumnya penduduk desa dililit oleh berbagai keterbatasan, bukan saja modal, tetapi juga pengetahuan dan keterampilan disamping juga terbelenggu adat dan kebiasaan yang adakalanya kurang menguntungkan jika dilihat dari segi kepentingan pembangunan pedesaan. Diantara penduduk desa masih ada yang belum menyadari kemampuan atau potensi dirinya sendiri, sehingga mereka lebih banyak tergantung pada orang atau pihak lain. Pembangunan masyarakat menjadikan penduduk sebagai sasaran utamanya, sehingga mereka memiliki kemauan dan kemampuan untuk menolong dirinya sendiri.⁴³

Selanjutnya Suparlan mengemukakan bahwa dalam pembangunan masyarakat pedesaan, didapat 3 unsur yang sangat penting untuk diberdayakan, yaitu : (1) mengutamakan inisiatif masyarakat, (2) mengutamakan swadaya masyarakat, dan (3) memanfaatkan sumber-sumber yang ada dilingkungan setempat.⁴⁴

Kartasmita mengemukakan bahwa konsep pemberdayaan masyarakat merupakan suatu strategi yang didasarkan pada segala kegiatan pembangunan yang dilakukan harus diarahkan pada meningkatkan kemampuan masyarakat,

⁴² Ibid, hal 19

⁴³ Ibid., hal 20-21.

⁴⁴ Ibid, hal 21

dengan mengembangkan dan mendinamisasikan potensi yang ada pada masyarakat itu sendiri.⁴⁵

Dari konsep diatas maka strategi pembangunan pedesaan harus ditujukan kedua arah yaitu lapisan masyarakat maju dan lapisan masyarakat tertinggal. Kedua lapisan masyarakat ini memerlukan strategi pembangunan pedesaan yang berbeda satu sama lain.

Menurut Kartasasmita strategi pertama adalah memberi peluang agar sektor dari masyarakat pedesaan dapat maju, walaupun maju, namun disini masih dibutuhkan pemberdayaan masyarakat, terutama kebebasan untuk bergerak dan iklim usaha yang kompetitif. Tugas pemerintah disini adalah menjaga bahwa keleluasaan bergerak bagi potensi ekonomi masyarakat yang tidak mematikan yang lemah, sebaliknya harus ikut mengangkatnya, antara lain melalui kemitraan usaha.⁴⁶

Sedangkan strategi kedua menurut Kartasasmita adalah memberdayakan sektor ekonomi dan lapisan masyarakat yang masih tertinggal, dengan membantu agar lebih berdaya. Dalam hal ini masyarakat dapat meningkat kemampuan dan kapasitasnya dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki.⁴⁷

Sehubungan dengan uraian konsep diatas, terlihat bahwa penerapan kebijaksanaan atau strategi pembangunan nagari/pedesaan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat memerlukan strategi yang berbeda. Di satu sisi strategi pertama melihat kondisi masyarakat yang relatif maju, sehingga pemberdayaan lebih diarahkan untuk memberi peluang dan peraturan yang melindungi aktifitas ekonomi masyarakat. Di sisi lain strategi kedua melihat kondisi masyarakat yang

⁴⁵ Ibid., hal.21-22.

⁴⁶ Ibid., hal.22.

⁴⁷ Ibid., hal 22

masih tertinggal, sehingga pemberdayaan lebih diarahkan pada upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dengan potensi yang dimilikinya. Kedua strategi pemberdayaan ini jelas terkait satu sama lain.

Dalam kerangka pemikiran diatas, maka menurut Kartasasmita upaya memberdayakan masyarakat pedesaan harus dilakukan dengan melalui pendekatan 3 sisi, yaitu: (1) menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, (2) memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dan (3) melindungi aktifitas ekonomi masyarakat.⁴⁸

Penciptaan suasana agar potensi masyarakat dapat berkembang bertitik tolak dari pemikiran bahwa setiap individu masyarakat memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pemberdayaan disini berperan dalam hal membangun daya itu dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta mengembangkannya dalam rangka untuk pencapaian kesejahteraannya.

Penguatan potensi masyarakat disini menyangkut tindakan nyata dalam menyediakan berbagai masukan serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang dapat membuat masyarakat makin berdaya. Pemberdayaan disini berperan dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia (pendidikan dan kesehatan) serta akses kepada sumber-sumber kemajuan ekonomi (modal, teknologi, pasar, manajemen, sarana dan prasarana).

Perlindungan aktifitas ekonomi masyarakat disini menyangkut upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang

⁴⁸ Ibid., hal. 23

kuat atas yang lemah. Pemberdayaan disini berperan dalam hal penetapan peraturan-peraturan yang secara jelas melindungi golongan yang lemah.

Program SIAP dalam pelaksanaanya seharusnya menggunakan strategi yang dikemukakan oleh Sumodiningrat yang mengemukakan alternatif strategi pemberdayaan ekonomi rakyat dan melihatnya dari sisi upaya untuk penanggulangan kemiskinan, *Pertama*, strategi pemberdayaan ekonomi rakyat modern yang telah maju lebih diarahkan kepada penciptaan iklim yang menunjang dan peluang untuk tetap maju dan pemberdayaan ekonomi rakyat tertinggal yang tidak hanya dengan meningkatkan produktifitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama dan memberikan suntikan modal, tapi juga harus menjamin adanya kerjasama erat antara yang maju dengan yang tertinggal (kemitraan). *Kedua*, sehubungan dengan itu maka upaya pemberdayaan ekonomi rakyat perlu diprioritaskan pada penduduk miskin melalui antara lain peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan permodalan yang didukung sepenuhnya dengan pelatihan yang terintegrasi sejak kegiatan penghimpunan modal, penguasaan teknis produksi, pemasaran hasil, dan pengelolaan surplus usaha.

E. Usaha Peternakan Sapi dan Fungsi Ternak Sapi Bagi Petani Ternak serta Karakteristik Usaha Peternakan di Pedesaan

Semua orang suka makan daging termasuk daging sapi. Semakin tinggi penghasilan masyarakat, biasanya konsumsi daging sapipun meningkat. Hal ini disebabkan adanya kemampuan individu tersebut untuk membeli daging sapi yang memang harganya lebih mahal dibandingkan dengan harga daging ayam atau daging kambing. Konsumsi daging sapi tidak mengenal musim. Bahkan pada hari-hari besar keagamaan dan tahun baru, permintaan daging sapi meningkat tajam, sehingga harganya pun bisa naik dua kali lipat.

Permintaan terhadap sapi potong dari tahun ke tahun terus meningkat. Sementara pasokan sapi potong dari dalam negeri belum dapat memenuhi semua permintaan yang ada. Hal ini dapat dilihat dari program swasembada daging yang seharusnya dicapai pada tahun 2010, dimundurkan menjadi tahun 2014. Mundurnya target ini jelas bermakna jumlah populasi sapi potong dalam negeri belum bisa memenuhi 90% dari kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia. Keadaan ini tentu membuka peluang usaha bagi siapa saja yang ingin beternak sapi potong.⁴⁹

Keuntungan beternak sapi potong antara lain : a. Kebutuhan daging sapi terus meningkat dan berkesinambungan, b. belum banyak yang beternak sapi secara intensif, c. Harga jual tinggi dan terdapat momen harga melambung tinggi; dan d. dapat memilih segmen usaha yang ingin dijalani (usaha pembibitan, usaha penggemukan sapi, usaha pengolahan kotoran sapi dan usaha penunjang beternak sapi potong).⁵⁰

Napitipulu menjelaskan bahwa usaha peternakan diusahakan dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk usaha dan pola usaha ternak. Berdasarkan bentuk usaha dibagi atas dua bagian yaitu usaha tani dengan tujuan pokok memenuhi kebutuhan keluarga yang disebut *subsisce farm (small houlder farm)* dan usaha tani komersil (*comercial farm*) yang tujuannya adalah untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Selanjutnya Napitupulu menjelaskan bahwa pola usaha tani/ternak ditentukan oleh banyaknya usaha yang dikerjakan atau diusahakan. Usaha tani/ternak dapat dibedakan atas tiga pola yakni; *pertama*, pola usaha tani khusus, yaitu apabila usaha tani itu hanya mempunyai satu cabang

⁴⁹ Samsul Fikar & Dadi Ruhyadi, *Beternak dan Bisnis Sapi Potong*, PT. Agromedia Pustaka, Jakarta, 2010, hal.4-8.

⁵⁰ Ibid.

usaha, misalnya usaha tani/ternak sapi; *kedua*, pola usaha tani/ternak tidak khusus yaitu petani ternak mengusahakan berbagai macam usaha produksi berbagai komoditi, misalnya petani ternak yang mengusahakan padi sawah, ladang dan ternak sapi potong; dan *ketiga*, pola usaha tani/ternak campuran yaitu dalam hal ini batas-batas dari macam usaha sama sekali tidak jelas, misalnya ternak potong dengan usaha tani sawah atau palawija.⁵¹

Sapi khususnya sapi potong merupakan salah satu sumber daya penghasil bahan makanan berupa daging yang memiliki nilai ekonomi tinggi, dan penting artinya didalam kehidupan masyarakat. Dan selanjutnya menurut FAO kenaikan produksi dan pendapatan adalah tujuan jangka pendek dan ini merupakan jalan atau cara untuk mencapai tujuan akhir, sedangkan taraf hidup yang lebih tinggi dari keluarga tani merupakan tujuan akhir pengembangan manajemen usaha tani.⁵²

Mubyarto, menyatakan bahwa pola pemeliharaan ternak di Indonesia dapat dibagi atas tiga kelompok yaitu: *pertama*, peternakan rakyat dengan cara pemeliharaan yang tradisional; *kedua*, peternakan rakyat dengan cara pemeliharaan yang semi komersial; dan *ketiga*, peternakan komersial.⁵³

Atmadilaga mengungkapkan bagi petani, sapi memiliki manfaat luas dalam usaha tani dan keluarganya, yakni: (1) pelengkap dalam usaha tani sebagai tenaga kerja pengolah tanah dan pupuk organis; (2) memiliki likuiditas tinggi sebagai sumber uang tunai bila terjadi kebutuhan mendesak; (3) sebagai objek tabungan terutama jika saat awal pengusaannya masih kecil atau dalam keadaan kurus sehingga murah harganya dan kemudian setelah besar atau menjadi gemuk

⁵¹ Darlim Darmawi, op.cit. hal.7.

⁵² Ibid., hal. 8.

⁵³ Ibid., hal. 8.

dapat dijual dengan harga yang berlipat ganda; (4) pengisi waktu luang diluar kegiatan usaha tani yang mempunyai manfaat ekonomi, bersifat edukatif dan reaktif; (5) akhirnya bermanfaat pula sebagai hewan potong bila masa produktifnya telah berakhir. Melengkapi kegunaan diatas diversifikasi ternak dalam usaha tani akan menambah daya tahan usaha tani dari kegagalan dan mempertinggi keefisienan dan nilai guna limbah antar komoditi.⁵⁴

Selanjutnya menurut Sugeng, kemanfaatan sapi yang luas dan nilai ekonominya tinggi diantaranya adalah : *pertama*, mutu dan harga daging atau kulit menduduki peringkat atas bila dibandingkan dengan daging atau kulit kerbau, apalagi ternak kuda; *kedua*, sapi merupakan salah satu sumber budaya masyarakat, seperti sapi untuk keperluan *sesaji*, sebagai ternak karapan dan ukuran martabat manusia dalam masyarakat (*social standing*); *ketiga*, sapi sebagai tabungan, dimana petani di desa-desa pada umumnya telah terbiasa pada saat-saat panen mereka menjual hasil panen dan membeli beberapa ekor sapi. Pada masa paceklik atau pada saat petani membutuhkan uang untuk berbagai keperluan bisa dijual lagi; *keempat*, hasil ikutannya masih sangat berguna, seperti, kotoran bagi usaha pertanian, tulang-tulang bisa digiling untuk tepung tulang sebagai bahan baku mineral atau dibuat lem, darah bisa direbus, dikeringkan dan digiling menjadi tepung darah yang bermanfaat bagi hewan unggas dan lain-lain, serta kulit bisa dipergunakan dalam berbagai maksud dibidang kesenian, pabrik dan lain-lainnya; dan *kelima*, memberikan kesempatan kerja yang banyak sehingga bisa menghidupi banyak keluarga pula.

⁵⁴ Ibid.

Selanjutnya menurut Adiwilaga, fungsi sapi dalam masyarakat Indonesia adalah sebagai hewan pembajak, sebagai hewan pengangkut, sebagai sumber protein, sebagai sumber pupuk, sebagai tabungan uang.⁵⁵

Sabrani dkk menegaskan bahwa problema yang dihadapi didalam usaha pengembangan ternak tradisional adalah ketepatan pengalokasian sumber daya. Didalamnya termasuk pengalokasian ternak pada suatu daerah dan kepada para peternak yang mempunyai kondisi yang sangat beragam. Selama struktur produksi didominasi oleh usaha ternak skala kecil yang berorientasi usaha tani keluarga, maka program pengembangan ternak tradisional harus berdasarkan pada pendekatan sistem pertanian secara menyeluruh. Ini berarti pengembangan ternak terus sejalan dengan pendekatan ilmu keilmuan terpadu dan secara daerah spesifik, dimana petani hidup dan bekerja. Lebih lanjut dikatakan bahwa melepaskan pengembangan ternak dari total sistem pertanian akan membuat program pengembangan menjadi steril.⁵⁶

Menurut Sutrisno dkk, bahwa kebutuhan lahan bagi pengembangan ternak ruminansia sangat dirasakan penting terutama sebagai sumber hijauan pakan. Akan tetapi kenyataan menunjukkan semakin padat jumlah penduduk, lahan yang tersisa untuk hijauan makanan ternak semakin menyempit. Akibat untuk daerah padat penduduk ternak lebih banyak tergantung pada limbah pertanian.⁵⁷

Menurut Ilyas peluang sumber-sumber pertumbuhan sub sektor peternakan antara lain didasarkan bahwa masih tersedianya lahan marginal dan lahan kering, padang alang-alang belukar dan rawa yang belum dimanfaatkan secara optimal.

⁵⁵ Ibid., hal 9.

⁵⁶ Ibid., hal. 9.

⁵⁷ Ibid.

Potensi tersebut dapat dikembangkan untuk produksi dan pendapatan petani sub sektor peternakan.⁵⁸

Selanjutnya Ilyas menjelaskan penyebaran ternak tidak hanya untuk menambah populasi, tetapi merupakan upaya penyebaran atau pemerataan kepemilikan ternak kepada petani kecil, penyebaran kepemilikan diterapkan dapat memanfaatkan sumber pakan yang tersebar dan tenaga kerja sisa yang ada pada keluarga petani dipedesaan khususnya untuk ternak ruminansia, penyebaran ini sekaligus untuk mendorong pemanfaatan tenaga kerja dan kotoran ternak dalam usaha tani.⁵⁹

Prospek peternakan di Indonesia sangat cerah, salah satunya disebabkan sebahagian besar penduduk Indonesia (70%) bermata pencaharian di bidang pertanian yang tidak bisa terlepas dari usaha beternak (AAK,1990).

Dalam usaha peternakan, berdasarkan skala usaha sapi potong menurut Dirjen Peternakan (1995) dalam SK Menteri Pertanian Nomor 362/Kpts/TN/120/5/1990 dapat dibagi dua yaitu: (1) Perusahaan memiliki ternak 100 satuan ternak dan (2) Peternakan rakyat mengelola ternak sapi dibawah 100 satuan ternak. Sedangkan menurut Sulaeman dan Udianto (1993) membagi skala usaha peternakan sapi potong menjadi lima, yaitu: (1) peternakan tradisional, sifatnya baru dimiliki belum diusahakan; (2) peternakan keluarga sifatnya membantu usaha tani keluarga, skala kepemilikan 1-5 ekor; (3) peternakan skala kecil, sudah berorientasi ekonomi, skala kepemilikan ternak 6-10 ekor; (4) peternakan skala menengah, menggunakan input teknologi berorientasi produksi daging, skala kepemilikan 50 ekor; dan (5) peternakan skala besar, padat modal,

⁵⁸ Ibid., hal.10.

⁵⁹ Ibid.

teknologi tinggi, orientasi input dan output, skala kepemilikan 50 ekor per produksi.

Mubyarto (1986) menyatakan bahwa skala usaha peternakan rakyat biasanya setiap kepala keluarga memiliki 2-5 ekor ternak besar dan 5-100 ekor ternak kecil, yang mempunyai tujuan usaha sebagai usaha penambah pendapatan dan konsumsi sendiri.

Menurut Siregar dkk (1981) dalam pendekatan usaha tani sebagai suatu sistem, sedikitnya ada dua hal yang perlu mendapat perhatian, *pertama*, adalah struktur dari sistem tersebut, dan *kedua*, fungsi dari komponen-komponen pembentuk sistem itu sendiri. Dalam fungsinya sebagai komponen usaha tani ternak akan berintegrasi dengan lahan komoditi lainnya yang diusahakan, dan dengan petani sebagai pengelola usaha tani.

Mashudulhak dkk (1975) mengemukakan bahwa jika sub sektor peternakan dan tanaman pangan diharapkan berjalan atau saling menunjang satu sama lain, maka perlu diciptakan keseimbangan intensifikasi kedua sub sektor pembangunan tersebut. Implementasi usaha tani terpadu dalam kenyataannya di lapangan, menurut pengamatan Martanegara dkk (1982), belum menyatakan efisien karena belum dilandasi oleh motif ekonomi sepenuhnya. Petani peternak masih memberikan prioritas pertama pada tanaman pangan sebagai usaha pokok, sedangkan usaha ternak dan ikan hanya berfungsi sebagai pelengkap atau usaha sambilan. Keterangan ini terbukti menunjukkan struktur usaha tani yang masih pincang.

Integrasi ternak dengan petani menyangkut empat aspek penting yaitu: (1) Keserasian ternak dengan tujuan petani, (2) Kesenangan petani dan keterampilannya dalam memelihara ternak, (3) Kemampuan petani dari segi

waktu dan tenaga kerja pemelihara dan (4) Keadaan sosial budaya lingkungan setempat (Siregar, 1981).

Suwardi (1977) mendapatkan bahwa terdapat kolerasi yang kuat antara kepadatan penduduk di suatu daerah dengan populasi ternak, adanya hubungan antara jumlah tenaga kerja manusia dengan pengembangan peternakan dimungkinkan oleh masih tersedianya potensi makanan ternak, disamping terbatasnya kesempatan kerja diluar sektor pertanian. Namun sampai batas tertentu, khususnya untuk daerah dengan sistem pertanian intensif, kemungkinan kompetisi penggunaan tenaga kerja manusia dalam kegiatan pengembangan peternakan dan tanaman pangan akan cukup terasa. Kompetisi akan semakin terasa terutama pada sistim pemeliharaan ternak yang bersifat tradisional.

Interaksi ternak dengan lahan mempunyai tiga aspek sebagai berikut : *Pertama*, Adaptasi ternak dengan biologis, *kedua*, kemampuan lahan menghasilkan makanan ternak atau potensi pakan dari suatu daerah, dan *ketiga*, pola pemeliharaan dan daya tampung areal yang tersedia. Dalam integrasinya dengan lahan, menurut Siregar dkk (1981) masalahnya adalah memilih ternak yang sesuai dengan lahan yang tersedia.

Jenis indukan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan perkawinan dan kondisi pedet yang dilahirkan. Karena itu, induk harus dipilih secara teliti, sehingga status kesuburan dan potensi kebuntingan sapi dara ataupun sapi betina dewasa bisa diketahui sejak dini. Berikut ini beberapa syarat indukan sapi betina penghasil pedet yang sehat :

1. Induk betina minimum berumur 1,5 – 2 tahun dan maksimal berumur 5 tahun. Umur sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan perkawinan.

2. Bobot badan indukan impor yang berumur 1,5 tahun sekitar 350 kg/ekor atau lebih. Sementara itu, bobot badan indukan lokal sekitar 225-250 kg/ekor.
3. Kaki kokoh (tidak kecil atau kurus) dengan pijakan dan bentuk kaki normal-tidak membentuk huruf X atau O. Kondisi ini sangat penting bagi sapi betina karena dibutuhkan untuk menopang berat tubuhnya saat bunting.
4. Memiliki mata cerah, bulu yang bagus dan mengkilap, serta panggul yang besar
5. Bentuk ambing relatif besar, letaknya simetris dan memiliki puting sebanyak 4 buah
6. Kemiringan vulva tidak terlalu keatas
7. Ukuran rongga panggul (pelvis) sekitar 20-25 cm. Hal ini untuk memastikan kemudahan induk dalam proses melahirkan.
8. Jika sapi sudah pernah bunting, perhatikan jumlah anak yang telah dilahirkan dan pemeliharaan selama laktasi.
9. Kesehatan umum dan status nutrisi sapi betina baik. Keadaan kesehatan dan status nutrisi berpengaruh terhadap perkembangan embrio dan janin dalam tubuh induk. Dengan status nutrisi yang baik akan diperoleh pedet yang memenuhi standar bobot normal dan tidak tertular penyakit menular.
10. Tidak memiliki kelainan fisik dan penyakit menular.⁶⁰

F. Alur Pikir Penelitian

Program Kerjasama Investasi Pengembangan Pembibitan Sapi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok dilatarbelakangi oleh permasalahan nasional yaitu “tidak terpenuhinya kebutuhan daging, sehingga secara nasional kita masih mengimpor sapi dan daging dari luar negeri. Sehubungan dengan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan daerahnya dan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Solok Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Solok Tahun 2006-2010, Pemerintah Kabupaten Solok menetapkan

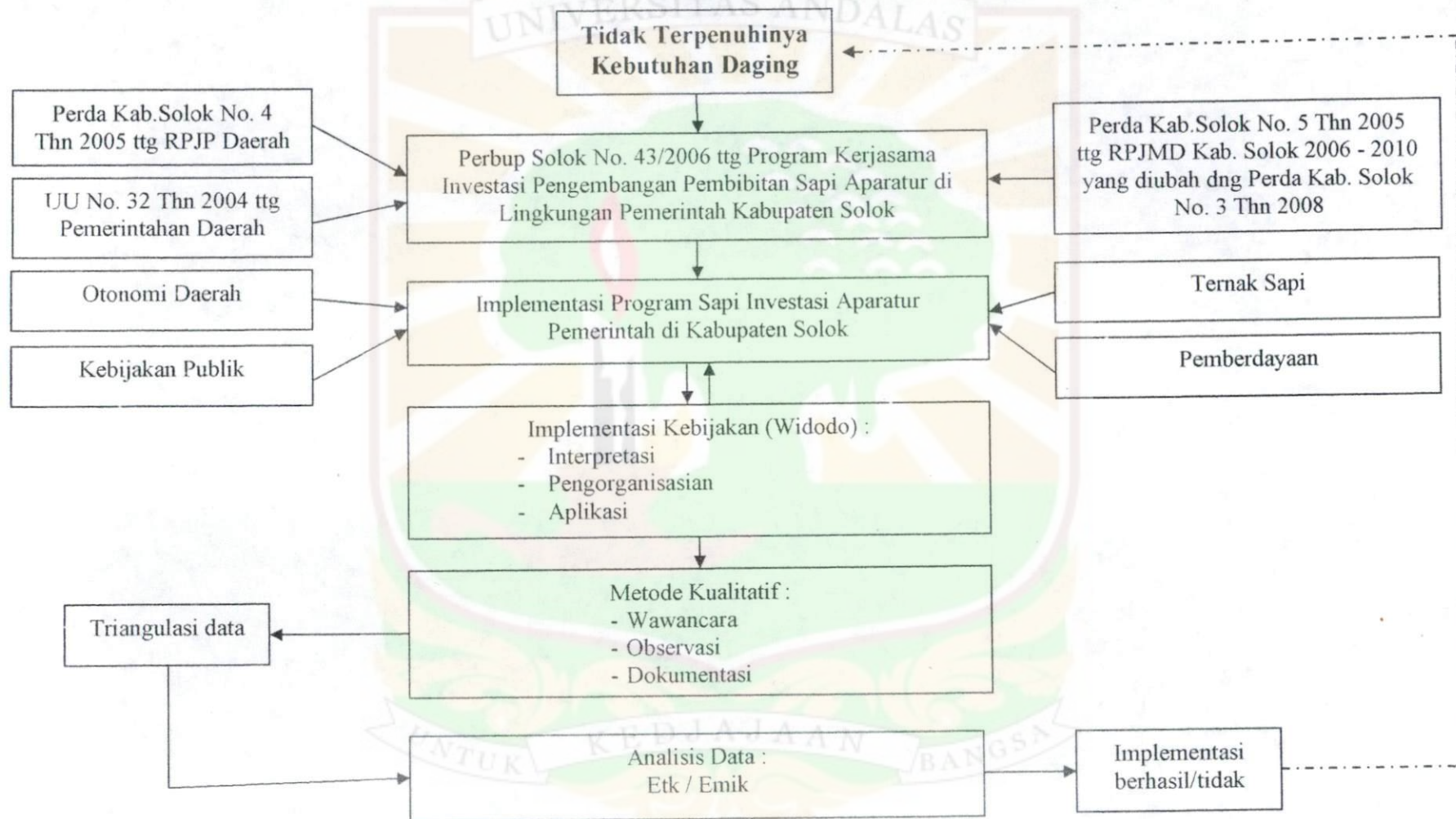
⁶⁰ Samsul Fikar & Dadi Ruhyadi, Opcit, hal 64-65

Peraturan Bupati Solok Nomor 43 Tahun 2006 tentang Kerjasama Investasi Pengembangan Pembibitan Sapi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.

Sehubungan dengan hal diatas alur pikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



ALUR PIKIR PENELITIAN



BAB III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang berguna untuk mempelajari fenomena sosial dengan tujuan menjelaskan dan menganalisis perilaku manusia dan kelompok masyarakat dari sudut pandang yang sama sebagai objek yang diteliti. Menurut Bodgan penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari perilaku yang diamati.⁵⁸

Dari beberapa jenis penelitian kualitatif, penelitian diarahkan pada studi kasus. Studi kasus adalah model yang lebih cocok untuk penelitian dengan pertanyaan *how* dan *why*.⁵⁹ Penelitian dimaksud tidak hanya terbatas pada pengumpulan data tetapi juga meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut. Di samping itu, semua data yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti.

Sehubungan dengan uraian di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan menggambarkan implementasi Program Kerjasama Investasi Pengembangan Pembibitan Sapi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok dan hambatan-hambatan yang ditemui dalam implementasi program.

⁵⁸ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 1989, hal.55

⁵⁹ Robert K. Yin, 2006, *Studi Kasus: Desain dan Metode*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 1

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi penelitian adalah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Solok, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Solok dan kelompok-kelompok penerima Program SIAP yang terdiri dari KPP-IB Kampung Baru Nagari Muaro Pingai, KPP-IB Kaloan Mas Nagari Sulit Air, KPP-IB Tunas Jaya Nagari Koto Sani, KPP-IB Koto Saiyo Nagari Tanjung Alai KPP-IB Bungo Durian nagari Aripin, KPP-IB Kapuah Sakato Nagari Sumani dan KPP-IB Ranah Saiyo Nagari Sumani.

C. Peranan Peneliti

Dalam penelitian ini, peranan peneliti adalah sebagai instrument utama dalam mengumpulkan data, peneliti terlibat langsung dalam proses penelitian, dan peneliti langsung turun ke lapangan untuk memperoleh data agar penelitian yang dilakukan lebih efektif.⁶⁰

D. Unit Analisis

Unit analisis adalah objek yang akan dijadikan sebagai sumber data dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah bagaimanakah implementasi dari Peraturan Bupati Solok Nomor 43 Tahun 2006 tentang Program Kerjasama Investasi Pengembangan Pembibitan Sapi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok serta hambatan-hambatan dalam implementasi Program Kerjasama Investasi Pengembangan Pembibitan Sapi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Implementasi dari Peraturan Bupati Solok Nomor 43 Tahun 2006 berdasarkan pendapat dari Joko Widodo, yaitu

⁶⁰ Ibid. hal.66.

implementasi kebijakan publik yang meliputi tahap interpretasi, tahap pengorganisasian, dan tahap aplikasi serta hambatan-hambatan dalam implementasi Program Kerjasama Investasi Pengembangan Pembibitan Sapi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.

E. Teknik Pemilihan Informan

Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini adalah dengan cara sengaja atau purposive sampling dimana informan dipilih berdasarkan maksud dan tujuan penelitian.⁶¹ Teknik ini digunakan untuk menentukan informan yang dibutuhkan sebagai sumber dan berdasarkan asumsi bahwa informan tersebut memiliki kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian dan dibutuhkan dalam kaitan terhadap Implementasi Program Investasi Pengembangan Pembibitan Sapi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.

Adapun informan dalam penelitian ini sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Daftar Nama Informan

NO.	NAMA	JABATAN	DATA YANG DIBUTUHKAN
1	2	3	4
1.	Syamsurizal, SE., MM.	Mantan Asisten Ekbangesra	Latar Belakang lahirnya program SIAP dan rencana pengembangannya.
2.	Ir. Zurni Asmar	Mantan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan	Data tentang penyebab terjadinya permasalahan dalam pelaksanaan program
3.	Ir. Emri Nurdin	Mantan Kabid Bina Usaha Dinas Perikanan dan Peternakan	Kegiatan yang dilakukan untuk mempersiapkan peternak menerima Program SIAP.
4.	Anita Dewi, S.Pt.	Kasubag Administrasi Perekonomian Primer	Implementasi Program SIAP

⁶¹ Sanafiah Faisal, "Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi, YA 3, Malang, 1990, hal.56.

1	2	3	4
5.	Dwipa Ujianta, S.Pt.	Pendamping Kelompok Kaloan Mas Sulit Air	Implementasi Program SIAP dari sudut pandang Pendamping dan Peternak.
6.	Zultani	Pendamping Kelompok Bungo Durian Nagari Aripin	Implementasi Program SIAP dari sudut pandang Pendamping dan Peternak
7.	Zainun	Pendamping Kelompok Koto Saiyo Nagari Tanjung Alai	Implementasi Program SIAP dari sudut pandang Pendamping dan Peternak
8.	Syafrianto	Ketua Kelompok KPP IB Kaloan Mas Sulit Air	Implementasi Program SIAP dari sudut pandang Ketua Kelompok Pelaksana Program Sapi SIAP
9	Mukhnizon	Ketua Kelompok KPP IB Koto Saiyo Tanjung Alai	Implementasi Program SIAP dari sudut pandang Ketua Kelompok Pelaksana Program Sapi SIAP
10.	Dra. Aspiorita, MM.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pandangan terhadap Program SIAP dari aspek pemilik modal
11.	Ir.Fathol Bahri,MSc. Eng	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	Pandangan terhadap Program SIAP dari aspek pemilik modal

F. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam mendapatkan informasi, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara :

1. Wawancara

Dalam penelitian ini, teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam (indepht interview). Dimana informannya telah mengetahui maksud dan tujuan peneliti secara garis besar dan sifatnya tidak mengikat. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti.⁶²

⁶² Mardalis, op.cit. hal. 67.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.⁶³

Keuntungan menggunakan dokumentasi adalah biayanya relatif murah, waktu dan tenaga lebih efisien, sedangkan kelemahannya adalah data yang diambil dari dokumen cenderung sudah lama, dan kalau ada yang salah cetak maka peneliti juga ikut salah dalam menganalisis datanya. Data yang peneliti dapatkan dalam bentuk dokumentasi antara lain adalah :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 s/d 2025;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006 s/d 2010.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006 s/d 2010.
- d. Strategi Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Solok Tahun 2006-2010.
- e. Peraturan Bupati Solok Nomor 43 Tahun 2006 tentang Program Kerjasama Investasi Pengembangan Pembibitan Sapi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.
- f. Peraturan Bupati Solok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Solok Nomor 43 Tahun 2006 tentang Program

⁶³ Husaini Usman dan Purnomo Setya, *Metode Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hal73.

Kerjasama Investasi Pengembangan Pembibitan Sapi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.

g. Peraturan Bupati Solok Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Peraturan Bupati Solok Nomor 43 Tahun 2006 tentang Program Kerjasama Investasi Pengembangan Pembibitan Sapi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.

h. Peraturan Bupati Solok 35 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Peraturan Bupati Solok Nomor 43 Tahun 2006 tentang Program Kerjasama Investasi Pengembangan Pembibitan Sapi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.

3. Observasi

Pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.⁶⁴ Observasi peneliti lakukan ketika melakukan penelitian selain dengan proses wawancara dan dokumentasi. Dalam hal ini penulis datang langsung ke lokasi KPP-IB.

Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila :

- a. Sesuai dengan tujuan penelitian
- b. Direncanakan dan dicatat secara sistematis
- c. Dapat dikontrol kendalanya (realiabilitasnya dan validitasnya)

Observasi merupakan proses yang kompleks yang tersusun dari proses biologis. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting adalah mengandalkan pengamatan dan ingatan sipeneliti.⁶⁵

⁶⁴ Ibid. hal 74.

⁶⁵ Ibid. hal.30

G. Cross Cek / Triangulasi Data

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan dengan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada dengan menggunakan triangulasi, sebenarnya peneliti telah mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai sumber data.⁶⁶

Ada dua macam triangulasi yaitu :

1. Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.
2. Triangulasi sumber, berarti mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama⁶⁷.

Triangulasi sumber dipakai dengan cara mengecek data yang diperoleh kepada semua informan yang terkait dalam penelitian ini. Tujuannya adalah mendapatkan validitas data. Sedangkan triangulasi teknik digunakan dengan mengecek kembali data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan menggunakan teknik dokumentasi. Apabila peneliti mempunyai data yang berbeda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data.

H. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian data yang terdiri atas catatan lapangan, hasil wawancara, dokumen resmi dengan cara mengumpulkan,

⁶⁶ Beni Ahmad Soebani, *Metode Penelitian*, CV. Pustaka Setia, Jakarta, 2008, hal.189.

⁶⁷ Ibid. hal.189.

mengurutkan, mengelompokkan data sehingga mudah untuk diinterpretasikan dan dipahami.⁶⁸ Analisa data dilakukan dengan menggunakan interpretasi etik dan emik. Interpretasi etik merupakan pandangan informan terhadap suatu hal, sedangkan interpretasi emik merupakan pandangan peneliti terhadap apa yang diteliti. Selain itu peneliti juga melakukan perbandingan menggunakan data-data lain seperti dokumentasi dan hasil observasi, sehingga dapat diperoleh penjabaran hasil penelitian secara etik yaitu pandangan dari peneliti.

Sesuai dengan jenis dan sifat penelitian ini, maka semua data yang telah peneliti dapatkan melalui wawancara dengan informan penelitian, observasi, dan pendokumentasian disusun secara sistematis dan disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran secara mendalam terhadap pokok permasalahan penelitian.

Analisis data penelitian ini telah peneliti lakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data selesai dilakukan. Pada saat wawancara peneliti juga telah melakukan analisis data terhadap hasil wawancara dan melakukan evaluasi dan perbandingan terhadap hasil wawancara yang diberikan masing-masing informan.

Dengan demikian data kualitatif yang diperoleh dalam penelitian digambarkan dengan kata-kata, kemudian dianalisis sesuai dengan gejala atau objek yang diteliti dan diinterpretasikan secara etik yaitu pandangan dari peneliti.

⁶⁸ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif (Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora)*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2002, hal.209.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pemekaran wilayah Kabupaten Solok pada akhir tahun 2003 telah melahirkan satu kabupaten baru yaitu Kabupaten Solok Selatan. Dengan terjadinya pemekaran ini berarti luas wilayah Kabupaten Solok mengalami pengurangan secara signifikan dari semula 708.402 Ha ($7.084.02 \text{ Km}^2$) menjadi 373.800 Ha ($3.738.00 \text{ Km}^2$).

Secara geografis letak Kabupaten Solok berada antara $01^{\circ}20'27''$ dan $01^{\circ}2'39''$ Lintang Selatan dan $100^{\circ}25'00''$ dan $100^{\circ}33'43''$ Bujur Timur. Topografi wilayah sangat bervariasi antara dataran, lembah dan berbukit-bukit dengan ketinggian antara 329 meter-1.458 meter di atas permukaan laut.

Kabupaten Solok disamping punya banyak sungai juga memiliki banyak danau yang terkenal dengan pesona keindahan alamnya. Diantara danau-danau tersebut yang terluas adalah Danau Singkarak, diikuti oleh Danau Kembar (Danau Datas dan Danau Dibawah) serta Danau Talang. Disamping itu Kabupaten Solok juga memiliki satu gunung berapi yaitu Gunung Talang.

Dilihat dari sudut pandang letak Kabupaten Solok, posisinya sangat strategis karena disamping dilewati jalur Jalan Lintas Sumatera juga daerahnya berbatasan langsung dengan Kota Padang selaku ibukota Propinsi Sumatera Barat. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Solok adalah Sebelah Barat : Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan; Sebelah Utara : Kabupaten Tanah Datar; Sebelah Timur: Kota Sawahlunto/Kabupaten Sijunjung dan Sebelah Selatan: Kabupaten Solok Selatan.

Semenjak pusat pemerintahan dialihkan ke Arosuka sebagai ibukota Kabupaten Solok jarak tempuh ke Kota Padang selaku ibukota Propinsi menjadi semakin pendek yaitu 40 km. Sedangkan jarak ke Kota Medan 825 km dan ke Banda Aceh 1.433 km. Disisi lain terjadi sedikit penambahan jarak kalau bepergian dari ibukota kabupaten ke ibukota propinsi lain seperti Pekanbaru (231 km), Jambi (495 km), Palembang via Muara Enim (993 km), Bengkulu via Muaro Bungo (736 km) dan Bandar Lampung (1.170 km).

Tabel 4.1
Luas Daerah, Jumlah Penduduk dan Rata-rata Kepadatan Penduduk
Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Daerah (Km ²)	Penduduk	Kepadatan
1	2	3	4	5
1.	Pantai Cermin	366,00	21.850	59,70
2.	Lembah Gumanti	459,72	51.310	111,61
3.	Hiliran Gumanti	263,28	15.997	60,76
4.	Payung Sekaki	364,50	8.930	24,50
5.	Tigo Lurah	602,50	9.265	15,38
6.	Lernbang Jaya	99,90	26.840	268,67
7.	Danau Kembar	70,10	20.516	292,67
8.	Gunung Talang	385,00	42.758	111,06
9.	Bukit Sundi	109,00	24.035	220,50
10.	IX Koto Sungai Lasi	171,00	10.875	63,60

1	2	3	4	5
11.	Kubung	192,00	56.077	292,07
12.	X Koto Singkarak	257,00	22.461	87,40
13.	Junjung Sirih	295,50	34.919	118,17
14.	X Koto Diatas	102,50	13.986	136,45
Jumlah 2009		3.738,00	359.819	96,26
2008		3.738,00	355.706	95,16
2007		3.738,00	351.515	94,04
2006		3.738,00	347.288	92,91

Sumber : BPS Kabupaten Solok dalam Kabupaten Solok Dalam Angka 2009/2010

Penduduk Kabupaten Solok pada Tahun 2009 berdasarkan proyeksi hasil SUPAS berjumlah 359.819 jiwa. Komposisinya terdiri dari 177.724 jiwa penduduk laki-laki dan 182.095 jiwa penduduk perempuan, dengan rasio jenis kelamin 97,6. Angka ini berarti setiap 100 penduduk perempuan di Kabupaten Solok terdapat 98 penduduk laki-laki atau dengan kata lain jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada laki-laki.

Bila diperhatikan kepadatan penduduk, terjadi peningkatan kepadatan dari 95,16 jiwa perkilometer persegi pada tahun 2008 menjadi 96,26 jiwa perkilometer persegi pada tahun 2009. Peningkatan kepadatan penduduk merupakan dampak langsung dari meningkatnya jumlah penduduk dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan perkembangan penduduk masing-masing kecamatan terlihat Kecamatan Kubung tetap merupakan kecamatan yang terbesar jumlah penduduknya yaitu 56.077 jiwa atau lebih besar dari jumlah penduduk Kota Solok, kemudian diikuti oleh Kecamatan Lembah Gumanti di posisi kedua dengan jumlah penduduk 51.310 jiwa dan Kecamatan Gunung Talang pada posisi ketiga

dengan jumlah penduduk 42.758 jiwa. Sedangkan kecamatan yang terendah jumlah penduduknya adalah Kecamatan Payung Sekaki sebanyak 8.930 jiwa. Hal tersebut tidak berlaku untuk kepadatan penduduk dimana Kecamatan Danau Kembar merupakan kecamatan terpadat, diikuti oleh Kecamatan Kubung, sedangkan Kecamatan Payung Sekaki merupakan kecamatan terjarang jumlah penduduknya.

Tabel 4.2
Luas Lahan Menurut Jenis Penggunaannya di Kabupaten Solok

No	Jenis Penggunaan	Luas Lahan (Ha)	
		2008	2009
1	2	3	4
1.	Lahan Sawah	23.555	23.555
2.	Pekarangan/bangunan dan halaman sekitar	6.611	6.621
3.	Tegal/kebun/ladang/huma	38.611	38.583
4.	Perkebunan	7.829	7.829
5.	Kebun campuran	-	-
6.	Hutan Negara	145.320	145.320
7.	Hutan rakyat	59.898	59.898
8.	Sementara tidak diusahakan	36.153	36.153
9.	Semak/alang-alang	3.581	3.563
10.	Hutan rawa	4	4
11.	Danau/kolam/rawa	373	373
12.	Tambak	-	-
13.	Lainnya	51.865	51.902
Jumlah		373.800	373.800

Sumber : Dinas Pertanian dan Perikanan dalam Kabupaten Solok Dalam Angka 2009/2010

Ket: (-) = Data tidak Tersedia

Ditinjau dari komposisi pemanfaatan lahan, pada tahun 2009 sebagian besar (38.88%) wilayah Kabupaten Solok masih berstatus hutan negara dan 16.02% berstatus hutan rakyat. Sedangkan yang diolah rakyat untuk ladang/kebun 10.32% dan dikelola perusahaan perkebunan 2.09%. Pemanfaatan lahan untuk sawah lebih kurang 6.30% dan merupakan areal sawah terbesar di Sumatera Barat.

Sebagai sentra produksi padi di Sumatera Barat, pada tahun 2009 areal sawah terluas di Kabupaten Solok berada di Kecamatan Gunung Talang, kemudian diikuti oleh Kecamatan Kubung, dan Bukit Sundi. Kecamatan-kecamatan lain luas areal sawahnya masih dibawah angka 3000 Ha.

Tabel 4.3
Populasi Ternak dan Hasil Ternak lainnya Menurut Jenis
Tahun 2007-2009

No	Jenis Ternak	Satuan	Tahun		
			2007	2008	2009
1.	Sapi	Ekor	45.656,00	47.817,00	50.187,00
2.	Kerbau	Ekor	11.489,00	11.984,00	12.427,00
3.	Kambing/Domba	Ekor	17.115,00	18.154,00	19.325,00
4.	Kuda	Ekor	470,00	411,00	392,00
5.	Itik/Unggas lainnya	Ekor	97.216,00	122.646,00	131.310,00
6.	Ayam Kampung	Ekor	202.887,00	228.444,00	239.656,00
7.	Ayam Ras	Ekor	72.810,00	116.778,00	124.459,00
8.	Telur Itik	Kg	533.715,84	673.326,54	720.891,90
9.	Telur Ayam Kampung	Kg	129.594,07	145.918,61	153.080,27
10.	Telur Ayam Ras	Kg	508.867,71	394.713,45	409.92,15
11.	Susu	Liter	76.593,33	79.606,67	82.846,67

Sumber: Dinas Peternakan dalam Kabupaten Solok Dalam Angka 2009/2010

Pada tabel 4.3 terlihat bahwa ternak sapi cukup digemari oleh masyarakat Kabupaten Solok dengan populasi mencapai 45.656,00 pada tahun 2007, 47.817,00 pada tahun 2008 dan 50.187,00 ekor pada tahun 2009 dibandingkan dengan ternak

besar lainnya seperti kerbau hanya 11.489,00 ekor pada tahun 2007, 11.984,00 ekor pada tahun 2008 dan 12.427,00 ekor pada tahun 2009. Apalagi jika dibandingkan dengan kuda yang hanya 470,00 ekor pada tahun 2007, 411,00 ekor pada tahun 2008 dan 392,00 ekor pada tahun 2009.

Tabel 4.4
Populasi Ternak Unggas Menurut Jenis Ternak Tahun 2000-2009

Tahun	Jenis Ternak				
	Ayam Ras Petelur	Ayam Ras Pedaging	Ayam Buras	Itik	Puyuh
2000	15.832	40.428	578.513	288.404	-
2001	25.999	16.291	409.750	114.277	-
2002	29.596	35.259	454.336	123.957	29.823
2003	56.762	33.400	440.706	126.296	15.425
2004	51.317	20.090	377.789	101.277	12.150
2005	47.900	36.886	468.631	114.514	13.350
2006	40.725	34.230	300.772	104.272	11.515
2007	47.250	18.750	202.887	97.216	3.400
2008	51.195	40.440	228.444	122.646	8.500
2009	54.800	46.700	239.656	131.310	4.450

Sumber: Dinas Peternakan dalam Kabupaten Solok Dalam Angka 2009/2010

Ket: (-) = Data tidak Tersedia

Sebagian besar ternak di Kabupaten Solok tahun 2009 mengalami peningkatan populasi dibanding tahun sebelumnya, kecuali Kuda mengalami penurunan sebesar 4.62 persen. Sebagai contoh untuk ternak sapi terjadi peningkatan populasi sebesar 4.96 persen, kerbau mengalami peningkatan populasi sebesar 3.7 persen dan hasil ternak berupa telur itik produksinya meningkat sebesar 7.06 persen.

Disamping peningkatan pada ternak besar, pada tahun 2009 juga terjadi peningkatan populasi pada populasi unggas baik ayam ras (petelur dan pedaging), ayam bukan ras maupun itik dan puyuh.

Tabel 4.5
Banyaknya Rumah Tangga Pemelihara Ternak
Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak

No	Kecamatan	Jenis Ternak			
		Sapi	Kerbau	Kuda	Kambing
1.	Pantai Cermin	1.500	535	-	679
2.	Lembah Gumanti	2.594	1.152	-	225
3.	Hiliran Gumanti	1.235	548	9	208
4.	Payung Sekaki	445	123	-	136
5.	Tigo Lurah	438	134	65	100
6.	Lembang Jaya	2.071	415	-	165
7.	Danau Kembar	605	74	-	42
8.	Gunung Talang	2.051	998	-	558
9.	Bukit Sundi	2.087	339	5	519
10.	IX Koto Sungai Lasi	690	142	10	146
11.	Kubung	2.215	188	54	569
12.	X Koto Singkarak	1.817	272	3	793
13.	Junjung Sirih	951	184	-	192
14.	X Koto Diatas	2.124	1.088	38	778
Jumlah 2009		20.823	6.192	184	5.110
2008		20.179	6.005	221	5.224
2007		21.062	5.963	218	5.514
2006		21.285	5.620	292	4.526

Sumber: Dinas Peternakan dalam Kabupaten Solok Dalam Angka 2009/2010

Ket: (-) = Data tidak Tersedia

Tabel 4.6
Banyaknya Rumah Tangga Budidaya Ternak Unggas
Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak

No	Kecamatan	Jenis Ternak				
		Ayam Ras Petelur	Ayam Ras Pedaging	Ayam Buras	Itik	Puyuh
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pantai Cermin	1	-	3.786	948	...
2.	Lembah Gumanti	-	1	2.005	567	...
3.	Hiliran Gumanti	-	1	4.447	1.414	...
4.	Payung Sekaki	-	-	683	23	...
5.	Tigo Lurah	-	-	943	153	...
6.	Lembang Jaya	-	-	1.274	1.158	...
7.	Danau Kembar	-	-	476	57	...
8.	Gunung Talang	1	2	1.314	2.875	...
9.	Bukit Sundi	-	1	1.868	760	...
10.	IX Koto Sungai Lasi	2	-	293	77	...
11.	Kubung	5	20	1.229	556	...
12.	X Koto Singkarak	-	-	524	204	...
13.	Junjung Sirih	-	-	990	94	...
14.	X Koto Diatas	-	-	524	204	...
Jumlah 2009		9	25	20.356	9.090	...
2008		12	26	21.024	9.083	2
2007		9	6	21.386	7.860	1
2006		10	13	28.739	8.810	16

Sumber: Dinas Peternakan dalam Kabupaten Solok Dalam Angka 2009/2010

Ket: (-) = Data tidak Tersedia

(...) = Data belum tersedia

Tabel 4.7
Jumlah Produksi Daging Menurut Jenis Ternak

Tahun	Jenis Ternak					
	Sapi	Kerbau	Kuda	Kambing	Ayam	Itik
1	2	3	4	5	6	7
2000	958,9	60,0	-	142,4	822,9	119,0
2001	1.006,9	63,0	-	149,5	864,0	124,9
2002	687,0	49,5	-	113,3	671,0	51,1
2003	704,4	47,5	-	119,4	1.102,5	52,9
2004	872,5	81,9	-	55,9	636,1	32,5
2005	881,3	130,3	1,4	43,7	485,6	50,1
2006	888,6	172,3	-	59,6	588,9	57,3
2007	835,0	181,8	1,1	61,4	350,1	61,2
2008	846,5	154,9	1,2	65,1	498,7	77,3
2009	847,7	154,5	1,1	71,0	513,1	82,7

Sumber: Dinas Peternakan dalam Kabupaten Solok Dalam Angka 2009/2010

Ket: (-) = Data tidak Tersedia

B. Program Kerjasama Investasi Pengembangan Pembibitan Sapi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok (Program SIAP)

Kabupaten Solok sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menyelaraskan tujuan dan cita-cita pembangunan daerah dengan tujuan dan cita-cita bernegara sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk melaksanakan dan mencapai tujuan dan satu cita-cita tersebut diperlukan suatu rencana yang dapat merumuskan secara lebih konkrit mengenai pencapaian tujuan terbentuknya Kabupaten Solok dalam mendukung pencapaian tujuan bernegara.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dengan Persetujuan DPRD Kabupaten Solok telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Solok Tahun 2006 sampai Tahun 2025 (RPJP 2006-2025). RPJP 2006-2025 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan sebelumnya untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

RPJP 2006-2025 menetapkan Visi Pembangunan Daerah Tahun 2006-2025 adalah **“Kami Bertekad Menjadi Kabupaten Terbaik dari Yang Baik”**. Dengan komitmen masyarakat bangga pada usaha dan daerahnya, bertaqwa, berakhlak, berbudi luhur dan berdisiplin dan masyarakat perantau bangga pada kampung halamannya serta aparaturnya bangga dalam pengabdianya.⁶⁹

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan melalui misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kehidupan ekonomi masyarakat yang mandiri serta didorong oleh pemerintah daerah;
2. Mewujudkan penataan masyarakat yang mampu menyelaraskan kehidupannya dengan arus modernisasi;
3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, antisipatif, fasilitatif, profesional dan proporsional, transparansi dan akuntabel;
4. Mewujudkan sarana dan prasarana.⁷⁰

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Jangka Panjang Daerah tersebut telah ditetapkan pula Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010 (RPJMD 2005-2010) yang menetapkan

⁶⁹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 1989, hal.55

⁷⁰ Ibid.

Visi Pembangunan Kabupaten Solok untuk tahun 2005-2010 yaitu **Terwujudnya kepemimpinan, pemerintahan, dan masyarakat yang amanah, santun dan tegas menuju masyarakat yang madani di Kabupaten Solok Tahun 2010.**⁷¹

Visi tersebut merupakan bagian dari proses jangka panjang untuk mewujudkan tekad menjadikan Kabupaten Solok sebagai Kabupaten Terbaik dari yang Baik. Oleh karena itu, di dalamnya terkandung makna pokok :

1. Kepemimpinan yang amanah, santun dan tegas adalah kepemimpinan yang memposisikan tugas dan fungsinya sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan, baik secara vertikal maupun horizontal, profesional, efektif, demokratis, dan dekat dengan rakyat.
2. Pemerintah yang amanah, santun dan tegas adalah pemerintahan yang berorientasi kepada penciptaan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel.
3. Masyarakat yang amanah, santun dan tegas adalah masyarakat yang menjunjung tinggi rasa saling percaya, tenggang rasa, konsisten dan tegas, menaati aturan formal serta norma yang telah disepakati bersama.
4. Masyarakat madani adalah masyarakat yang berkualitas, sejahtera, makmur, berlandaskan pada nilai-nilai agama, sosial dan budaya yang tinggi.⁷²

Pemerintahan yang amanah, santun dan tegas adalah pemerintah yang memberdayakan masyarakatnya dengan membangun kehidupan yang demokratis, akuntabel, menghormati hak-hak dasar manusia dan menjunjung tinggi hukum. Pemerintahan yang dipercaya oleh rakyatnya, serta bertanggung jawab membawa dan memimpin masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera. Masyarakat yang amanah, santun dan tegas adalah masyarakat yang percaya kepada pemerintahnya dan menjaga kepercayaan tersebut. Masyarakat percaya akan apa yang dilakukan pemimpinnya, bertanggung jawab dan berpartisipasi secara konstruktif. Hidup bernilai dan berbudi pekerti luhur, bertaqwa kepada

⁷¹ Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Solok (RPJMD) 2005-2010.

⁷² Ibid.

Allah SWT, berbudaya, menghargai sesama manusia dan lingkungan, demokratis, cerdas, sadar hukum, dan mandiri.

Pemerintah dan masyarakat yang amanah, santun dan tegas akan terwujud apabila :

1. Kesejahteraan masyarakat semakin baik, semakin cerdas, sehat, cukup kebutuhan pokoknya; sandang, pangan, papan, dan kebutuhan pokok lainnya;
2. Sistem dan manajemen pemerintahan semakin efektif dan fasilitatif dalam melayani dan mengayomi;
3. Terbuka peluang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi; dan
4. Terjamin rasa aman dan kepastian hukum.⁷³

Masyarakat madani yang didambakan adalah masyarakat yang memiliki kemampuan dan kemandirian dalam mengontrol dan meningkatkan taraf kehidupan dan tingkat kesejahteraannya. Yaitu masyarakat yang tertata dengan baik, bertaqwa kepada Allah SWT dan menjalankan syariat agama dengan benar yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Berakhlak mulia, berbudi luhur, dan disiplin. Suatu tatanan masyarakat yang mau dan mampu berpartisipasi secara konstruktif dalam setiap proses pembangunan, egaliter, demokratis, berbudaya dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsanya.

Masyarakat madani adalah masyarakat dimana setiap individu didalamnya menghargai kehidupan dan alam sekitarnya; anti kekerasan, saling menghormati dan menghargai antar sesama, menghargai perbedaan serta mempertahankan kehidupan kemanusiaan yang adil dan beradab (justice dan equity). Saling mengayomi dalam hidup dan kehidupan sehingga dapat menghindari perpecahan antar kelompok. Memiliki integritas tinggi sebagai warga masyarakat, tahu akan hak dan kewajibannya untuk menolong sesama manusia sehingga terbentuk

⁷³ Ibid.

masyarakat yang adil dan makmur. Tinggi integritas dirinya sehingga terhindar dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Masyarakat yang demikian akan terwujud apabila:

1. Tingkat pendidikan dan kesejahteraan individu masyarakat semakin baik;
2. Setiap orang menjalankan ajaran agamanya dengan baik dan benar.
3. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk mengakses informasi dan kemajuan lingkungannya;
4. Setiap orang memiliki akses yang sama untuk meningkatkan taraf kehidupan; keamanan, kemapanan ekonomi, derajat kesehatan, serta
5. Otonomi dalam melaksanakan hak dan kewajiban sosial politiknya sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat.⁷⁴

Berdasarkan perumusan dan makna pokok yang terkandung dalam visi tersebut ditetapkan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Solok sebagai berikut :

1. Membangun manajemen pemerintahan yang profesional dan fasilitatif;
2. Membangun masyarakat yang madani;
3. Membangun kualitas pelayanan yang prima kepada masyarakat;
4. Membangun suasana keterbukaan, aspiratif dan partisipatif;
5. Membangun sinergitas dalam pemberdayaan masyarakat;
6. Membangun komitmen bersama dalam penegakan hukum secara konsisten dan konsekwen;
7. Membangun kualitas hubungan yang dinamis dengan perantau.⁷⁵

Misi pembangunan Kabupaten Solok Tahun 2005 sampai Tahun 2010 tersebut kemudian disempurnakan kembali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2008 sehingga menjadi:

1. Membangun kehidupan masyarakat yang berkualitas dan sejahtera.
2. Membangun manajemen pemerintahan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
3. Memperkuat sinergisitas pemerintah, masyarakat, perantau dan swasta dalam setiap proses pembangunan.
4. Membangun komitmen bersama dalam penegakan hukum.⁷⁶

⁷⁴ Ibid.

⁷⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Solok 2005-2010.

⁷⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Solok, op.cit.

Tujuan yang ingin dicapai selama periode pemerintahan Tahun 2006-2010 adalah :

1. Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan, derajat kesehatan, dan berkembangnya ekonomi rakyat.
2. Terwujudnya pemerintahan yang profesional dan demokratis berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
3. Terwujudnya sinergitas pemerintah, masyarakat dan swasta dalam setiap proses pembangunan.
4. Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang religius dan berbudaya.
5. Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban di tengah masyarakat.⁷⁷

Paradigma pembangunan modern yang dipandang paling efektif dan dikembangkan di banyak kawasan untuk merebut peluang dan menghadapi tantangan global adalah pembangunan yang berlangsung secara berkelanjutan dan menempatkan setiap individu dan masyarakat sebagai subjek sekaligus objek yang harus dibangun. Proses pembangunan disusun dalam satu rencana yang sistematis, partisipatif, demokratis, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program pembangunan dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan permasalahan riil yang dihadapi masyarakat dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki.

Dalam konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) proses pembangunan terdiri atas tiga dimensi yang berintegrasi: 1) peningkatan kualitas SDM; pendidikan dan kesehatan, 2) optimalisasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, 3) pembangunan ekonomi. Keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari pencapaian Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) tetapi juga bagaimana tingkat pendidikan, derajat kesehatan serta kemampuan ekonomi masyarakatnya. Pembangunan dikatakan berhasil apabila mampu

⁷⁷ Ibid.

meningkatkan kualitas kesejahteraan dan kehidupan serta masa depan seluruh lapisan masyarakat dan lingkungannya. Ukuran keberhasilan ini dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan telah dipakai oleh dunia internasional untuk menilai keberhasilan dan kemajuan satu bangsa.

Berdasarkan uraian di atas, proses pembangunan paling tidak memiliki tiga sasaran utama :

1. Meningkatkan standar hidup, tidak hanya berupa pendapatan tetapi juga perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan serta peningkatan perhatian terhadap nilai-nilai kultural dan kemanusiaan.
2. Meningkatkan ketersediaan dan perluasan distribusi kebutuhan pokok masyarakat; pangan, sandang, papan, dan perlindungan (rasa aman).
3. Perluasan pilihan-pilihan sosial dan ekonomi bagi setiap individu. Membebaskan masyarakat dari belitan dan kungkungan sikap menghambakan dan ketergantungan. Tidak hanya terhadap orang lain tetapi juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka.

Mengacu kepada konsep pembangunan tersebut di atas, indikator makro pembangunan Kabupaten Solok tahun 2005 menunjukkan peningkatan yang signifikan pada kesejahteraan masyarakat dibanding tahun 2000. Dampak krisis multidimensi tahun 1997 terhadap aktivitas ekonomi masyarakat mulai memperlihatkan kepulihan dan perkembangan positif. Hal ini tampak pada :

1. Rata-rata lama bersekolah penduduk dewasa 7,3 tahun.
2. Usia harapan hidup masyarakat telah mencapai 64,6 tahun.
3. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok telah mencapai 5,53% yang didorong oleh pertumbuhan di seluruh sektor ekonomi.
4. Pendapatan perkapita tahun 2005 telah mencapai Rp.5,69 juta atau tumbuh 2,66% dibanding tahun 2004.⁷⁸

⁷⁸ Ibid.

Namun demikian, permasalahan mendasar yang masih harus dihadapi dan menjadi tantangan pembangunan 2006-2010 adalah :

1. Derajat dan kualitas pendidikan masyarakat masih belum memuaskan. APK pendidikan dasar masih jauh di bawah rata-rata APK Provinsi Sumatera Barat dan APK Nasional.
2. Angka buta huruf pada orang dewasa masih tinggi, yakni 5,87%.
3. Begitu pula halnya dengan pembangunan di bidang kesehatan. Angka kematian ibu dan bayi masih tinggi, prevalensi gizi buruk juga relatif masih tinggi serta berbagai persoalan kesehatan lainnya.
4. Masih tingginya angka kemiskinan. Keadaan ini tergambar pada jumlah keluarga dan rumah tangga miskin. Penduduk miskin sebagian besar berpendidikan SLTP ke bawah, bahkan banyak yang tidak tamat SD.
5. Masih rendahnya tingkat pemerataan pendapatan yang berdampak pada lebarnya tingkat kesenjangan di tengah masyarakat.⁷⁹

Lebih dari 70% perekonomian penduduk Kabupaten Solok bertumpu pada sektor pertanian dan perkebunan. Komoditi yang menjadi penopang utama pada sektor ini adalah beras, palawija dan sayur-sayuran. Komoditi yang juga berkembang dengan baik adalah kopi, karet, kakao, dan beberapa jenis buah-buahan, seperti : markisah, alpukat, dan jeruk. Hal ini sesuai pula dengan potensi alam dan karakteristik wilayah Kabupaten Solok.

Kondisi tersebut memengaruhi pula tingkat kehidupan masyarakatnya. Sebagian besar petani berstatus sebagai petani penggarap atau petani dengan lahan sempit, sementara jumlah tanggungan rata-rata per kepala keluarga mencapai 4,3 orang. Dampaknya adalah jumlah keluarga miskin relatif tinggi dan jumlah pengangguran terdidik terus bertambah. Jumlah penduduk miskin tahun 2005 tercatat 89.233 jiwa dengan 25.089 KK.⁸⁰

Tingginya angka kemiskinan dan rendahnya pendapatan masyarakat berpengaruh pula terhadap indikator pendidikan dan kesehatan. Penduduk miskin

⁷⁹ Ibid.

⁸⁰ Ibid.

pada umumnya tidak mampu mengakses pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Hal ini disebabkan oleh besarnya biaya yang harus dikeluarkan, sementara untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari bagi mereka masih sulit.

Untuk menanggulangi masalah tersebut di atas maka dibutuhkan alternatif strategis dan integratif untuk pembangunan SDM masyarakat dan sumber daya ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Di samping mengoptimalkan potensi SDM, pembangunan harus pula mampu mengoptimalkan potensi ekonomi strategis selain pertanian dan perkebunan, seperti industri kecil, sektor informal, pariwisata, perdagangan dan jasa.

Oleh karena itu untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka prioritas program pembangunan dituangkan ke dalam tiga pilar utama, yaitu :

1. Meningkatkan derajat dan kualitas pendidikan masyarakat sebagai modal dasar untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, berkualitas, sejahtera dan madani.
2. Meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat. Masyarakat yang cerdas akan terwujud apabila derajat kesehatan terjamin.
3. Meningkatkan dan mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi kerakyatan yang ditandai dengan terjadinya peningkatan pendapatan perkapita penduduk, peningkatan distribusi serta mobilitas ekonomi masyarakat.⁸¹

Sasaran utama pembangunan Kabupaten Solok 2006-2010 adalah meningkatnya kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat. Peningkatan ini ditandai dengan :

1. Meningkatnya rata-rata lama bersekolah dari 7,30 tahun 2005 menjadi 8,0 tahun 2010 dan angka melek huruf usia dewasa meningkat dari 97,10% tahun 2005 menjadi 99% tahun 2010.
2. Meningkatnya kualitas dan usia harapan hidup masyarakat dari 64,6 tahun 2005 menjadi 67,6 tahun 2010.

⁸¹ Ibid.

3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari 5,53% tahun 2005 menjadi 6,8% tahun 2010 yang berbasis pada pemerataan pendapatan agar dapat mempersempit kesenjangan sosial ekonomi.
4. Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk dari Rp.5,69 juta tahun 2005 menjadi 7,5 juta tahun 2010.
5. Menurunnya angka kemiskinan dari $\pm 26\%$ tahun 2005 menjadi 20.5% dari jumlah penduduk tahun 2010.⁸²

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan harus ditopang oleh manajemen pemerintahan yang baik dan bersih, partisipasi dan sinergitas pemerintah dengan masyarakat, perantau dan dunia usaha, serta terjaminnya kepastian hukum, rasa aman, dan ketentraman. Hal ini ditandai dengan :

1. Budaya dan etos kerja aparatur pemerintah yang profesional, disiplin dan tangguh. Manajemen pemerintahan daerah terlaksana dengan efektif dan efisien berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
2. Tingginya partisipasi aktif masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik.
3. Kuatnya sinergisitas pemerintah, masyarakat, perantau dan swasta dalam mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan madani.
4. Adanya komitmen bersama untuk mewujudkan kehidupan yang aman, nyaman dan tenteram.⁸³

Komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berintegrasi. Tiga pilar pembangunan akan sukses apabila ditopang oleh manajemen pemerintahan yang baik dan bersih, ketersediaan infrastruktur dan regulasi pendukung, partisipasi masyarakat dan dunia usaha, serta adanya keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.

Organisasi pemerintahan dan masyarakat harus mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan bersama. Ada kearifan untuk melihat permasalahan secara komprehensif dan merencanakan pembangunan secara

⁸² Ibid.

⁸³ Ibid.

demokratis, transparan, serta mengedepankan asas manfaat dan kebutuhan daerah.

Pemahaman yang sama juga harus tercipta pada masyarakat.

Atas dasar pemikiran tersebut di atas, strategi pokok pencapaian tujuan dan sasaran utama pembangunan 2006-2010 adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan iklim dan budaya kerja yang berorientasi kepada etos kerja tinggi dan pelayanan prima pada setiap tingkatan pemerintahan.
2. Mengembangkan kawasan yang berpotensi untuk cepat tumbuh guna memacu pertumbuhan wilayah kecamatan dan nagari yang berdekatan dan percepatan penurunan angka kemiskinan.
3. Membangun infrastruktur pendukung untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses sarana dan prasarana pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Meningkatkan peranserta semua komponen masyarakat dan perantau untuk mempercepat pembangunan di nagari-nagari.
5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar pemerintahan dan antar lembaga guna menyukseskan pencapaian tujuan dan sasaran pokok pembangunan.⁸⁴

Berdasarkan strategi pokok pencapaian tujuan dan sasaran utama pembangunan 2006-2010 tersebut, maka kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilakukan untuk mengembangkan usaha peternakan yang lebih ekonomis dalam upaya meningkatkan nilai tambah hasil peternakan, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat petani adalah :

1. Pembinaan kelembagaan petani peternak (kelompok tani peternak).
2. Pengadaan bibit ternak unggul, seperti sapi unggul dan ayam buras;
3. Pelatihan budidaya ternak;
4. Pengendalian/pemberantasan penyakit hewan dan pelayanan kesehatan hewan seperti pemberian vaksin SE, vaksin antrax, vaksin ND, vaksin AI, dan obat-obatan lainnya;
5. Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana tempat pemotongan hewan (TPH) dan pos kesehatan hewan;
6. Peningkatan efisiensi tata niaga ternak dan hasil ternak melalui pengembangan pasar ternak;
7. Formalisasi transaksi ternak yang ditujukan ke luar daerah;
8. Fasilitasi pembentukan jaringan pemasaran ternak ke daerah lain seperti ke daerah tetangga ataupun provinsi tetangga;

⁸⁴ Ibid.

9. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan SDM petugas teknis peternakan (seperti ET, PKB, ATR, paramedis, dan keurmaster) melalui pendidikan dan pelatihan;
10. Pengadaan peralatan pos kesehatan hewan;
11. Pengadaan semen beku dan N2 cair;
12. Fasilitasi temu usaha peternak dengan pemilik modal;
13. Fasilitasi pengembangan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara peternak dengan pemilik modal;
14. Peningkatan pemasaran, standar mutu, dan nilai tambah produk peternakan;
15. Fasilitasi pelatihan penyusunan ransum alternatif;
16. Pemanfaatan teknologi rekayasa genetika untuk menghasilkan komoditas peternakan yang unggul dan bernilai ekonomis tinggi;
17. Peningkatan kualitas SDM petani ternak melalui pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan;
18. Fasilitasi pelatihan pembuatan pakan ternak;
19. Pembuatan dan pengembangan kebun rumput unggul makanan ternak;
20. Peningkatan nilai tambah produksi dan pendapatan petani ternak.⁸⁵

Salah satu program yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan Pembangunan 2006-2010 adalah dirumuskannya Program SIAP dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 43 Tahun 2006 tentang Program Kerjasama Investasi Pengembangan Pembibitan Sapi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok (Program SIAP). Program SIAP merupakan suatu terobosan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Melalui program ini pemerintah daerah Kabupaten Solok memotivasi pejabat berinvestasi dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi kerakyatan pada sub sektor peternakan terutama dalam rangka membantu keluarga miskin dan meningkatkan populasi di kawasan sentra produksi peternakan yang berbasis agrobisnis.⁸⁶

Tujuan dari program SIAP adalah :

⁸⁵ Pemerintah Kabupaten Solok, *Strategi Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Solok Tahun 2006-2010*, Arosuka, 2007, hal. 54.

⁸⁶ Peraturan Bupati Solok Nomor 43 Tahun 2006 tentang Program Kerjasama Investasi Pengembangan Bibit Sapi Aparatur di Lingkungan Pemerintah kabupaten Solok

C. Implementasi Program Kerjasama Investasi Pengembangan Pembibitan Sapi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok (Program SIAP)

1. Tahap Interpretasi

Menurut Joko Widodo tahap interpretasi merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang masih bersifat teknis operasional. Kebijakan umum atau kebijakan strategis (strategic policy) akan dijabarkan ke dalam kebijakan manajerial (managerial policy) dan kebijakan manajerial akan dijabarkan dalam kebijakan teknis operasional (operational policy). Kebijakan umum atau kebijakan strategis diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah (perda) yang dibuat bersama antara lembaga legislatif (DPRD) dan lembaga eksekutif (pemerintah daerah). Kebijakan manajerial diwujudkan dalam bentuk keputusan-keputusan kepala daerah (peraturan bupati atau keputusan bupati) dan kebijakan teknis operasional diwujudkan dalam bentuk kebijakan kepala dinas, kepala badan atau kepala kantor sebagai unsur pelaksana teknis pemerintah daerah.

Apabila kita hubungkan dengan implelementasi program SIAP maka kegiatannya adalah bagaimana Pemerintah Kabupaten Solok menjabarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010 yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2008. Peraturan Pelaksanaan dari kedua Perda tersebut salah satunya adalah Peraturan Bupati Solok Nomor 43 Tahun 2006 tentang Program

Petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program SIAP disusun oleh Dinas Peternakan (Sekarang Dinas Perikanan dan Peternakan) dan dituangkan dalam Peraturan Bupati Solok Nomor 43 Tahun 2006 tentang Program Kerjasama Investasi Pengembangan Pembibitan Sapi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.¹⁰²

Namun menurut penulis Peraturan Bupati Solok Nomor 43 Tahun 2006 merupakan kebijakan yang memuat kebijakan manajerial dan kebijakan teknis operasional tapi belum mengatur secara lengkap kebijakan teknis operasional yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan Program SIAP.

Demikian juga halnya dengan kegiatan sosialisasi Program SIAP. Pada tahap interpretasi sosialisasi program hanya dilakukan kepada pejabat eselon II dan III. Sosialisasi kepada peternak dilaksanakan setelah aplikasi program. Sedangkan kepada Wali Nagari Program ini justru tidak disosialisasikan sebagaimana mestinya. Padahal Wali Nagari adalah pihak yang akan mengawasi pelaksanaan Program SIAP ini di lapangan.

2. Tahap Pengorganisasian

Menurut Joko Widodo tahap pengorganisasian ini lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentuan lembaga organisasi mana yang akan melaksanakan, dan siapa pelakunya); penetapan anggaran (berapa besarnya anggaran yang diperlukan, dari mana sumbernya, bagaimana menggunakan dan mempertanggungjawabkan); penetapan prasarana dan sarana apa yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, penetapan tata kerja (juklak dan juknis); dan penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan termasuk penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan.

¹⁰² Anita Dewi, S.Pt. Wawancara tanggal 28 Desember 2010 di Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Solok.

Dalam Program SIAP kegiatan pengorganisasian dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Pelaksana Kebijakan

Perlu ditunjuk Pelaksana Kebijakan Program SIAP yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Solok. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya perangkat daerah yang terlibat dalam program SIAP ini adalah Asisten Ekbangkesra, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan, para pejabat eselon II dan Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok dan kelompok-kelompok peternak yang akan memelihara sapi Program SIAP. Di samping itu perlu pula ditunjuk pendamping untuk masing-masing kelompok dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Solok.

Penetapan pelaku kebijakan bukan sekedar menetapkan lembaga mana yang melaksanakan dan siapa saja yang melaksanakan, tetapi juga menetapkan tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dari masing-masing pelaku kebijakan tersebut. Dengan demikian maka Keputusan Bupati yang ditetapkan disamping menunjuk lembaga-lembaga dan orang yang melaksanakan kebijakan juga langsung menetapkan tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dari masing-masing pihak yang telah ditunjuk tersebut.

Namun Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pelaksana Program SIAP ini tidak pernah ditetapkan. Pelaksana Program SIAP hanya berdasarkan pada Peraturan Bupati Solok Nomor 43 Tahun 2006. Padahal Peraturan Bupati Solok Nomor 43 Tahun 2006 hanya bersifat pengaturan dan belum final. Di samping itu

Peraturan Bupati Solok Nomor 43 Tahun 2006 belum merumuskan secara tegas dan jelas tugas pokok, fungsi, hak dan wewenang pelaksana Program SIAP.

Hal yang sama terjadi pula dalam penetapan kelompok sasaran program SIAP. Sebagaimana diungkapkan oleh Ir. Zurni Asmar :

“Berdasarkan verifikasi kelayakan yang dilakukan oleh Tim Verifikasi maka ditetapkanlah kelompok yang menjadi sasaran Program SIAP sebagai berikut :

- a. KPP-IB Kampung Baru Nagari Muaro Pingai.
- b. KPP-IB Kaloan Mas Nagari Sulit Air.
- c. KPP-IB Tunas Jaya Nagari Koto Sani.
- d. KPP-IB Koto Saiyo Nagari Tanjung Alai.
- e. KPP-IB Bungo Durian Nagari Aripin.
- f. KPP-IB Kapuah Sakato Nagari Sumani.
- g. KPP-IB Ranah Saiyo Nagari Sumani.¹⁰³

Namun penetapan kelompok sasaran ini tidak dikukuhkan dengan Keputusan Bupati Solok ataupun Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Solok .

Demikian pula halnya dengan petugas pendamping di lapangan. Mereka hanya ditunjuk sebagai pendamping dengan surat kepala dinas tanpa dijelaskan tugas pokok, fungsi, hak dan wewenangnya. Dwipa Ujianta, S.Pt. Pendamping KPP-IB Kaloan Mas Nagari Sulit Air mengungkapkan :

Bahwa dia ditunjuk sebagai pendamping pada KPP-IB Kaloan Mas Nagari Sulit Air dengan surat Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Solok, dalam surat tersebut tidak dijelaskan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya. Di samping itu dia tidak dibekali dengan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan protapnya, sehingga dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya apabila pejabat tiba-tiba memutuskan menarik atau memindahkan ternaknya ke tempat lain.¹⁰⁴

¹⁰³ Ir. Zurni Asmar, Wawancara, tanggal 28 Desember 2010 di Sekretariat daerah Kabupaten Solok.

¹⁰⁴ Dwipa Ujianta, S.Pt., wawancara tanggal 5 Januari 2011 di KPP-IB Kaloan Mas Sulit Air.

b. Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure)

Setiap melaksanakan kebijakan perlu ditetapkan Standard Operating Procedure (SOP) sebagai pedoman, petunjuk, tuntunan dan referensi bagi para pelaku kebijakan agar mereka mengetahui apa yang harus disiapkan dan lakukan, siapa sasarannya dan hasil apa yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu SOP dapat pula digunakan untuk mencegah timbulnya perbedaan dalam bersikap dan bertindak ketika dihadapkan pada permasalahan pada saat mereka melaksanakan kebijakan. Oleh karena itu setiap kebijakan yang dibuat perlu dibuat prosedur tetap (Protap) atau prosedur baku berupa standar prosedur operasi dan atau standar pelayanan minimal.

Protap yang perlu dibuat dalam implementasi program SIAP antara lain : petunjuk teknis spesifikasi ternak yang akan dibeli, teknis pembuatan kandang, syarat-syarat peternak yang dapat diikuti dalam program SIAP, petunjuk teknis bagi hasil, prosedur tetap apabila ternak harus di IB atau memerlukan tenaga kesehatan hewan apabila ternak mengalami sakit, prosedur tetap pembelian, prosedur tetap potong paksa, prosedur tetap pengalihan pemelihara dan prosedur tetap penjualan. Jadi jelas apabila peternak tidak memelihara ternak sesuai dengan aturan teknis peternakan jelas langkah-langkah apa yang dapat dilakukan oleh pemilik modal. Begitu pula apabila sapi harus di IB atau sakit kepada siapa peternak menyampaikannya. Dan seluruh pelaksana kebijakan melakukan tindakan yang sama dalam menangani kejadian dan permasalahan yang sama dalam peternakan seperti IB, ternak sakit, pembelian ternak, potong paksa, pengalihan pemeliharaan ternak dan penjualan ternak. Dengan demikian setiap

pihak yang terlibat yang pelaksanaan Program SIAP dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Dalam pelaksanaan Program SIAP tidak pernah dibuat petunjuk teknis dan prosedur tetap. Sehingga penyelesaian permasalahan yang terjadi di lapangan membutuhkan waktu yang cukup lama. Anita Dewi, S.Pt mengungkapkan bahwa apabila terjadi permasalahan, penyelesaiannya dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

1. Apabila terjadi permasalahan di lapangan pemilik modal, peternak atau pendamping di lapangan melapor kepada kepala dinas perikanan dan peternakan;
2. Berdasarkan laporan pemilik modal, peternak atau pendamping di lapangan, kepala dinas perikanan dan peternakan menyampaikan laporan kepada Asisten Ekbangkesra.
3. Berdasarkan laporan kepala dinas perikanan dan peternakan, Asisten Ekbangkesra mengundang kepala dinas dan instansi terkait untuk membahasnya di dalam rapat.
4. Kesimpulan rapat disampaikan kepada Bupati dalam bentuk telaahan staf untuk mendapatkan persetujuan.
5. Berdasarkan persetujuan Bupati dirumuskan perubahan terhadap Peraturan Bupati Solok Nomor 43 Tahun 2006 atau diterbitkan surat Bupati atau Sekretaris Daerah dan disampaikan kepada pihak-pihak terkait.

c. Sumber Daya Keuangan dan Peralatan

Setelah ditetapkan siapa yang menjadi pelaku kebijakan dan standar prosedur operasi (SOP), langkah berikutnya perlu ditetapkan berapa besarnya anggaran dan darimana sumber anggaran tadi, serta peralatan apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kebijakan.

Besarnya anggaran untuk melaksanakan kebijakan tentunya sangat tergantung pada macam dan jenis kebijakan yang akan dilaksanakan. Namun sumber anggaran setidaknya dapat ditetapkan.

Untuk sapi Program SIAP ini tentunya harus ditetapkan komponen biaya yang dibebankan kepada APBD dan komponen biaya yang menjadi tanggung jawab pemilik modal (Pejabat Eselon II dan Eselon III). Komponen biaya yang dibebankan kepada APBD antara lain biaya pembinaan dan pengawasan. Biaya yang dibebankan kepada pemilik modal yaitu biaya pembelian sapi, konsentrat, Inseminasi Buatan, obat-obatan dan vitamin.

Demikian pula macam, jenis dan besar kecilnya peralatan yang diperlukan sangat bervariasi dan tergantung kepada macam dan jenis kebijakan yang akan dilaksanakan. Meskipun demikian yang lebih penting untuk diketahui dan ditegaskan untuk melaksanakan kebijakan perlu didukung oleh peralatan yang memadai. Tanpa peralatan yang cukup dan memadai akan dapat mengurangi efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan kebijakan. Untuk program sapi SIAP peralatan yang dibutuhkan antara lain kandang, tali, sabit. Pengadaan peralatan ini tentunya dibebankan kepada peternak.

Berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor 43 Tahun 2006 dana yang dibutuhkan untuk kerjasama 1 ekor sapi yang perlu disediakan oleh pemilik modal (Pejabat Eselon II dan Eselon III) adalah sebesar Rp. 7.800.000,00 (Tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut : a. biaya pengadaan sapi Rp. 7.000.000,00, dana paket IB dan kesehatan hewan Rp.450.000,00 dan dana cadangan resiko Rp.350.000,00.¹⁰⁵

d. Penetapan Manajemen Pelaksanaan Kebijakan

Manajemen pelaksanaan kebijakan dalam hal ini lebih ditekankan pada penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Apabila pelaksanaan kebijakan melibatkan lebih dari satu lembaga

¹⁰⁵ Expose Kepala Dinas Peternakan

(pelaku kebijakan) maka harus jelas dan tegas pola kepemimpinan yang digunakan, apakah menggunakan pola kolegal, atau ada salah satu lembaga yang ditunjuk sebagai koordinator. Bila ditunjuk salah satu diantara pelaku kebijakan untuk menjadi koordinator biasanya lembaga yang terkait erat dengan pelaksanaan kebijakan yang diberi tugas sebagai leading sektor bertindak sebagai koordinator dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dalam program SIAP yang menjadi koordinator adalah Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, karena kebijakan Program SIAP ini melibatkan lebih dari satu perangkat daerah yaitu Dinas Perikanan dan Peternakan sebagai instansi teknis yang menangani teknis peternakannya dan Badan Pemberdayaan Masyarakat yang menangani aspek pemberdayaan masyarakatnya.

e. Penetapan Jadwal Kegiatan

Agar kinerja pelaksanaan kebijakan menjadi baik setidaknya dari “dimensi proses pelaksanaan kebijakan”, maka perlu ada penetapan jadwal pelaksanaan kebijakan. Jadwal pelaksanaan kebijakan tadi harus diikuti dan dipatuhi secara konsisten oleh para pelaku kebijakan. Jadwal pelaksanaan kebijakan ini penting, tidak saja dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan, tetapi sekaligus dapat dijadikan sebagai standar untuk menilai kinerja pelaksanaan kebijakan, terutama dilihat dari dimensi proses pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu setiap pelaksanaan kebijakan perlu ditegaskan dan disusun jadwal pelaksanaan kebijakan.

Dalam interpretasi Program SIAP telah disusun jadwal sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.12. Namun dalam implementasinya tidak satupun sesuai

dengan penjadwalan yang telah disusun. Menurut penulis dalam implementasi program SIAP harus dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Peraturan Bupati tentang Program SIAP, Petunjuk Teknis dan Protap;
- 2) Penetapan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Organisasi Pelaksana Program;
- 3) Pembahasan Skim kredit dengan BPD.
- 4) Penetapan Lokasi Peternak;
- 5) Pendataan Calon Peternak;
- 6) Penyampaian nama-nama calon peternak kepada Bupati dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 7) Penyusunan Konsep Naskah Kerjasama pejabat dengan peternak;
- 8) Pembahasan Konsep Naskah Perjanjian Kerjasama Antara pejabat dengan peternak;
- 9) Penyempurnaan Naskah Perjanjian Kerjasama Antara pejabat dengan peternak;
- 10) Sosialisasi program SIAP kepada pejabat eselon II dan eselon III;
- 11) Sosialisasi Program SIAP kepada peternak;
- 12) Pengiriman Nama-nama pejabat Eselon II dan Eselon III kepada BPD;
- 13) Pencairan kredit;
- 14) Pembelian sapi oleh pejabat bersama peternak;
- 15) Launching program;
- 16) Pemeliharaan sapi oleh peternak;

Jadwal pelaksanaan masing-masing kegiatan harus dipertimbangkan sedemikian rupa sehingga tidak ada yang dipaksakan. Misalnya untuk penyusunan program, penyusunan petunjuk teknis dan protap Program SIAP harus diberikan waktu yang cukup, sehingga aturan itu lengkap dan telah mengatur semua hal yang perlu diatur sehingga tidak sering diubah dalam aplikasi.

Demikian juga jarak waktu antara sosialisasi kepada peternak dan pembelian sapi oleh pejabat dan peternak, harus dipertimbangkan sedemikian rupa sehingga peternak mempunyai cukup waktu untuk mempersiapkan kandang dan kebun rumputnya. Sehingga pada saat ternak sampai di lokasi peternak telah siap baik kandang maupun kebun rumputnya.

3. Tahap Aplikasi

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa Program SIAP adalah suatu program dimana 133 orang pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok berinvestasi ternak sapi kepada petani peternak yang tergabung dalam Kelompok Petani Pengguna Inseminasi Buatan.

Sehubungan dengan pencetus ide program SIAP, Syamsurizal, SE, MM. (Mantan Asisten Ekbangkesra) mengatakan bahwa :

Kebijakan Program SIAP bersifat *topdown*, yang dicetuskan oleh Bupati Solok Periode 2005-2010 H.Gusmal, SE, MM pada rapat koordinasi pejabat eselon II dan Eselon III di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok pada tanggal 6 September 2006 dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati pada tanggal 28 Desember 2006.¹⁰⁶

Dengan demikian kekuatan politik sangat berperan untuk terlaksananya Program SIAP ini dimana pejabat eselon II dan eselon III diangkat dan

¹⁰⁶ Syamsurizal, SE.MM. Wawancara tanggal 28 Desember 2010 di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Solok.

diberhentikan oleh Bupati, oleh karena itu suka atau tidak suka pejabat eselon II dan eselon III harus bersedia ikut Program SIAP. Ini sesuai dengan salah satu tujuan program SIAP adalah meningkatkan peran serta pejabat pemerintah Kabupaten Solok berinvestasi dalam pembangunan ekonomi kerakyatan pada bidang peternakan, terutama dalam rangka membantu keluarga miskin.

Sumber dana untuk investasi dapat berasal dari tabungan pribadi pejabat ataupun berasal dari kredit perbankan pada bank yang ditunjuk. Pada tahap awal sumber dana investasi berasal dari kredit perbankan. Untuk kredit ini Pemerintah Daerah Kabupaten Solok melakukan kerjasama dengan Bank Nagari Cabang Solok. Para pejabat Eselon II dan Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok diberikan kredit oleh Bank Nagari Cabang Solok dengan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok. Salah satu bentuk fasilitasi Pemerintah Kabupaten Solok dalam hal ini adalah bahwa kredit program SIAP ini tidak menjadi faktor penghalang bagi pejabat eselon II dan eselon III untuk mendapatkan kredit lain. Karena pemerintah daerah memberikan jaminan bahwa kredit akan dibayarkan dengan tunjangan daerah pejabat eselon II dan eselon III.

Akad kredit dilaksanakan pada tanggal delapan Desember 2006 dengan plafon kredit sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) untuk pejabat Eselon III dan Rp.18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah) untuk pejabat eselon II dengan jangka waktu pinjaman selama 3 (tiga) tahun dan bunga 14% pertahun.

Untuk pengadaan Sapi Program SIAP ditunjuk Saudara Ainul Amri, SP. dengan Surat Bupati Solok Nomor : 500/456/XII/Perek-2006 tentang Penunjukan Rekanan untuk Pengadaan Sapi Program Kerjasama Investasi Pengembangan Pembibitan Sapi Potong Aparatur Pemda Kabupaten Solok. Harga sapi ditetapkan

sebesar Rp.5.800.000,- (Lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan spesifikasi sesuai dengan yang ditetapkan Panitia Pemeriksa dan Peneliti sebagai berikut :

1. Sapi betina;
2. Tinggi minimal 125 cm.
3. Jenis PO/Brahman/Simental
4. Sehat dan tidak luka.
5. Umur 2 sampai dengan 3 tahun.
6. Berasal dari luar propinsi Sumatera Barat.
7. Tidak majir, tidak bunting dan telah beranak satu.
8. Bebas penyakit brucellosis dan IBR yang dibuktikan dengan sertifikat dari pejabat yang berwenang di lokasi asal.
9. Tidak sapi liar.
10. Jaminan kesehatan dan kematian 14 hari.
11. Jaminan pemeliharaan 5%.
12. Harga sampai di kandang.¹⁰⁷

Namun pada tanggal 2 Januari 2007 rekanan meminta agar spesifikasi pada angka 7 diganti sehingga menjadi tidak majir, tidak bunting, dara/beranak satu. Hal ini terjadi karena rekanan kesulitan mendapatkan 153 ekor sapi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Anita Dewi mengungkapkan “dari 153 ekor sapi yang dibutuhkan pada tanggal 2 Januari 2007 rekanan hanya mampu menyediakan 9 ekor sapi.”¹⁰⁸

Walaupun sapi belum tersedia sesuai dengan kebutuhan, Program SIAP dilaunching pada tanggal 3 Januari 2007 di Lokasi KPP-IB Koto Saiyo Nagari Tanjung Alai Kecamatan X Koto Singkarak. Pada saat launching Bupati Solok dalam sambutannya menjelaskan :

Program SIAP ini lahir karena sapi merupakan salah satu komoditi unggulan di Kabupaten Solok dalam upaya meningkatkan ekonomi kerakyatan dengan pertimbangan antara lain :

1. Masyarakat telah familier dalam budidaya sapi;
2. Cukup tersedianya sumberdaya lokal untuk berusaha ternak sapi seperti rumput unggul, luasnya padang penggembala, melimpahnya limbah pertanian dan industri pertanian seperti dedak dan ampas tahu.

¹⁰⁷ Kesimpulan Rapat Pembahasan Pengadaan Sapi SIAP tanggal 15 Desember 2006.

¹⁰⁸ Anita Dewi, S.Pt, Wawancara tanggal 28 Desember 2010 di Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Solok.

3. Pesatnya perkembangan teknologi seperti telah banyaknya sapi unggul, teknologi embrio transfer.
4. Telah terbentuknya sentra pertumbuhan pembibitan ternak sapi di Arian dan peternak kelompok pelaksana IB (KPP-IB).
5. Permintaan terhadap ternak dan hasil ternak dari tahun ke tahun cukup meningkat yang ditunjang dengan pasar ternak Muara Panas dan Alahan Panjang serta tempat pemotongan hewan (TPH).
6. Tersedianya SDM yang berkualitas seperti inseminator, PKB petugas Sterilycontrol (SC), Asisten Teknis Reproduksi (ATR), Paramedis dan penyuluh yang ditunjang dengan 16 Pos IB dan 2 Pos Keswan.¹⁰⁹

Ternak sapi di Kabupaten Solok diusahakan dengan tujuan untuk menghasilkan sapi bakalan (breeding) dan daging melalui penggemukan (fattening) dimana pada kondisi akhir tahun 2005 jumlah populasinya mencapai 40.446 ekor dengan 19.222 rumah tangga pemeliharaan (RTP) atau skala usaha sebesar 2.1 ekor/RTP.¹¹⁰

Selama tahun 2005 usaha ternak sapi di Kabupaten Solok mampu memproduksi 881.284 ton daging dengan catatan mutasi ternak dan pemasukan dari luar daerah 6.127 ekor dan pengeluaran sebesar 2.157. Sedangkan kematian ternak sangat kecil yaitu sebesar 114 ekor atau 0.28% dari populasi akhir tahun 2005.¹¹¹

Selanjutnya Bupati Solok menjelaskan bahwa untuk mendukung pelaksanaan Program SIAP di Kabupaten Solok selama tahun 2006 telah dilakukan beberapa kegiatan dalam rangka pengembangan usaha ternak sapi di Kabupaten Solok. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain adalah :

1. Penyediaan sarana dan prasarana IB, sebanyak 5000 dosis;
2. Pengembangan hijauan makanan ternak (HMT) serta mutu pakan ternak melalui demplot-demplot HMT unggul, pembinaan dan pengawasan terhadap 20 kios pakan ternak di Kabupaten Solok.
3. Pengembangan dan pembinaan kawasan sentra produksi.

¹⁰⁹ Pidato Bupati Solok pada Acara Launching Program Sapi Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok tanggal 3 Januari 2007 di Gedung Solok Nan Indah.

¹¹⁰ Ibid.

¹¹¹ Ibid.

4. Pengembangan pusat pembibitan sapi potong dalam rangka mengatasi kebutuhan sapi sebagai bibit dan bakalan penggemukan yang bermutu yang selama ini masih banyak didatangkan dari luar daerah.
5. Pemeliharaan kesehatan hewan dan veteriner melalui pembinaan dan vaksinasi SE.
6. Pembinaan skala usaha, pengembangan dana bergulir, penguatan modal dan kemitraan usaha; serta
7. Pembinaan kelembagaan tani ternak melalui perbaikan sistem penyuluhan, pemberdayaan peternak dan rasionalisasi penyuluh/petugas peternakan.¹¹²

Karena rekanan belum menyediakan sapi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan panitia pemeriksa dan peneliti, pada tanggal 16 Januari 2007 dilaksanakan rapat pejabat Eselon II dan Eselon III dengan rekanan yang dipimpin oleh Asisten Ekbangkesra. Berdasarkan kesimpulan rapat tanggal 16 Januari 2007 tersebut diterbitkanlah Surat Bupati Solok Nomor: 500/52/I/Perek-2007 perihal Pembelian Sapi Program SIAP yang dialamatkan kepada pejabat eselon II dan Eselon III sebagai pemilik modal Program SIAP dengan isi sebagai berikut :

1. Rekanan pengadaan sapi Program SIAP tidak menyanggupi untuk menyediakan sapi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan, sehingga telah dilakukan pemutusan hubungan dengan pihak rekanan.
2. Untuk pembelian sapi selanjutnya, dilakukan langsung oleh pejabat dengan peternak, yang sebelumnya dilakukan pertemuan antara pejabat dengan peternak di lokasi masing-masing KPP-IB.
3. Pembelian sapi dilakukan sesegeranya setelah kredit direalisasikan pada rekening masing-masing aparatur.
4. Sapi yang dibeli adalah sapi betina dan yang cocok dengan program dengan kisaran harga minimal Rp.5.800.000,- (Lima juta delapan ratus ribu rupiah)

¹¹² Ibid.

dan batas waktu pembelian oleh pejabat bersama peternak paling lambat tanggal 30 Maret 2007.

Sehubungan dengan pengadaan sapi Program SIAP ini baik Peraturan Bupati Solok Nomor 43 Tahun 2006 tentang Program SIAP, Keputusan Panitia Pemeriksa dan Peneliti ataupun Surat Bupati Solok Nomor: 500/52/I/Perek-2007 perihal Pembelian Sapi Program SIAP lebih menekankan persyaratan pada harga maksimal sebesar Rp.7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) dan harga minimal sapi sebesar Rp.5.800.000,00 (Lima juta delapan ratus ribu rupiah). Menurut penulis, yang harus ditekankan adalah persyaratan teknis sapi bibit bukan harga. Seperti dikemukakan oleh Samsul Fikar dan Dadi Ruhyadi beberapa syarat indukan sapi betina penghasil pedet yang sehat adalah:

1. Induk betina minimum berumur 1,5-2 tahun dan maksimal berumur 5 tahun. Umur sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan perkawinan.
2. Bobot badan indukan impor yang berumur 1,5 tahun sekitar 350 kg/ekor atau lebih. Sementara itu, bobot badan indukan lokal sekitar 225-250 kg/ekor.
3. Kaki kokoh (tidak kecil atau kurus) dengan pijakan dan bentuk kaki normal-tidak membentuk huruf X atau O. Kondisi ini sangat penting bagi sapi betina karena dibutuhkan untuk menopang berat tubuhnya saat bunting.
4. Memiliki mata cerah, bulu yang bagus dan mengkilap, serta panggul yang besar
5. Bentuk ambing relatif besar, letaknya simetris dan memiliki puting sebanyak 4 buah
6. Kemiringan vulva tidak terlalu keatas
7. Ukuran rongga panggul (pelvis) sekitar 20-25 cm. Hal ini untuk memastikan kemudahan induk dalam proses melahirkan.
8. Jika sapi sudah pernah bunting, perhatikan jumlah anak yang telah dilahirkan dan pemeliharaan selama laktasi.
9. Kesehatan umum dan status nutrisi sapi betina baik. Keadaan kesehatan dan status nutrisi berpengaruh terhadap perkembangan embrio dan janin dalam tubuh induk. Dengan status nutrisi yang baik akan diperoleh pedet yang memenuhi standar bobot normal dan tidak tertular penyakit menular.
10. Tidak memiliki kelainan fisik dan penyakit menular.¹¹³

¹¹³ Samsul Fikar & Dadi Ruhyadi, Opcit, hal 64-65

Untuk keberhasilan program SIAP Dinas Perikanan dan Peternakan sebagai pengelola program mengusahakan terjalinnya ikatan batin antara pejabat dengan petani peternak calon penerima sapi Program SIAP. Oleh karena itu setelah launching program SIAP diadakan pertemuan antara pemilik modal dan peternak dengan jadwal dan pembina sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.13 berikut¹¹⁴

Tabel 4.13
Jadwal Pertemuan Pejabat dengan Peternak

NO.	NAMA KPP-IB	ALAMAT	TANGGAL	JAM	PEMBINA
1.	Kaloan Mas	Linawan Sulit Air	24-1-2007	10.00 WIB	Ir. Joko Purnomo, (Kabid. Penyuluhan Disnak Kab.Solok)
2.	Bungo Durian	Durian	24-1-2007	14.00 WIB	Ir. Zurni Asmar (Kabag TU Disnak Kab.Solok)
3.	Kampung Baru	Muaro Pingai	25-1-2007	10.00 WIB	Ir. Emri Nurdin (Kabid. Bina Usaha Disnak Kab. Solok)
4.	Tunas Jaya	Padang Belimbing	25-1-2007	14.00 WIB	Drh. Armon (Kabid. Kesehatan Hewan Disnak Kab.Solok)
5.	Koto Saiyo	Tanjung Alai	26-1-2007	09.00 WIB	Ir. Jumriadi (Kabid. Produksi Disnak Kabupaten Solok)
6.	Ranah Saiyo	Sumani	26-1-2007	14.00 WIB	Ir. Emri Nurdin (Kabid. Bina Usaha Disnak Kab. Solok)

Sumber data : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Solok

Ir. Emri Nurdin (Waktu awal Program Kepala Bidang Bina Usaha Dinas

Perikanan dan Peternakan) menjelaskan :

Pada waktu pertemuan pejabat dan peternak ini pula disosialisasikan Program SIAP kepada Peternak sedangkan Sosialisasi kepada para pejabat telah dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember 2006 dengan Narasumber Pimpinan Bank Nagari Cabang Solok yang menyampaikan materi tentang

¹¹⁴ Surat Bupati Solok Nomor : 500/53/I/Perek-2007, tanggal 19 Januari 2007 Perihal Pertemuan dengan Peternak Program SIAP.

SKIM Kredit bagi Aparatur untuk Pengadaan Sapi sedangkan penjelasan program disampaikan oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Solok.¹¹⁵

Sehubungan dengan pertemuan pejabat dengan peternak Zultani Pendamping KPP-IB Bungo Durian Nagari Arian memaparkan sebagai berikut : Setelah launching program SIAP, pada tanggal 24 sampai dengan 26 Januari 2007 memang diadakan pertemuan antara peternak dengan pejabat eselon II dan Eselon III di KPP-IB masing-masing. Namun dalam pertemuan ini sebagian besar pejabat tidak hadir.¹¹⁶

Di samping melakukan upaya mendekatkan hubungan pejabat dengan peternak Ir. Emri Nurdin Kepala Bidang Bina Usaha Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Solok menjelaskan bahwa:

Sebelum program ini dilaksanakan kepada peternak diberikan pelatihan tentang sapta usaha ternak sapi yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Solok selama 1 Hari di Kelompok dan 1 hari di UPTD Wilayah I. Selanjutnya Ir. Emri Nurdin menjelaskan bahwa apa yang diberikan selama pelatihan memang belum cukup untuk membuat peternak memahami bagaimana cara beternak yang baik dan menguntungkan peternak.¹¹⁷

Dengan demikian terlihat bahwa ikatan batin pejabat dengan peternak dan pembinaan yang diberikan kepada peternak sangat kurang. Oleh karena itu kita perlu mencermati apa yang dikemukakan oleh Sumadiningrat yang mencoba mengemukakan alternatif strategi pemberdayaan ekonomi rakyat dan melihatnya dari sisi upaya untuk penanggulangan kemiskinan yaitu :

Pertama, strategi pemberdayaan ekonomi rakyat modern yang telah maju lebih diarahkan kepada penciptaan iklim yang menunjang dan peluang untuk tetap maju dan pemberdayaan ekonomi rakyat tertinggal yang tidak hanya dengan meningkatkan produktifitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama dan memberikan suntikan modal, tapi juga harus

¹¹⁵ Emri Nurdin, wawancara 28 Desember 2010 di Dinas Pertanian Kabupaten Solok.

¹¹⁶ Zultani, wawancara tanggal 6 Januari 2011 di KPP-IB Bungo Durian Nagari Arian.

¹¹⁷ Ir. Emri Nurdin, Wawancara tanggal 28 Desember 2010 di Dinas Pertanian Kabupaten Solok

menjamin adanya kerjasama erat antara yang maju dengan yang tertinggal (kemitraan). *Kedua*, sehubungan dengan itu maka upaya pemberdayaan ekonomi rakyat perlu diprioritaskan pada penduduk miskin melalui antara lain peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan permodalan yang didukung sepenuhnya dengan pelatihan yang terintegrasi sejak kegiatan penghimpunan modal, penguasaan teknis produksi, pemasaran hasil, dan pengelolaan surplus usaha.¹¹⁸

Berpijak pada pendapat yang dikemukakan oleh Sumadiningrat tersebut, seharusnya dalam rangka meningkatkan sumberdaya manusia peternak Program SIAP perlu diberikan pelatihan teknis produksi ternak, pemasaran hasil dan pengelolaan surplus usaha. Dengan demikian diharapkan petani peternak mempunyai kemampuan berpikir yang lebih maju sehingga di samping mendapatkan manfaat berupa anak sapi peternak dapat menggunakan limbah sapi sebagai pupuk untuk menyuburkan tanah pertaniannya dan dapat meningkatkan pendapatannya atau mengolah dan menjualnya, sehingga membantu meningkatkan pendapatan peternak.

Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya program SIAP ini di Launching pada tanggal 3 Januari 2007. Sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2007 sapi yang telah diserahkan ke KPP-IB adalah sebanyak 29 ekor. Sebagaimana tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel 4.14
Jumlah Sapi yang Telah Diserahkan kepada Kelompok
per tanggal 6 Pebruari 2007

NO.	NAMA KPP-IB	NAGARI LOKASI	TARGET
1.	Kampung Baru	Muaro Pingai	11
2.	Kaloan Mas	Sulit Air	2
3.	Tunas Jaya	Koto Sani	-
4.	Koto Saiyo	Tanjung Alai	5
5.	Bunga Durian	Aripan	11
6.	Kapuah Sakato	Sumani	-
7.	Ranah Saiyo	Sumani	-
	Jumlah		29

Sumber Data : Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Solok.

¹¹⁸ Ibid. hal 18.

Menurut Anita Dewi S.Pt. “Hal ini mungkin disebabkan karena sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2007 tersebut, dana kredit dari Bank Nagari belum dicairkan, padahal akad kredit telah ditandatangani sejak tanggal delapan Desember 2006 sedangkan pencairan kredit dilakukan pada tanggal 7 Maret 2007”.¹¹⁹

Pembayaran kredit melalui pemotongan tambahan penghasilan PNS dilaksanakan mulai pada bulan April 2007. Walaupun kredit dicairkan pada tanggal 7 Maret 2007, kepada pejabat tetap dibebankan cicilan untuk bulan Januari, Pebruari, Maret 2007 dan langsung dipotong dari kredit yang dikucurkan.

Pada evaluasi tanggal 23 Maret 2007 realisasi pengadaan ternak sebanyak 102 ekor dari 153 ekor yang ditargetkan dan belum terlaksana sebanyak 51 ekor. Target pejabat pelaksana program 133 orang pejabat, yang telah melaksanakan 90 orang dan belum melaksanakan sebanyak 43 orang pejabat yang terdiri dari 8 orang pejabat eselon II dan 35 orang pejabat eselon III, dengan penempatan pada masing-masing KPP-IB sebagaimana tergambar pada tabel berikut ini.

Tabel 4.15
Rekapitulasi Target dan Realisasi Pengadaan Ternak Sapi pada
Kelompok Sasaran (KPP-IB) sampai dengan 23 Maret 2007

NO.	NAMA KPP-IB	NAGARI LOKASI	Jumlah Sapi Program (Ekor)		
			Target	Realisasi	Belum Masuk
1	2	3	4	5	6
1.	Kampung Baru	Muaro Pingai	26	23	3
2.	Kaloan Mas	Sulit Air	29	19	10
3.	Tunas Jaya	Koto Sani	22	5	17
4.	Koto Saiyo	Tanjung Alai	30	28	2

¹¹⁹ Anita Dewi, S.Pt., wawancara tanggal 28 Desember 2010 di Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Solok.

1	2	3	4	5	6
5.	Bungo Durian	Aripan	29	20	9
6.	Kapuah Sakato	Sumani	10	7	3
7.	Ranah Saiyo	Sumani	7	0	7
	Jumlah		153	102	51

Sumber data : Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Solok

Dalam pelaksanaannya Program SIAP tidak dilaksanakan pada KPP-IB Ranah Saiyo Sumani hal ini disebabkan pejabat yang ditujuk untuk menempatkan ternaknya pada KPP-IB tersebut tidak mau menempatkan ternaknya pada KPP-IB Ranah Saiyo Sumani, bahkan sebagian pejabat yang telah menempatkan ternaknya justru menarik kembali ternaknya dan memindahkannya ke tempat lain. Anita Dewi (Kasubag Administrasi Perekonomian Primer) mengungkapkan : “Hal ini terjadi disebabkan karena KPP-IB tersebut tidak mempunyai lahan yang cukup untuk penanaman kebun rumput dan kondisi sapi yang telah ada pada kelompok sebelumnya tidak terurus dengan baik.”¹²⁰

Dalam implementasi Program SIAP seharusnya hal ini tidak terjadi, karena sebelum ditetapkan sebagai KPP-IB Program SIAP, Tim Verifikasi Program SIAP telah melakukan verifikasi dengan turun langsung ke lapangan sesuai dengan jadwal sebagaimana tercantum pada tabel 4.9. Apalagi kalau dihubungkan dengan apa yang dikemukakan oleh Sutrisno dkk :

Bahwa kebutuhan lahan bagi pengembangan ternak ruminansia sangat dirasakan penting terutama sebagai sumber hijauan pakan. Akan tetapi kenyataan menunjukkan semakin padat jumlah penduduk, lahan yang tersisa untuk hijauan makanan ternak semakin menyempit. Akibat untuk daerah padat penduduk ternak lebih banyak tergantung pada limbah pertanian.¹²¹

¹²⁰ Anita Dewi, S.Pt., wawancara tanggal 28 Desember 2010 di Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Solok.

¹²¹ Ibid.

Kemudian menurut Ilyas peluang sumber-sumber pertumbuhan sub sektor peternakan antara lain didasarkan bahwa masih tersedianya lahan marginal dan lahan kering, padang alang-alang belukar dan rawa yang belum dimanfaatkan secara optimal. Potensi tersebut dapat dikembangkan untuk produksi dan pendapatan petani sub sektor peternakan.¹²²

Selanjutnya Ilyas menjelaskan penyebaran ternak tidak hanya untuk menambah populasi, tetapi merupakan upaya penyebaran atau pemerataan kepemilikan ternak kepada petani kecil, penyebaran kepemilikan diterapkan dapat memanfaatkan sumber pakan yang tersebar dan tenaga kerja sisa yang ada pada keluarga petani di pedesaan khususnya untuk ternak ruminansia, penyebaran ini sekaligus untuk mendorong pemanfaatan tenaga kerja dan kotoran ternak dalam usaha tani.¹²³

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka menurut penulis yang perlu dilakukan dalam hal ini adalah meningkatkan pembinaan dan menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan SDM peternak.

Pada evaluasi tanggal 9 Mei 2007 realisasi pengadaan ternak sebanyak 143 ekor dari 153 ekor yang ditargetkan dan belum terlaksana sebanyak 10 ekor. Target pejabat pelaksana program 133 orang pejabat, yang telah melaksanakan 125 orang dan belum melaksanakan sebanyak 8 orang pejabat yang terdiri dari 2 orang pejabat eselon II dan 6 orang pejabat eselon III, dengan penempatan pada masing-masing KPP-IB sebagaimana tergambar pada tabel berikut ini.

¹²² Ibid., hal.10.

¹²³ Ibid.

Tabel 4.16
Rekapitulasi Target dan Realisasi Pengadaan Ternak Sapi pada
Kelompok Sasaran (KPP-IB) sampai dengan 23 Mei 2007

NO.	NAMA KPP-IB	NAGARI LOKASI	Jumlah Sapi Program (Ekor)		
			Target	Realisasi	Belum Masuk
1.	Kampung Baru	Muaro Pingai	26	24	2
2.	Kaloan Mas	Sulit Air	29	21	8
3.	Tunas Jaya	Koto Sani	22	16	6
4.	Koto Saiyo	Tanjung Alai	30	29	1
5.	Bungo Durian	Aripan	29	22	7
6.	Kapuah Sakato	Sumani	10	5	5
7.	Diluar KPPIB UPTD Pernakan Wilayah I		7	26	+19
	Jumlah		153	143	10

Sumber data : Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Solok

Pada saat monitoring yang dilakukan oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Solok pada Bulan Juli 2007 ditemui kondisi di lapangan sebagai berikut : (1) peternak belum memelihara sapi dengan baik, (2) sapi yang telah 3 kali dilakukan IB belum menunjukkan kebuntingan, dan (3) tingkat kebuntingan sapi cukup rendah dimana service preconception (S/C) rata-rata hanya 4,2.¹²⁴ Oleh karena itu Bupati memerintahkan Kepala Dinas Peternakan agar melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk melakukan pembinaan secara terus-menerus terhadap para peternak sapi Program SIAP agar memberikan hasil yang optimal baik untuk peternak pemelihara maupun untuk pemilik.
2. Terhadap sapi yang telah 3 kali di IB namun belum menunjukkan tanda-tanda kebuntingan, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap kemajirannya, dan apabila sapi tersebut mandul sebaiknya dijual dan diganti dengan sapi yang baru dengan berkoordinasi dengan peternak dan pemilik sapi.¹²⁵

¹²⁴ Surat Bupati Solok Nomor : 500/560/VIII/Perek-2007 tanggal 8 Agustus 2007 perihal Pembinaan Sapi Program SIAP

¹²⁵ Ibid.

Setelah Program SIAP berjalan selama lebih kurang 7 bulan realisasi pengadaan sapi telah mencapai 150 ekor dan masih 3 (tiga) orang pejabat yang belum membelikan sapinya, dengan penyebaran penempatannya sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.17
Rekapitulasi Target dan Realisasi Pengadaan Ternak Sapi pada Kelompok Sasaran (KPP-IB) sampai dengan 26 September 2007

NO.	NAMA KPP-IB	NAGARI LOKASI	Jumlah Sapi Program (Ekor)		
			Target	Realisasi	Belum Masuk
1.	Kampung Baru	Muaro Pingai	26	24	2
2.	Kaloan Mas	Sulit Air	29	21	8
3.	Tunas Jaya	Koto Sani	22	15	7
4.	Koto Saiyo	Tanjung Alai	30	27	3
5.	Bungo Durian	Aripan	29	22	7
6.	Kapuah Sakato	Sumani	10	5	5
7.	Diluar KPPIB UPTD Pternakan Wilayah I		7	36	+29
	Jumlah		153	150	3

Sumber data : Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Solok

Kondisi sapi program SIAP sampai dengan 28 September 2007 adalah :

1. Jumlah sapi yang telah melahirkan 25 ekor.
2. Jumlah sapi positif bunting 33 ekor
3. Jumlah sapi yang di IB 63 ekor; dan
4. Jumlah sapi yang belum di IB 39 ekor.

Sehubungan dengan 39 ekor sapi yang belum di IB kondisi 28 September 2007 Ir. Zurni Asmar menjelaskan :

Hal ini disebabkan karena sapi dibeli oleh pejabat tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sehingga setelah hampir 7 bulan dipelihara

peternak, sapi belum berumur dua tahun, belum dewasa kelamin dan tidak menunjukkan tanda-tanda untuk di IB.¹²⁶

Pada tanggal 18 Pebruari 2008 Kepala Bagian Perekonomi melaporkan kepada Bupati bahwa 2 ekor sapi pejabat harus potong paksa karena kesulitan dalam melahirkan. Karena ketentuan tentang potong paksa belum diatur dalam Peraturan Bupati Solok Nomor 43 Tahun 2006, maka terhadap Peraturan Bupati tersebut dilakukan perubahan dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Solok Nomor 43 Tahun 2006 tentang Program Kerjasama Investasi Pengembangan Pembibitan Sapi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok sehingga menjadi :

1. Paket inseminasi buatan (IB) dan kesehatan hewan ditanggung oleh pemilik modal ditetapkan sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus limapuluh ribu rupiah) / ekor untuk tiga tahun pemeliharaan.
2. Untuk kelancaran dalam pelayanan dan administrasi pembayaran dana IB dan kesehatan hewan dititipkan pada Dinas Peternakan dengan Nomor Rekening 06.01.02.1000400-7 pada Bank Nagari Cabang Solok yang selanjutnya akan dipertanggungjawabkan penggunaannya kepada pejabat peserta Program Sapi Investasi Aparatur Pemerintah.
3. Pejabat Peserta Program Sapi Investasi Aparatur Pemerintah harus membayar biaya antisipasi kerugian sebesar Rp.350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/orang yang disimpan pada Rekening No.06.01.02.1000400-7 Bank Nagari Cabang Solok.
4. Spesifikasi Sapi. Untuk kerjasama pembibitan, spesifikasi sapi adalah sebagai berikut :
 - a. Sehat, tidak cacat dan layak untuk bibit;
 - b. Kelamin betina;
 - c. Jenis PO/Brahman/simental; dan
 - d. Berumur 2 sampai 3 tahun.
5. Untuk kelancaran pelaksanaan program kegiatan, baik dalam sosialisasi, monitoring dan pembinaan maka dialokasikan anggaran pada APBD Kabupaten Solok.
6. Resiko.
 - a. Jika ternak sapi yang dipelihara mati atau hilang karena kelalaian peternak maka peternak tersebut harus mengganti dengan jenis, umur dan kelamin yang sama paling lambat (satu) bulan sejak ternak tersebut mati atau hilang dan tetap memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian;
 - b. Apabila terjadi keadaan Force Majeure, termasuk kejadian wabah penyakit menular seperti antrax, SE, BSC dan PMK dan menyebabkan ternak yang dipelihara mati, maka kerugian yang ditimbulkan ditanggung bersama oleh semua pejabat peserta

¹²⁶ Ir. Zurni Asmar, Wawancara 28 Desember 2010 di Sekretariat Daerah Kabupaten Solok.

- program Sapi Investasi Aparatur Pemerintah melalui sistem tanggung renteng yang dibebankan pada biaya antisipasi kerugian.
- c. Apabila terjadi potong paksa karena melahirkan setelah dilakukan pertolongan oleh petugas teknis dan setelah mendapat persetujuan dari petugas teknis dapat dibantu melalui sistem tanggung renteng sebesar 50% dari selisih harga beli sapi dengan harga jual sapi dibebankan pada biaya antisipasi kerugian.
 - d. Kerugian akibat kematian anak sapi program Sapi Investasi Aparatur Pemerintah tidak ditanggung melalui sistem tanggung renteng.¹²⁷

Kondisi 150 ekor sapi SIAP pada tanggal 9 Mei 2008 sebagai berikut :

1. Telah mempunyai anak sebanyak 63 ekor.
2. Sapi yang sedang bunting 25 ekor.
3. Anak sapi sebanyak 54 ekor.
4. Sapi yang sudah di IB sebanyak 21 ekor.
5. Sedangkan sapi yang belum bunting sebanyak 35 ekor. Dari sapi yang belum bunting tersebut terdapat 17 ekor sapi yang tidak menunjukkan tanda-tanda kebuntingan walaupun sudah di IB beberapa kali ternyata sapi tersebut masih saja tidak bunting karena mengidap suatu penyakit yang disebut Hipofungsi Ovarium (Ovarium tidak normal).

Terhadap 17 ekor sapi yang tidak bunting karena penyakit Hipofungsi Ovarium Ir. Zurni Asmar mengungkapkan “kepada pejabat diminta agar segera mengganti sapi yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.”¹²⁸

Pada tanggal 8 Februari 2009 Kepala Bagian Perekonomian melaporkan kepada Bupati bahwa sapi salah seorang pejabat mati karena tympani, dan beberapa orang pejabat telah memindahkan sapi tanpa pemberitahuan secara tertulis kepada Dinas Perikanan dan Peternakan. Sehubungan dengan hal tersebut

¹²⁷ Peraturan Bupati Solok Nomor 7 Tahun 2008 tentang *Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 43 Tahun 2006 tentang Program Kerjasama Investasi Pengembangan Pembibitan Sapi Aparatur di Lingkungan Pemerintah kabupaten Solok.*

¹²⁸ Ir. Zurni Asmar, wawancara tanggal 28 Desember 2010 di Sekretariat Daerah Kabupaten Solok.

Kepala Bagian Perekonomian menyarankan kepada Bupati melakukan perubahan untuk kedua kalinya terhadap Peraturan Bupati Solok Nomor 43 Tahun 2006 dengan menambahkan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kematian sapi yang disebabkan penyakit tympani dapat dibantu melalui dana tanggung renteng sebesar 50% dari harga beli.
- b. Kematian sapi yang disebabkan oleh mal nutrisi tidak dapat dibantu dengan dana tanggung renteng.
- c. Peserta Program SIAP yang tidak melaporkan secara tertulis pemindahan atau penggantian sapi kepada Dinas Perikanan dan Peternakan, maka segala resiko menjadi tanggung jawab pemilik.

Dengan demikian maka Peraturan Bupati Solok Nomor 43 Tahun 2006 diubah dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Peraturan Bupati Solok Nomor 43 Tahun 2006 tentang Program Kerjasama Investasi Pengembangan Pembibitan Sapi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok ketentuan tentang resiko diubah sehingga menjadi :

- a. Jika ternak sapi yang dipelihara mati atau hilang karena kelalaian peternak maka peternak tersebut harus mengganti dengan jenis, umur dan kelamin yang sama paling lambat 1 (satu) bulan sejak ternak tersebut mati atau hilang dan tetap memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian.
- b. Apabila terjadi keadaan Force Majeure, termasuk kejadian wabah penyakit menular seperti antrax, SE. BSC dan PMK dan menyebabkan ternak yang dipelihara mati, maka kerugian yang ditimbulkan ditanggung bersama oleh semua pejabat peserta program Sapi Investasi Aparatur Pemerintah melalui sistem tanggung renteng yang dibebankan pada biaya antisipasi kerugian.
- c. Apabila terjadi potong paksa karena melahirkan setelah dilakukan pertolongan oleh petugas teknis dan setelah mendapat persetujuan dari petugas teknis dapat dibantu melalui sistem tanggung renteng sebesar 50% dari selisih harga beli sapi dengan harga jual sapi yang dibebankan pada biaya antisipasi kerugian.
- d. Apabila kematian sapi disebabkan oleh penyakit tympani dapat dibantu melalui sistem tanggung renteng sebesar 50% dari harga beli sapi yang dibebankan pada biaya antisipasi kerugian.
- e. Kerugian akibat kematian anak sapi program Investasi Aparatur Pemerintah tidak ditanggung melalui sistem tanggung renteng.

Bahkan Peraturan Bupati Solok Nomor 43 Tahun 2006 telah merumuskan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam Program SIAP, lokasi kegiatan, tahapan kegiatan, pola kerjasama, sistem pemeliharaan dan pengawasan.

Sehubungan dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 43 Tahun 2006 dapat penulis kemukakan sebagai berikut :

- a. Dalam perumusan hak peternak, peternak hanya diberi hak perseduaan sesuai dengan perjanjian. Dalam perjanjian yang dirumuskan hanya hak perseduaan apabila sapi telah mempunyai anak. Menurut penulis harus dirumuskan pula apa yang diperoleh peternak apabila ternak yang dipeliharanya belum mempunyai anak kemudian ternak dipindahkan oleh pemiliknya kepada orang lain atau dijual. Selain itu perlu juga diatur hak peternak untuk menolak apabila sapi yang diserahkan kepadanya tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan atau hak peternak untuk menolak jika waktu membeli sapi peternak tidak diikutsertakan.
- b. Pengaturan untuk Dinas Peternakan Kabupaten Solok sebagai pelaksana Program SIAP juga belum lengkap. Sehubungan dengan Pelaksana Program ini yang diatur hanya kewajibannya saja sedangkan hak dan wewenangnya tidak diatur. Menurut penulis Peraturan Bupati tersebut juga harus merumuskan wewenang pelaksana program antara lain wewenang pelaksana program untuk menolak sapi, apabila sapi yang dibeli pejabat tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan atau memerintahkan pemilik modal untuk mengembalikan sapi ke tempat awal apabila syarat-syarat pemindahan tidak terpenuhi.

- c. Peraturan Bupati juga tidak mengatur sanksi terhadap pihak-pihak yang tidak melaksanakan Program sesuai dengan apa-apa yang diatur dalam Peraturan Bupati Solok Nomor 43 Tahun 2006 dan perubahannya

Di samping kurang lengkap menurut penulis Peraturan Bupati Solok Nomor 43 Tahun 2006, juga mengatur hal-hal yang seharusnya tidak diatur dalam Peraturan Bupati tersebut antara lain :

- a. Organisasi program secara lengkap sebaiknya diatur dalam Keputusan Bupati saja.
- b. Hal-hal yang bersifat teknis seperti spesifikasi ternak, dan lokasi pelaksanaan kegiatan sebaiknya diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan.
- c. Tahap-tahap kegiatan sebaiknya diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan.

Dalam pelaksanaan Program SIAP tidak satupun lahir Keputusan Kepala Dinas Peternakan (Sekarang Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan). Sesuai dengan kebutuhan lapangan seharusnya Kepala Dinas Peternakan menerbitkan petunjuk teknis spesifikasi ternak yang akan dibeli, petunjuk teknis pembuatan kandang, syarat-syarat peternak yang dapat diikuti dalam program SIAP, petunjuk teknis bagi hasil, prosedur tetap apabila ternak harus di IB atau memerlukan tenaga kesehatan hewan apabila ternak mengalami sakit, prosedur tetap pembelian sapi, prosedur tetap potong paksa, prosedur tetap pengalihan pemelihara dan prosedur tetap penjualan ternak.

Kemudian program SIAP beserta Petunjuk Teknis dan Prosedur Tetap harus disosialisasikan kepada Pejabat Eselon II dan Eselon III di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Solok sebagai pemilik modal dan kepada peternak yang akan memelihara sapi pejabat ini. Aktivitas sosialisasi kebijakan tadi tidak sekadar menjabarkan sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang bersifat lebih operasional, tetapi juga diikuti dengan kegiatan yang mengomunikasikan kebijakan agar seluruh masyarakat (stakeholders) dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi arah, tujuan, sasaran (kelompok sasaran) kebijakan SIAP tadi. Kebijakan ini perlu dikomunikasikan atau disosialisasikan kepada mereka yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan. Agar mereka tidak saja menjadi tahu dan paham tentang apa yang menjadi arah, tujuan, dan sasaran kebijakan, tetapi yang lebih penting mereka akan dapat menerima, mendukung, dan bahkan mengamankan pelaksanaan kebijakan tadi. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya asal dilaksanakan saja dan tidak peduli peternak paham atau tidak.

Hal ini menyebabkan program belum dapat dilaaksanakan dengan baik. Senada dengan Anita Dewi, Ujianta Pendamping KPP-IB Kaloan Mas Sulit Air. Menyampaikan keluhannya bahwa perjalanan penyelesaian permasalahan yang terjadi di lapangan akan terlaksana sebagai berikut :

- a. Jika terjadi permasalahan di lapangan peternak/petugas pendamping melaporkannya kepada Dinas Perikanan dan Peternakan.
- b. Dinas Perikanan dan Peternakan membahas di tingkat Dinas, hasilnya dilaporkan kepada Bupati Cq. Asisten Ekbangesra.
- c. Bupati mengundang semua pihak yang terlibat dan membahas permasalahan-permasalahan dalam rapat.

d. Dari keputusan rapat dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2006 atau dikeluarkan surat.

Apabila prosedur tetap telah disusun, maka petugas pendamping bisa langsung mengambil sikap sesuai dengan prosedur tetap untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan.

Sehubungan dengan pembiayaan seharusnya ditetapkan dengan tegas komponen biaya yang dibebankan kepada APBD dan komponen biaya yang menjadi tanggung jawab pemilik modal (pejabat eselon II dan eselon III)). Komponen biaya yang dibebankan kepada APBD antara lain biaya pembinaan dan pengawasan, sedangkan komponen biaya yang dibebankan kepada pemilik modal yaitu biaya pembelian sapi, konsentrat, inseminasi buatan, obat-obatan dan vitamin.

Disamping itu pentahapan kegiatan yang kurang lengkap ditambah lagi dengan pelaksanaan hampir seluruh implementasi tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah disusun. Padahal jadwal pelaksanaan masing-masing kegiatan seharusnya dipertimbangkan sedemikian rupa sehingga tidak ada yang dipaksakan. Misalnya untuk penyusunan program, penyusunan petunjuk teknis dan protap Program SIAP harus diberikan waktu yang cukup, sehingga aturan itu lengkap dan telah mengatur semua hal yang perlu diatur sehingga tidak sering diubah dalam implementasi. Demikian juga jarak waktu antara sosialisasi kepada peternak dan pembelian sapi oleh pejabat dan peternak, harus dipertimbangkan sedemikian rupa sehingga peternak mempunyai cukup waktu untuk mempersiapkan kandang dan kebun rumputnya. Sehingga pada saat ternak sampai di lokasi peternak telah siap baik kandang maupun kebun rumputnya.

Seperti diungkapkan Syafrianto (Ketua KPP-IB Kaloan Mas Sulit Air)

Pada awal program sebenarnya secara umum peternak memang kurang siap karena tenggang waktu Sosialisasi Program kepada Peternak dengan waktu menyerahkan ternak kepada peternak terlalu pendek, dimana sosialisasi kepada peternak dilaksanakan pada bulan Januari dan pada bulan Januari itu juga telah dilakukan penyerahan ternak kepada sebagian peternak. Peternak tidak cukup waktu untuk menyiapkan kebun rumput. Sehingga dalam pelaksanaan ternak banyak ditempatkan pada KPP-IB Kaloan Mas Sulit Air yaitu sebanyak 29 ekor, KPP-IB Koto Saiyo Tanjung Alai sebanyak 30 dan KPP-IB Bungo Durian Aripin sebanyak 29 ekor karena kelompok-kelompok tersebut mempunyai lahan yang cukup untuk kebun rumput.¹³⁵

Dalam implementasi Program SIAP ditemukan bahwa sapi tidak jadi ditempatkan pada KPP-IB Ranah Saiyo Sumani, padahal sebelum ditetapkan sebagai KPP-IB sasaran Program SIAP Tim Teknis Dinas Peternakan telah melakukan verifikasi ke KPP-IB calon penerima Program SIAP. Jika tim teknis benar-benar telah melakukan verifikasi hal ini seharusnya tidak terjadi dalam implementasi Program SIAP ini.

Di samping itu banyak sapi yang dipindahkan oleh pemiliknya kepada peternak yang dikenalnya karena peternak tidak memelihara ternaknya dengan baik, sehingga kondisi tanggal 26 September 2007 sebanyak 36 ekor sapi dari 150 ekor sapi SIAP justru ditempatkan diluar KPP-IB UPTD Peternakan Wilayah I (meliputi wilayah Kecamatan X Koto Singkarak, Kecamatan X Koto Diatas dan Junjung Sirih). Terhadap temuan ini pendapat penulis sebagai berikut :

- a. Bahwa tujuan program SIAP antara lain adalah meningkatkan populasi sapi potong, meningkatkan pertumbuhan kawasan sentra produksi peternakan yang berwawasan agribisnis dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Keputusan Bupati Solok Nomor : 524-157-2008,

¹³⁵ Syafrianto, Wawancara tanggal 6 Januari 2011 di KPP-IB Kaloan Mas Sulit Air.

daerah yang merupakan kawasan sentra ternak sapi potong di Kabupaten Solok adalah Kecamatan X Koto Singkarak, Kecamatan Kubung, Kecamatan Lembang Jaya, Kecamatan Bukit Sundi, Kecamatan Gunung Talang, Kecamatan Hiliran Gumanti dan Kecamatan Lembah Gumanti, sedangkan untuk pelaksana Program SIAP ditunjuk KPP-IB yang berada di Kecamatan X Koto Singkarak, X Koto Diatas dan Junjung Sirih sehingga seharusnya kalau akan dipindahkan tetap diberikan kepada KPP-IB yang berada dalam wilayah Kecamatan X Koto Singkarak, X Koto Diatas dan Junjung Sirih. Agar dapat dilakukan pemindahan ke luar wilayah Kecamatan X Koto Singkarak, X Koto Diatas dan Junjung Sirih seharusnya dilakukan pula perubahan terhadap Peraturan Bupati Solok Nomor 43 Tahun 2006 .

- b. Agar sasaran Program SIAP untuk meningkatkan skala usaha tani ternak sapi bibit dan sapi potong menjadi skala ekonomis dapat tercapai pada masing-masing KPP-IB ditunjuk seorang pendamping dari Dinas Peternakan Kabupaten Solok. Tenaga Pendamping yang ditunjuk mempunyai tugas melakukan pengawasan sehari-hari di lapangan, melakukan pembinaan cara beternak sesuai dengan ketentuan teknis peternakan, dan memberikan pelayanan Inseminas Buatan (IB) dan kesehatan hewan. Sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya tenaga pendamping harus menyampaikan laporan setiap triwulan kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Solok. Jika petugas yang telah ditunjuk oleh Dinas Perikanan dan Peternakan telah menjalankan tugasnya, seharusnya pemindahan ternak dengan alasan ternaknya tidak dipelihara dengan baik tidak perlu terjadi.

Dwipa Ujianta, S.Pt. Pendamping KPP-IB Kaloan Mas Nagari Sulit Air mengeluhkan :

Bahwa dia ditunjuk sebagai pendamping pada KPP-IB Kaloan Mas Nagari Sulit Air dengan surat Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Solok, dalam surat tersebut tidak dijelaskan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya. Di samping itu dia tidak dibekali dengan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan protapnya, sehingga dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya apabila pejabat tiba-tiba memutuskan menarik atau memindahkan ternaknya ke tempat lain.¹³⁶

Menurut penulis penunjukan pendamping KPP-IB dilakukan dengan Keputusan Kepala Dinas dan dalam Keputusan Kepala Dinas tersebut langsung dirumuskan hak, wewenang dan tugas pendamping

- c. Dalam pencairan dana dan tata cara pembayaran kredit terlihat bahwa pejabat eselon II dan eselon III dirugikan. Pada awal programpun permasalahan dana ini sebenarnya telah terjadi, seperti diungkapkan Dra. Aspiorita MM :

Akad kredit dilaksanakan pada tanggal delapan Desember 2006. Kredit dicairkan pada tanggal 7 Maret 2007. Plafon kredit adalah Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) untuk pejabat Eselon III dan Rp.18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah) untuk pejabat eselon II. Jangka waktu pinjaman selama 3 (tiga) tahun dengan bunga 14% pertahun dan dicicil melalui tambahan penghasilan PNS. Kredit dianggap telah dikucurkan sejak tanggal akad kredit. Pembayaran kredit melalui pemotongan tambahan penghasilan PNS dilaksanakan mulai pada bulan April 2007, sedangkan cicilan bulan Januari, Pebruari, Maret 2007 dibebankan pada kredit. Jadi pejabat dibebani terhadap cicilan dan bunga, padahal uangnya belum diterima. Dengan demikian kebijakan ini menguntungkan bank dan merugikan pejabat.¹³⁷

Sehubungan dengan peralatan yang diperlukan maka untuk program sapi SIAP peralatan yang dibutuhkan antara lain kandang, tali, sabit dan kebun rumput. Pengadaan peralatan ini tentunya dibebankan kepada peternak. Namun baik

¹³⁶ Dwipa Ujianta, S.Pt., wawancara tanggal 5 Januari 2011 di KPP-IB Kaloan Mas Sulit Air.

¹³⁷ Dra. Aspiorita, MM. Wawancara, tanggal 28 Desember 2010 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok.

Peraturan Bupati Solok Nomor 43 Tahun 2006 maupun surat tidak ada yang mengatur hal ini.

Sehubungan dengan harga sapi kemudian ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Bupati Nomor : 500/52/I/Perek-2007 tanggal 19 Januari 2007 perihal Pembelian Sapi Program SIAP yang menetapkan sapi yang dibeli adalah sapi betina dan yang cocok dengan Program dengan kisaran harga minimal Rp.5.800.000,00 (Lima juta delapan ratus ribu rupiah). Seharusnya Peraturan Bupati tersebut menetapkan harga minimal, bukan harga maksimal. Sementara yang paling perlu ditegaskan sebenarnya adalah spesifikasinya bukan harganya.

Peraturan Bupati Solok No. 43 Tahun 2006, sejak lahir adalah tidak lengkap, sehingga dalam pelaksanaannya selama 3 tahun berjalannya Program SIAP telah mengalami tiga kali perubahan. Perubahan dilakukan untuk menjawab kepentingan pejabat sebagai penanam modal. Pada perubahan pertama yang dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2008 ditambahkan ketentuan yang berbunyi : “Apabila terjadi potong paksa karena melahirkan setelah dilakukan pertolongan oleh petugas teknis dan setelah mendapat persetujuan dari petugas teknis dapat dibantu melalui sistem tanggung renteng sebesar 50% dari selisih harga beli sapi dengan harga jual sapi yang dibebankan pada biaya antisipasi kerugian”. Latar belakang lahirnya ketentuan tersebut adalah karena sapi salah satu pejabat harus dipotong paksa pada saat melahirkan yang disebabkan anaknya terlalu besar dan tidak sesuai dengan badan induknya.

Perubahan kedua dilakukan pada tanggal 23 Pebruari 2009. Ketentuan yang ditambahkan pada perubahan kedua ini adalah : “Apabila kematian sapi yang disebabkan oleh penyakit tympani dapat dibantu melalui sistim tanggung renteng sebesar 50% dari harga beli sapi yang dibebankan pada biaya antisipasi program

dan peserta program SIAP yang tidak melaporkan secara tertulis pemindahan atau penggantian sapi kepada Dinas Perikanan dan Peternakan, maka segala resiko menjadi tanggungan pemilik. Hal ini dilakukan karena terjadi kematian sapi Program SIAP yang disebabkan penyakit tympani dan banyak pejabat yang memindahkan ternaknya tanpa memberitahukan kepada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Solok.

Sedangkan perubahan ketiga dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2009. Ketentuan yang ditambahkan dalam perubahan ini adalah "Kehilangan sapi Program SIAP yang bukan disebabkan kelalaian pemelihara dapat dibantu melalui sistem tanggung renteng sebesar 30% dari harga beli sapi yang dibebankan pada biaya antisipasi kerugian dan apabila terjadi kematian sapi disebabkan mal nutrisi tidak dapat dibantu dengan sistim tanggung renteng. Ketentuan ini lahir karena hilangnya 2 ekor sapi SIAP dan 1 ekor mati karena mal nutrisi.

Karena Peraturan Bupati Solok No. 43 Tahun 2006 mengatur plafon harga ternak maksimal Rp.7.000.000,00 pejabat pembeli ternak dengan kisaran harga antara Rp.4.500.000,00 sampai dengan Rp.8.700.000,00.

D. Pencapaian Program Kerjasama Investasi Pengembangan Pembibitan Sapi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok

Dalam Program SIAP ditetapkan target peningkatan populasi ternak sapi sebanyak 153 ekor dengan target pejabat pelaksana program sebanyak 133 orang pejabat yang terdiri dari 20 orang pejabat eselon II dan 113 orang pejabat eselon III. Sedangkan target penempatan sapi pada masing-masing Kelompok Sasaran adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 4.10.

Prakiraan dana yang dibutuhkan untuk kerjasama 1 ekor sapi yang perlu disediakan oleh pemilik modal (Pejabat Eselon II dan Eselon III) adalah sebesar Rp. 7.800.000,00 (Tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut : a. biaya pengadaan sapi Rp. 7.000.000,00, dana paket IB dan kesehatan hewan Rp.450.000,00 dan dana cadangan resiko Rp.350.000,00.¹³⁸

Dalam exposenya pada saat sosialisasi Program SIAP kepada pejabat eselon II dan eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepala Dinas Peternakan menyampaikan bahwa peningkatan populasi sapi melalui Program SIAP diproyeksikan sebagai berikut :

- Bila tingkat kelahiran pertahun (calfing rate) mencapai 70%, maka kontribusi program terhadap peningkatan populasi ternak sapi adalah sebesar 91 ekor setiap tahunnya.
- Sedangkan bila angka kelahiran mencapai 100% maka peningkatan populasi terjadi sebanyak 390 ekor pada akhir program
- Namun demikian diharapkan setiap 1 siklus program selesai maka pemilik modal maupun peternak masing-masing menerima keuntungan 1 ekor sapi.¹³⁹

Kondisi sapi SIAP keadaan 31 Maret 2009 diperoleh data sebagai berikut : jumlah induk awal 150 ekor, sapi yang telah beranak sebanyak 97 ekor, sedang bunting 10 ekor, sapi yang belum di IB sebanyak 15 ekor, sapi yang dijual/ditarik sebanyak 19 ekor dan sapi yang telah di IB dan belum di PKB sebanyak 17 ekor.

Dari Laporan Kepala Bagian Perekonomian tanggal 19 Nopember 2009 diperoleh data sebagai berikut : Jumlah induk awal 150 ekor, jumlah induk sekarang 102 ekor dan jumlah anak sekarang 70 ekor. Jumlah induk terdapat

¹³⁸ Expose Kepala Dinas Peternakan

¹³⁹ Expose Kepala Dinas Peternakan pada Acara Sosialisasi Program SIAP kepada Pejabat Eselon II dan Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok pada tanggal 11 Nopember 2006 di Operation Sekretariat Daerah Kabupaten Solok.

kekurangan sebanyak 48 ekor, yang disebabkan antara lain : pensiun dengan jumlah ternak 9 ekor, pindah tugas dengan jumlah ternak 2 ekor, dijual tidak dibeli kembali 23 ekor, tidak mempunyai jabatan lagi dan dijual 4 ekor, hilang 1 ekor induk dan satu ekor anak dan potong paksa belum dibeli kembali sebanyak 5 ekor.

Pada akhir Pogram SIAP diperoleh data sebagai berikut : Jumlah induk awal 150 ekor, jumlah induk sekarang 91 ekor dan jumlah anak sekarang 78 ekor. Jumlah induk terdapat kekurangan sebanyak 59 ekor, yang disebabkan antara lain : pensiun dengan jumlah ternak 9 ekor, pindah tugas dengan jumlah ternak 2 ekor, dijual tidak dibeli kembali 36 ekor, tidak mempunyai jabatan lagi dan dijual 4 ekor, hilang 2 ekor induk dan 2 ekor anak dan potong paksa belum dibeli kembali sebanyak 4 ekor.

Walaupun program SIAP belum mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan namun beberapa orang pejabat mengungkapkan bahwa mereka merasakan manfaat dari program SIAP. Hal ini antara lain diungkapkan Ir. Fathol Bahri, MSc. Eng

Ternaknya ditempatkan di KPP-IB Koto Saiyo Nagari Tanjung Alai dengan pemelihara Sdr. Anwar dan Sdr. Muknizon dimana karena melihat kondisi lapangan calon peternak yang mempunyai kandang, mempunyai lahan rumput yang cukup dan kondisi ternak sapi yang sedang dipelihara peternak terawat dengan baik beliau membeli sapi dengan harga masing-masing untuk Sdr. Anwar Rp.8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) jenis ternak simental dan untuk Muknizon Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan anak sebanyak 5 ekor selama 1 siklus program. Di samping pengadaan sapi melalui Program SIAP Ir. Fathol Bahri, MSc. Eng juga menyerahkan sapi yang

dibeli dengan simpanan pribadi sebanyak 3 ekor, yang dipelihara oleh peternak yang sama dan telah mendapatkan anak sebanyak 3 ekor.¹⁴⁰

Hal senada juga diungkapkan Dra. Aspiorita, MM., yang pada awal program sapinya ditempatkan di KPP-IB Kampung Baru Muaro Pingai.

Sapi dibeli dengan harga Rp.7.300.000,00, jenis simental, sepuluh bulan pemeliharaan telah didapatkan anak satu, namun karena terjadi kerusakan Muaro Pingai dan Saningbaka atas permintaan peternak, ternaknya dipindahkan ke Koto Baru. Dalam perkembangan berikutnya Dra. Aspiorita, MM., justru menambah 10 ekor induk sapi jenis simental dengan harga berkisar antara Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp.8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) yang dipelihara oleh peternak yang memang sudah dikenalnya.¹⁴¹

Muknizon, peternak (KPP-IB Koto Saiyo Tanjung Alai) yang memelihara sapi Ir. Fathol Bahri, MSc. Eng mengungkapkan

Bahwa sapi yang dipeliharanya sebanyak 3 ekor, selama satu siklus program telah melahirkan 5 ekor anak (Satu ekor induk dibeli dengan simpanan pribadi dan mendapatkan 2 anak selama satu siklus program).¹⁴²

Syamsurizal, SE.,MM. menjelaskan belajar dari kelemahan dalam implementasi Program SIAP Siklus Pertama, sebenarnya kita telah menyusun konsep pengembangan Program SIAP Siklus Kedua. Bentuk pengembangannya adalah dengan mengikutsertakan Pejabat Eselon IV dan Wali Nagari dalam Program SIAP. Jika program ini dilaksanakan diharapkan kita mampu meningkatkan populasi sapi di Kabupaten Solok 1500 (seribu lima ratus ekor) sapi dalam I Siklus Program.¹⁴³

¹⁴⁰ Ir. Fathol Bahri, wawancara tanggal 28 Desember 2010 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok.

¹⁴¹ Dra. Aspiorita, wawancara tanggal 28 Desember 2010 di Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Solok.

¹⁴² Muknizon, wawancara tanggal 6 Januari 2011 di KPP-IB Koto Saiyo Tanjung Alai.

¹⁴³ Syamsurizal, SE.,MM. Wawancara tanggal 28 Desember 2010 di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Solok.

E. Hambatan-hambatan dalam Implementasi Program Kerjasama Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok

Menurut Edward III dalam Joko Widodo faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi antara lain meliputi factor communication, resources, dispositions dan bureaucratic structure.¹⁴⁴

Berdasarkan pendapat Edward III, hambatan-hambatan dalam implementasi Program SIAP dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tahap Interpretasi Program

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya tahap interpretasi merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang masih bersifat teknis operasional. Kebijakan umum atau kebijakan strategis (strategic policy) akan dijabarkan ke dalam kebijakan manajerial (managerial policy) dan kebijakan manajerial akan dijabarkan dalam kebijakan teknis operasional (operational policy). Kebijakan umum atau kebijakan strategis diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah (perda) yang dibuat bersama antara lembaga legislatif (DPRD) dan lembaga eksekutif (pemerintah daerah). Kebijakan manajerial diwujudkan dalam bentuk keputusan-keputusan kepala daerah (peraturan bupati atau keputusan bupati) dan kebijakan teknis operasional diwujudkan dalam bentuk kebijakan kepala dinas, kepala badan atau kepala kantor sebagai unsur pelaksana teknis pemerintah daerah

Dari uraian pada bagian sebelumnya diketahui bahwa Program SIAP dilaksanakan berdasarkan Perbup Nomor 43 Tahun 2006 yang diubah sebanyak tiga kali yaitu Perbup No.7 Tahun 2008, Perbup No.11 Tahun 2009 dan terakhir dengan Perbup No.35 Tahun 2009, sebagai salah satu peraturan pelaksanaan dari

¹⁴⁴ Joko Widodo, op.cit, hal 96.

Perda Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang RPJP Daerah 2005 s/d 2025 dan Perda Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2005 tentang RPJM Daerah 2005 s/d 2010 yang kemudian diganti dengan Perda Nomor 3 Tahun 2008.

Dalam pelaksanaan Program SIAP ini tidak satupun diterbitkan Keputusan Bupati sebagai kebijakan manajerial dan Keputusan Kepala Dinas Peternakan sebagai kebijakan teknis operasional. Padahal banyak hal yang perlu dijabarkan lebih lanjut dari Perbup Nomor 43 Tahun 2006 tersebut yang diatur dengan Keputusan Bupati dan Keputusan Kepala Dinas. Hal-hal yang masih perlu diatur antara lain adalah spesifikasi ternak yang akan dibeli, teknis pembuatan kandang, syarat-syarat peternak yang dapat diikuti dalam program SIAP, petunjuk teknis bagi hasil, prosedur tetap apabila ternak harus di IB atau memerlukan tenaga kesehatan hewan apabila ternak mengalami sakit, prosedur tetap pembelian, prosedur tetap potong paksa, prosedur tetap pengalihan pemelihara dan prosedur tetap penjualan, syarat-syarat yang harus terpenuhi sehingga pemilik modal mempunyai hak memindahkan ternaknya atau syarat-syarat yang harus terpenuhi pemilik modal diizinkan menjual ternaknya.

Asisten Ekbangkesra selaku koordinator program dan Dinas Perikanan dan Peternakan sebagai pengelola Program SIAP menganggap Peraturan Bupati Solok Nomor 43 Tahun 2006 telah cukup sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program SIAP. Sehingga setiap persoalan yang terjadi dijawab dengan mengadakan rapat dan hasilnya ditampung dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Solok Nomor 43 Tahun 2006 atau mengeluarkan surat. Perubahan yang dilakukan terhadap Perbup Nomor 43 Tahun 2006 hanya menjawab kepentingan pejabat dan lupa memerhatikan kepentingan peternak. Seperti diungkapkan Zainun : “Pada saat sapi dipindahtangankan atau dijual peternak hanya diberikan uang seadanya.

Seharusnya hal ini juga diatur misalnya para pihak masing-masing mendapatkan 50% dari peningkatan nilai jual ternak”¹⁴⁵.

Di samping itu program ini juga belum tersosialisasikan dengan baik kepada peternak. Karena kegiatan sosialisasi hanya dilakukan kepada pejabat eselon II dan eselon III. Sosialisasi kepada peternak justru dilakukan setelah program di launching, sehingga pada saat serah terima sapi banyak peternak yang belum siap dengan rumputnya. Sebagaimana terungkap dalam wawancara dengan Syafrianto (Ketua KPP-IB Kaloan Mas Sulit Air).

Aktivitas sosialisasi kebijakan sebenarnya tidak sekadar menjabarkan sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang bersifat lebih operasional, tetapi juga diikuti dengan kegiatan yang mengomunikasikan kebijakan agar seluruh masyarakat (stakeholders) dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi arah, tujuan, sasaran (kelompok sasaran) kebijakan Program SIAP. Kebijakan ini perlu dikomunikasikan atau disosialisasikan kepada mereka yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan. Agar mereka tidak saja menjadi tahu dan paham tentang apa yang menjadi arah, tujuan, dan sasaran kebijakan, tetapi yang lebih penting mereka akan dapat menerima, mendukung, dan bahkan mengamankan pelaksanaan kebijakan tadi.

Program SIAP perlu disosialisasikan dengan baik kepada Dinas instansi terkait yang akan melakukan pembinaan dalam pelaksanaan program, Pejabat sebagai pemilik modal, peternak sebagai pemelihara ternak, pendamping yang akan mengawasi langsung pemeliharaan ternak dan wali nagari serta camat tempat Program SIAP dilaksanakan

¹⁴⁵ Zainun, wawancara tanggal 6 Januari 2011 di UPT Pembibitan Ternak Kabupaten Solok Arian.

2. Tahap Pengorganisasian

Tahap pengorganisasian ini lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentuan lembaga organisasi) mana yang akan melaksanakan, dan siapa pelakunya); penetapan anggaran (berapa besarnya anggaran yang diperlukan, dari mana sumbernya, bagaimana menggunakan dan mempertanggungjawabkan); penetapan prasarana dan sarana apa yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, penetapan tata kerja (juklak dan juknis); dan penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan termasuk penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan.

1) Pelaksana Kebijakan

Peraturan Bupati Solok Nomor 43 Tahun 2006 menetapkan bahwa pelaksana kebijakan dalam program SIAP adalah Dinas Instansi terkait di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok antara lain Asisten Ekbangkesra, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan, para pejabat eselon II dan Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok dan Peternakan.

Di samping itu untuk kesuksesan program sebagai pengawas sehari-hari di lapangan ditunjuk pendamping untuk masing-masing KPP-IB dengan Surat Kepala Dinas Peternakan. Surat tersebut tidak menjelaskan hak, wewenang dan tugas pendamping. Menurut penulis penunjukan pendamping KPP-IB dilakukan dengan Keputusan Kepala Dinas dan dalam Keputusan Kepala Dinas tersebut langsung dirumuskan hak wewenang dan tugas pendamping.

2) Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure)

Setiap melaksanakan kebijakan perlu ditetapkan Standard Operating Procedure (SOP) sebagai pedoman, petunjuk, tuntunan dan referensi bagi para pelaku kebijakan agar mereka mengetahui apa yang harus disiapkan dan lakukan, siapa sasarannya dan hasil apa yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu SOP dapat pula digunakan untuk mencegah timbulnya perbedaan dalam bersikap dan bertindak ketika dihadapkan pada permasalahan pada saat mereka melaksanakan kebijakan. Oleh karena itu setiap kebijakan yang dibuat perlu dibuat prosedur tetap (Protap) atau prosedur baku berupa standar prosedur operasi dan atau standar pelayanan minimal. Jadi jelas apabila peternak tidak memelihara ternak dengan baik apa yang dapat dilakukan oleh pemilik modal. Begitu pula apabila sapi harus di IB atau sakit kepada siapa peternak menyampaikannya.

3) Sumber Daya Keuangan dan Peralatan

Setelah ditetapkan siapa yang menjadi pelaku kebijakan dan standar prosedur operasi (SOP), langkah berikutnya perlu ditetapkan berapa besarnya anggaran dan darimana sumber anggaran tadi, serta peralatan apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kebijakan.

Untuk sapi Program SIAP ini tentunya harus ditetapkan komponen biaya yang dibebankan kepada APBD dan komponen biaya yang menjadi tanggung jawab pemilik modal (Pejabat Eselon II dan Eselon III).

Komponen biaya yang dibebankan kepada APBD antara lain biaya pembinaan dan pengawasan. Peraturan Bupati Solok Nomor 43 Tahun 2006 belum mengatur komponen biaya yang dapat dibebankan kepada APBD. Peraturan Bupati Solok Nomor 43 Tahun 2006 hanya mengatur komponen biaya

yang ditanggung pemilik modal yaitu harga sapi maksimal Rp.7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah), paket Inseminasi Buatan dan Kesehatan Hewan ditetapkan sebesar Rp.450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu perekor) dan biaya untukantisipasi kerugian secara tanggung renteng sebesar Rp.350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Sehubungan dengan harga sapi kemudian ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Bupati Nomor : 500/52/I/Perek-2007 tanggal 19 Januari 2007 perihal Pembelian Sapi Program SIAP yang menetapkan sapi yang dibeli adalah sapi betina dan yang cocok dengan Program dengan kisaran harga minimal Rp.5.800.000,00 (Lima juta delapan ratus ribu rupiah). Seharusnya Peraturan Bupati tersebut menetapkan harga minimal, bukan harga maksimal. Sementara yang paling perlu ditegaskan sebenarnya adalah spesifikasinya bukan harganya.

Pada awal program pun permasalahan dana ini sebenarnya telah terjadi, seperti diungkapkan Dra. Aspiorita MM :

Akad kredit dilaksanakan pada tanggal delapan Desember 2006. Kredit dicairkan pada tanggal 7 Maret 2007. Plafon kredit adalah Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) untuk pejabat Eselon III dan Rp.18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah) untuk pejabat eselon II. Jangka waktu pinjaman selama 3 (tiga) tahun dengan bunga 14% pertahun dan dicicil melalui tambahan penghasilan PNS. Kredit dianggap telah dikucurkan sejak tanggal akad kredit. Pembayaran kredit melalui pemotongan tambahan penghasilan PNS dilaksanakan mulai pada bulan April 2007, sedangkan cicilan bulan Januari, Pebruari, Maret 2007 dibebankan pada kredit. Jadi pejabat dibebani terhadap cicilan dan bunga, padahal uangnya belum diterima. Dengan demikian kebijakan ini menguntungkan bank dan merugikan pejabat.¹⁴⁶

Sehubungan dengan peralatan yang diperlukan maka untuk program sapi SIAP peralatan yang dibutuhkan antara lain kandang, tali, sabit dan kebun rumput. Pengadaan peralatan ini tentunya dibebankan kepada peternak. Namun baik

¹⁴⁶ Dra. Aspiorita, MM. Wawancara, tanggal 28 Desember 2010 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok.

Peraturan Bupati Solok Nomor 43 Tahun 2006 maupun surat tidak ada yang mengatur hal ini.

4) Penetapan Manajemen Pelaksanaan Kebijakan

Dalam program SIAP yang menjadi koordinator adalah Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, karena kebijakan Program SIAP ini melibatkan lebih dari satu perangkat daerah yaitu Dinas Perikanan dan Peternakan sebagai instansi teknis yang menangani teknis peternakannya dan Badan Pemberdayaan Masyarakat yang menangani aspek pemberdayaan masyarakatnya.

5) Penetapan Jadwal Kegiatan

Agar kinerja pelaksanaan kebijakan menjadi baik setidaknya dari “dimensi proses pelaksanaan kebijakan”, maka perlu ada penetapan jadwal pelaksanaan kebijakan. Jadwal pelaksanaan kebijakan tadi harus diikuti dan dipatuhi secara konsisten oleh para pelaku kebijakan. Jadwal pelaksanaan kebijakan ini penting, tidak saja dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan, tetapi sekaligus dapat dijadikan sebagai standar untuk menilai kinerja pelaksanaan kebijakan, terutama dilihat dari dimensi proses pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu setiap pelaksanaan kebijakan perlu ditegaskan dan disusun jadwal pelaksanaan kebijakan.

Dalam implementasi Program SIAP, disamping pentahapan kegiatan yang tidak lengkap jika dibandingkan dengan pentahapan kegiatan yang penulis susun sebagaimana terlihat pada bagian pengorganisasian pada bab dua, ditambah lagi dengan pelaksanaan hampir seluruh implementasi tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah disusun.

Padahal jadwal pelaksanaan masing-masing kegiatan seharusnya dipertimbangkan sedemikian rupa sehingga tidak ada yang dipaksakan. Misalnya

untuk penyusunan program, penyusunan petunjuk teknis dan protap Program SIAP harus diberikan waktu yang cukup, sehingga aturan itu lengkap dan telah mengatur semua hal yang perlu diatur sehingga tidak sering diubah dalam aplikasi.

Demikian juga jarak waktu antara sosialisasi kepada peternak dan pembelian sapi oleh pejabat dan peternak, harus dipertimbangkan sedemikian rupa sehingga peternak mempunyai cukup waktu untuk mempersiapkan kandang dan kebun rumputnya. Sehingga pada saat ternak sampai di lokasi peternak telah siap baik kandang maupun kebun rumputnya.

3. Tahap Aplikasi

Karena kelemahan implementasi program SIAP pada tahap interpretasi dan tahap pengorganisasian menimbulkan banyak persoalan pada tahap aplikasi. Sehingga pada akhir program, hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan proyeksi peningkatan populasi yang direncanakan pada awal program. Hal ini tergambar pada pemaparan interpretasi dan pengorganisasian.

Peraturan Bupati No. 43 Tahun 2006, sejak lahir adalah tidak lengkap, sehingga dalam pelaksanaannya selama 3 tahun berjalannya Program SIAP telah mengalami tiga kali perubahan. Perubahan dilakukan untuk menjawab kepentingan pejabat sebagai penanam modal. Pada perubahan pertama yang dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2008 ditambahkan ketentuan yang berbunyi : “Apabila terjadi potong paksa karena melahirkan setelah dilakukan pertolongan oleh petugas teknis dan setelah mendapat persetujuan dari petugas teknis dapat dibantu melalui sistem tanggung renteng sebesar 50% dari selisih harga beli sapi dengan harga jual sapi yang dibebankan pada biaya antisipasi kerugian”. Latar belakang lahirnya ketentuan tersebut adalah karena sapi salah satu pejabat harus

dipotong paksa pada saat melahirkan yang disebabkan anaknya terlalu besar dan tidak sesuai dengan badan induknya.

Perubahan kedua dilakukan pada tanggal 23 Pebruari 2009. Ketentuan yang ditambahkan pada perubahan kedua ini adalah : “Apabila kematian sapi yang disebabkan oleh penyakit tympani dapat dibantu melalui sistim tanggung renteng sebesar 50% dari harga beli sapi yang dibebankan pada biaya antisipasi program dan peserta program SIAP yang tidak melaporkan secara tertulis pemindahan atau penggantian sapi kepada Dinas Perikanan dan Peternakan, maka segala resiko menjadi tanggungan pemilik. Hal ini dilakukan karena terjadi kematian sapi Program SIAP yang disebabkan penyakit tympani dan banyak pejabat yang memindahkan ternaknya tanpa memberitahukan kepada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Solok.

Sedangkan perubahan ketiga dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2009. Ketentuan yang ditambahkan dalam perubahan ini adalah “Kehilangan sapi Program SIAP yang bukan disebabkan kelalaian pemelihara dapat dibantu melalui sistem tanggung renteng sebesar 30% dari harga beli sapi yang dibebankan pada biaya antisipasi kerugian dan apabila terjadi kematian sapi disebabkan mal nutrisi tidak dapat dibantu dengan sistim tanggung renteng. Ketentuan ini lahir karena hilangnya 2 ekor sapi SIAP dan 1 ekor mati karena mal nutrisi.

Karena Perbup No. 43 Tahun 2006 mengatur plafon harga ternak maksimal Rp.7.000.000,00 pejabat pembeli ternak dengan kisaran harga antara Rp.4.500.000,00 sampai dengan Rp.8.700.000,00.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dalam penelitian, apabila dilihat dari jenis sapi yang dibeli, harga pembelian dan jumlah anak serta persentase kelahiran anak dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.18
Harga Pembelian Sapi, Jumlah Anak dan Persentase Kelahiran anak

No	Jenis Sapi	Harga Pembelian	Jumlah Induk	Jml anak	% Kelahiran
1	2	3	4	5	6
1	Peranakan Ongole (PO)	< Rp. 5.800.000.-	38	21	55.26 %
		≥ Rp. 5.800.000.-	40	28	70.00 %
		Jumlah	78	49	62.82 %
2	Simental/Brahman	< Rp. 5.800.000.-	7	2	28.57 %
		≥ Rp. 5.800.000.-	65	28	43.08 %
		Jumlah	72	30	41.67 %
	Total		150	79	52,67 %

Sumber Data : Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Solok

Zultani (Pendamping KPP-IB Bungo Durian Nagari Arian) mengungkapkan pula bahwa permasalahan dalam aplikasi program SIAP antara lain disebabkan karena :

Berdasarkan petunjuk yang disampaikan dalam rapat pembahasan Program SIAP yang dijadikan kriteria penunjukan peternak adalah ketersediaan kandang yang memenuhi syarat dan ketersediaan hijauan makanan ternak (Rumput unggul) sesuai dengan populasi ternak yang sudah dipelihara dan yang akan dipelihara. Namun dalam pelaksanaannya kepada peternak tetap diberikan sapi Program SIAP untuk dipelihara asal kandangnya sudah ada walaupun belum ada ketersediaan hijauan makanan.¹⁴⁷

Dwipa Ujianta Pendamping kelompok Kaloan Mas Sulit Air menjelaskan bahwa kondisi ternak yang dibeli oleh peternak bersama pejabat pemilik modal pada Kelompok Kaloan Mas Sulit Air sebagian besar memenuhi syarat dengan kisaran harga Rp. 5.500.000,00 s/d Rp. 7.644.000,00. Kelompok ini dapat

¹⁴⁷ Zultani,, S.Pt. Wawancara tanggal 6 Januari 2011 di KPP-IB Bungo Durian Nagari Arian.

dikatakan agak baik melaksanakan program karena dari 21 ekor induk selama I siklus program melahirkan 15 ekor anak.

Sehubungan dengan Implementasi Program SIAP Anita Dewi, S.Pt. menjelaskan :

Terhadap ternak yang dibeli sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan tingkat keberhasilannya cukup tinggi, bahkan mencapai 70%. Kurang berhasilnya program ini justru disebabkan karena kurangnya kesungguhan pejabat dalam melaksanakan Program SIAP. Ini terlihat dari sapi yang dibeli tidak sesuai dengan spesifikasinya, setelah sapi diserahkan kepada peternak pemilik tidak pernah melihat untuk memonitor perkembangannya. Padahal disamping bertujuan membantu peternak Program SIAP ini juga mempunyai tujuan untuk mendekatkan atau menjalin hubungan kekeluargaan pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dengan masyarakat Kabupaten Solok, khususnya peternak sapi.¹⁴⁸

Selanjutnya Anita Dewi S.Pt menjelaskan “Di samping pemilik modal kurang bersungguh-sungguh, Dinas Perikanan dan Peternakan juga kurang serius mengelola program, karena dalam pembinaan dan pengawasan di lapangan hanya mengandalkan petugas yang ditunjuk sebagai pendamping di lapangan”.¹⁴⁹

¹⁴⁸ Anita Dewi, S.Pt., Wawancara tanggal 6 Januari 2011 di Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Solok.

¹⁴⁹ Ibid

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Implementasi Program SIAP belum sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh Joko Widodo, karena kenyataan yang ditemukan :

a. Tahap interpretasi program SIAP

Dalam interpretasi Program SIAP tidak diterbitkan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan sebagai kebijakan operasional program, di samping itu program belum tersosialisasikan dengan baik kepada seluruh pihak baik yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dengan program.

b. Tahap Pengorganisasian Program

Pihak-pihak yang terlibat dalam program berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor 43 Tahun 2006 tentang Program Kerjasama Investasi Pengembangan Pembibitan Sapi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok tidak jelas tugas, wewenang, hak dan kewajibannya, penjadwalan kegiatan belum diperhitungkan dengan matang. Di samping itu tidak ada satupun prosedur tetap yang dapat dipedomani oleh petugas pendamping untuk mengambil sikap dalam menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan. Apalagi petugas lapangan juga tidak mengetahui tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.

c. Tahap Aplikasi Program

Karena tahap interpretasi dan tahap pengorganisasian program belum dilaksanakan dengan baik, Program SIAP dalam aplikasinya belum mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan yang diproyeksikan pada awal program.

2. Hambatan-hambatan dalam implementasi Program SIAP adalah sebagai berikut :
- a. Peternak belum siap menerima Program, karena rentang waktu antara sosialisasi dengan penyerahan ternak terlalu dekat, sehingga ada ternak yang tidak jadi ditempatkan pada KPP-IB sasaran bahkan ada yang telah ditempatkan justru dipindahkan oleh pemiliknya.
 - b. Pejabat sebagai pemilik modal tidak sungguh-sungguh menjalankan program ini, bahwa pejabat eselon II dan eselon III terpaksa ikut Program SIAP. Ini terlihat dari sikap pejabat yang mengulur-ulur waktu pembelian ternak padahal kredit telah dicairkan. Hal ini diperburuk lagi dengan pembelian ternak tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan sehingga merugikan peternak. Di samping itu Dinas Perikanan dan Peternakan sebagai pengelola Program SIAP juga kurang sungguh-sungguh mengelola Program, ini terlihat dari sangat kurangnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan.

B. Saran

Dari uraian di atas penulis menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Solok bahwa Program SIAP ini sangat baik untuk dilanjutkan dan dikembangkan dalam rangka meningkatkan perekonomian petani peternak dan meningkatkan populasi ternak di Kabupaten Solok, dengan pembenahan dalam implementasinya yaitu melengkapi Program SIAP ini dengan Petunjuk Teknis, Petunjuk Pelaksanaan, Protap, SOP, mengatur dengan tegas hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam program dan meningkatkan pembinaan dan pengawasan implementasi Program SIAP ini pada masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif (Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora)*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2002.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, PT. Gramedia, Jakarta, 2004.
- Darlim Darmawi, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Usaha Pemeliharaan Ternak Sapi*, Thesis Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang, Padang, 2000.
- Expose Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Solok pada Acara Sosialisasi Program Kerjasama Investasi Pengembangan Pembibitan Sapi Potong Pejabat Eselon II dan III di Lingkup Pemerintah Kabupaten Solok, tanggal 26 Desember 2006.
- Faisal, Sanafiah, *"Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi"*, YA 3, Malang, 1990.
- Husaini Usman dan Purnomo Setya, *Metode Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003.
- Kaloh, J, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Kompas Com. <http://nasional.kompas.com/read/2009/11/09/05381056/Swasembada.Daging.Sapi.2014>
- Mas Roro Lilik Ekowati, *Perencanaan, Implementasi & Evaluasi Kebijakan atau Program*, Pustaka Cakra, Surakarta, 2009.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 1989.
- Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006 sampai Tahun 2010 yang diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2008.
- Pidato Bupati Solok pada Acara Launching Program Sapi Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok tanggal 3 Januari 2007 di Gedung Solok Nan Indah

Said. M. Said, *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2005.

Samsul Fikar dan Dadi Ruhyadi, *Beternak dan Bisnis Sapi Potong*, Agromedia Pustaka, Jakarta, 2010.

Soebani, Beni Ahmad, *Metode Penelitian*, CV. Pustaka Setia, Jakarta, 2008.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Widodo, Joko, 2006, "*Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*". Malang : Bayu Media Publishing



**KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS**
No. : 23 / H16.S2/ A/ 2010

Tentang

**PENGANGKATAN SUSUNAN KOMISI PEMBIMBING
PROGRAM MAGISTER (S2) PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDALAS**

ATAS NAMA : **Akmal Badri**
NO. BP : **0821202036**
PROGRAM STUDI : **POLOKDA**

**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS**

Membaca : Permohonan Pengesahan Susunan Komisi Pembimbing bagi : **Akmal Badri**

Menimbang : bahwa permohonan tersebut di atas dapat disetujui dan perlu ditetapkan dengan surat keputusan :

Mengingat : 1. Undang-undang No.8 Tahun 1974 jo Undang-Undang No.43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1990;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999;
4. Surat Keputusan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. Nomor 0429/0/1992;
b. Nomor 0196/0/1995
5. Surat Keputusan DIKTI No.361/DIKTI/Kep/1996;
6. Surat Keputusan Rektor Unand No. 710/XIA/A/Unand-2004

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Bagi mahasiswa yang bernama : **Akmal Badri** BP. **0821202036** adalah mahasiswa Program Magister (S2) Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang, Program Studi : **POLOKDA**

KEDUA : Mahasiswa tersebut di atas mempunyai Susunan Komisi Pembimbing Terdiri dari :

1. **Dr. Asmawi, MS** (Ketua)
2. **Dr. Ria Ariany** (Anggota)
3. (Anggota)

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sampai dengan selesainya masa studi yang bersangkutan dan sesuai dengan peraturan Universitas Andalas yang berlaku.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan diperbaiki kembali, jika kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : **Padang**
Pada Tanggal : **21 Januari 2010**



Prof. Dr. Ir. H. Novirman Jamarun, M.Sc
NIP. 130819552

Tembusan :

1. Ketua Komisi Pembimbing
2. Anggota Komisi Pembimbing
3. Ketua Program Studi **POLOKDA**
4. Mahasiswa Ybs.
5. Arsip.



BUPATI SOLOK

PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR : 43 BUP-2006

TENTANG

PROGRAM KERJASAMA INVESTASI PENGEMBANGAN PEMBIBITAN SAPI APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pencapaian Tiga Sasaran Utama Pembangunan di Daerah, khususnya pada Bidang Ekonomi Kerakyatan, Pemerintah Daerah perlu menetapkan program Kerjasama Investasi Pengembangan Pembibitan Sapi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok;
- b. bahwa program Kerjasama Investasi Pengembangan Pembibitan Sapi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok merupakan suatu terobosan Pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Kerjasama Investasi Pengembangan Pembibitan Sapi Aparat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro – Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 28);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006 – 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 29);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM KERJASAMA INVESTASI PENGEMBANGAN PEMBIBITAN SAPI APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

Pasal 1

Program Kerjasama Investasi Pengembangan Pembibitan Sapi Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok merupakan suatu kegiatan meningkatkan peran serta pejabat berinvestasi terhadap pembangunan ekonomi kerakyatan pada sub sektor peternakan terutama dalam rangka membantu keluarga miskin dan meningkatkan populasi di kawasan sentra produksi peternakan yang berbasis agrobisnis.

Pasal 2

Program Kerjasama Investasi Pengembangan Pembibitan Sapi Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok, sebagaimana dimaksud pasal 1 mengatur petunjuk teknis pelaksanaan program pola kerjasama, sistem pemeliharaan, pembinaan dan pengawasan

Pasal 3

Petunjuk Teknis Program Kerjasama Investasi Pengembangan Pembibitan Sapi Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- I. Pendahuluan.
- II. Pelaksanaan Program dan Lokasi Kegiatan.
- III. Bentuk Investasi dan Pola Kerjasama.
- IV. Sistem Pemeliharaan
- V. Pengawasan

Pasal 4

Hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Badan Perencana Pembangunan Daerah

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 20 - 12 - 2006

BUPATI SOLOK,

GUSMAL

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 20 - 12 - 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK

SUARMAN =

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2006 NOMOR 8

PETUNJUK TEKNIS

PROGRAM KERJA SAMA INVESTASI PENGEMBANGAN PEMBIBITAN SAPI
POTONG PEJABAT ESELON II DAN III KABUPATEN SOLOK

I. PENDAHULUAN

a. Latar belakang

Kabupaten Solok dengan luas 3.378 kilometer persegi memiliki keunggulan komparatif dalam bidang peternakan. Hal ini juga ditunjang dengan sosio kultur masyarakatnya yang sudah sejak lama dan terbiasa dalam usaha peternakan khususnya sapi potong. Namun demikian dari sejumlah potensi lahan yang dimiliki masih banyak tanah yang terlantar kurang produktif serta skala usaha yang belum ekonomis, sehingga pendapatannyapun juga belumlah memadai. Berdasarkan evaluasi pada umumnya potensi-potensi tersebut belum dapat diolah secara maksimal karena, keterbatasan dana / modal yang dimiliki masyarakat peternak.

Ternak sapi merupakan salah satu komoditi terbatas yang berperan dalam penyediaan daging dan protein hewani masyarakat. Lebih dari 70% daging konsumsi berasal dari ternak sapi. Kondisi usaha peternakan sapi potong di Kabupaten Solok saat ini belum lagi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap bibit dan bakalan sapi potong yang unggul, sedangkan kebutuhan daging konsumsi terus meningkat. Sampai saat ini sapi untuk bibit dan bakalan tersebut juga masih didatangkan dari luar daerah. Kondisi ini merupakan permasalahan sekaligus juga peluang dalam usaha peternakan sapi potong.

Memperhatikan potensi daerah, permasalahan, peluang dan tantangan kedepan, pemerintah Kabupaten Solok memfokuskan pembangunannya pada 3 sektor yang dikenal dengan (tiga) pilar pembangunan. Pembangunan Peternakan diharapkan mampu menunjang salah satu pilar yaitu **Ekonomi Kerakyatan**.

b. Tujuan

Program kerjasama Investasi pembangunan pembibitan sapi potong pejabat eselon II dan III Kabupaten Solok bertujuan untuk:

1. Meningkatkan populasi dan kapasitas produksi sapi potong.
2. Meningkatkan pertumbuhan kawasan sentra produksi peternakan yang berwawasan agribisnis.
3. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan peran serta pejabat Pemerintah Kabupaten Solok berinvestasi terhadap pembangunan ekonomi kerakyatan pada bidang peternakan terutama dalam rangka membantu keluarga miskin.

c. Sasaran

Sasaran Program Kerjasama Investasi Pengembangan Pembibitan Sapi potong Pejabat Eselon II dan III Kabupaten Solok adalah:

1. Meningkatnya investasi usaha di bidang peternakan.
2. Meningkatkan skala usaha tani ternak sapi bibit dan sapi potong menjadi skala ekonomis.
3. Terlaksananya pelayanan teknis dibidang peternakan secara baik dan tepat sasaran.
4. Menanamkan jiwa *entrepreneurship* (kewirausahaan) bagi pejabat eselon II dan III serta memotivasi masyarakat perantauan untuk menanamkan modal di kampung halaman.

II. PELAKSANAAN PROGRAM DAN LOKASI KEGIATAN

a. Organisasi Program

Sebagaimana diatur pada Keputusan Bupati Solok Nomor : /BUP-2006, tanggal tentang Struktur Organisasi Program Kerjasama Investasi Pengembangan Pembibitan Sapi Potong Pejabat Eselon II dan III Kabupaten Solok adalah:

1. Penasehat, adalah Bupati Solok.
2. Wakil Penasehat adalah Wakil Bupati Solok
3. Penanggung jawab Program, Sekretaris Daerah Kabupaten Solok.
4. Wakil Penanggung Jawab Program adalah :(1). Asisten EKbang Kesra;★
(2). Kepala BAPPEDA.*
5. Ketua pelaksana adalah Kepala Dinas Peternakan.✓
6. Anggota adalah:
 - Kepala KPM Kab. Solok ✓
 - Kabag Perekonomian pada Setda Kabupaten Solok.
 - Kepala Bank Nagari Cabang Solok
 - Kabid Ekonomi Bappeda Kabupaten Solok ✓
 - Kabid Produksi pada Dinas Peternakan Kabupaten Solok ✓
 - Kabid Keswan pada Dinas Peternakan Kabupaten Solok.✓
 - Kabid Penyuluhan Pada Dinas Peternakan Kabupaten Solok.✓
 - Kabid Bina Usaha pada Dinas Peternakan Kabupaten Solok.✓
 - Kabag TU pada Dinas Peternakan Kabupaten Solok. ✓
 - Camat setempat.
 - Kepala UPTD Peternakan setempat.
 - Wali Nagari setempat
 - Ketua kelompok KPPIB setempat

b. Hak dan Kewajiban dalam Kerjasama

1. Pemilik Modal

Pemilik modal adalah para pejabat Eselon II dan III di lingkup Pemerintah Kabupaten Solok.

Kewajiban pemilik modal:

- a. Menyediakan sapi betina produktif 2 (dua) ekor untuk Eselon II dan 1 (satu) ekor untuk Eselon III, yang sudah siap kawin dengan sumber dana dari dana simpanan sendiri maupun kredit dengan perbankan yang ditunjuk.
- b. Memonitor perkembangan sapi terhadap pemeliharaan ternak

Hak pemilik modal:

Menerima bagi hasil peseduan sesuai dengan perjanjian.

2. Peternak

Peternak adalah Peternak sapi potong dalam usaha pembibitan yang tergabung dalam suatu kelompok KPP-IB (Kelompok Peternak Pengguna Inseminasi Buatan) atau kelompok ternak lainnya yang telah direkomendasikan oleh dinas peternakan.

Syarat bagi peternak dalam program Kerjasama ini adalah:

- a. Terdaftar sebagai KK miskin.
- b. Memiliki pengalaman dalam usaha pembibitan sapi potong.
- c. Tidak sebagai penerima kredit dengan status yang macet.
- d. Menyediakan kandang dan hijauan pakan ternak.
- e. Bersedia mematuhi ketentuan sebagaimana maksud surat perjanjian kerjasama.

Peternak calon peserta diseleksi oleh Tim Seleksi bersama Dinas Peternakan kabupaten Solok dan selanjutnya ditentukan oleh pemilik modal.

Kewajiban Peternak :

- a. Menyediakan pakan dan memelihara sapi kerjasama dengan baik sesuai dengan petunjuk teknis.
- b. Memantau kondisi berahi sapi dan melaporkan kepada petugas IB (Inseminator) yang ditunjuk untuk dilaksanakan inseminasi.
- c. Melaporkan kepada Petugas Keswan Dinas Peternakan terhadap sapi yang sakit atau ditemui kejanggalan ternak di saat pemeliharaan.

Hak Peternak adalah :

Menerima bagi hasil peseduan sesuai dengan perjanjian.

3. Dinas Peternakan Kabupaten Solok

Dinas Peternakan berkewajiban dalam :

- a. Memfasilitasi kerjasama antara pemilik modal dengan kelompok peternak sebagai peserta.
- b. Memberikan pembinaan teknis dibidang peternakan kepada peternak peserta dan kelompoknya.
- c. Memonitoring dan evaluasi terhadap perkembangan ternak yang dipelihara,
- d. Memberikan pelayanan dibidang reproduksi : Inseminasi Buatan (IB), Pemeriksaan kebuntingan (PKB), Asisten Tekhnis reproduksi (ATR) dan sterility control (SC) dan kesehatan ternak sesuai dengan aturan yang berlaku.
- e. Memberikan laporan perkembangan Investasi kepada Bupati melalui Tim secara berkala.

c. Lokasi Kegiatan

Untuk memudahkan pembinaan dan pemantauan maka lokasi program diutamakan pada **Kelompok Peternak Pelaksana Inseminasi Buatan (KPPIB) dan kelompok tani ternak lainnya yang telah direkomendasikan** oleh Dinas peternakan yang berada pada kawasan sentra produksi peternakan maupun non sentra yang potensial untuk pengembangan usaha pembibitan sapi di Kabupaten Solok.

Untuk tahap pertama maka program ini direncanakan dilaksanakan pada UPTD Peternakan Wilayah I meliputi Kecamatan Junjung Sirih, X Koto Singkarak, dan X Koto Diatas.

III. BENTUK INVESTASI DAN POLA KERJASAMA

a. Tahapan Kegiatan

1. Sosialisasi program kepada pejabat Esselon II dan III. Untuk menyamakan persepsi program dilakukan sosialisasi terhadap seluruh pejabat eselon II dan III sebagai pemilik modal dan calon peternak oleh Bupati Solok.
2. Inventarisasi Pemilik modal dan calon peternak
Sedangkan penataan kepada kelompok ternak dilakukan guna mengetahui kemampuan / kapasitas para peternak untuk melakukan kerjasama baik dari aspek tekhnis (ketersediaan kandang, pakan dan pengalaman beternak) maupun catatan peternak dalam pengembalian kredit sebelumnya.
3. Sosialisasi dan pembekalan terhadap peternak.
Apabila calon lokasi dan kelompok telah ditetapkan maka dilakukan sosialisasi program dan pembekalan kepada calon peternak pelaksana yang telah dianggap layak. Sosialisasi dan pembekalan ini meliputi sistem kerjasama maupun tekhnis budidaya yang akan diterapkan.

4. Pengadaan Ternak

Pengadaan ternak dilaksanakan langsung oleh pemilik modal bersama peternak, yang didampingi oleh petugas peternakan dengan plafon harga maksimal Rp. 7.000.000 / ekor dengan spesifikasi sesuai dengan yang ditetapkan.

5. Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama

Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama dilakukan antara pemilik modal dengan peternak yang diketahui oleh ketua KPPIB, Wali Nagari, kepala UPTD Peternakan, Camat setempat dan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Solok an. Bupati Solok.

6. Pemeliharaan oleh peternak

Ternak sapi selanjutnya dipelihara oleh peternak dengan mengikuti petunjuk teknis yang telah diberikan. Peternak wajib memantau kesehatan dan kondisi berahi ternaknya dan segera melaporkannya kepada petugas IB / kesehatan yang ditunjuk bila sapiunya ingin kawin atau menunjukkan gangguan kesehatan.

7. Pembagian keuntungan.

Pembagian keuntungan dapat dilakukan apabila anak sapi yang lahir telah berumur minimal lepas sapih (6 bulan) dengan cara penilaian harga dan dibagi dua antara pemilik modal dan peternak.

b. Pola Kerjasama

- Paket inseminasi buatan (IB) dan kesehatan hewan ditanggung oleh pemilik modal (dalam perjanjian biaya pelayanan petugas IB dan kesehatan hewan ditanggung oleh pemilik modal) diperkirakan sebesar Rp. 450.000,-/ ekor untuk tiga tahun pemeliharaan.
- Untuk kelancaran dalam pelayanan dan administrasi pembayaran maka dana IB dan kesehatan hewan dititipkan pada Dinas Peternakan yang selanjutnya akan dipertanggung jawabkan penggunaannya.

• Spesifikasi Ternak

Untuk kerjasama pembibitan sapi adalah sebagai berikut :

1. Sehat dan tidak cacat dan layak untuk bibit
 2. Kelamin betina
 3. Jenis PO/ Brahman /Simental
 4. Umur 2 sampai 3 tahun
- Untuk kelancaran pelaksana program kegiatan, baik dalam sosialisasi, monitoring , dan pembinaan maka dialokasikan anggaran pada APBD Kabupaten Solok tahun 2007.
 - Resiko :
 - Jika ternak sapi yang dipelihara mati atau hilang karena kelalaian peternak maka peternak tersebut harus mengganti dengan jenis, umur dan kelamin yang sama selambatnya selama 1 bulan terhitung ternak tersebut mati dan tetap atau hilang dan tetap memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian.

- Jika karena suatu hal ternak yang dipelihara harus dipotong (potong paksa) maka harus dengan persetujuan petugas teknis berwenang.
- Keadaan Force Majeure
 - Apabila terjadi keadaan Force Majeure dan menyebabkan ternak yang dipelihara mati, maka kerugian yang ditimbulkan ditanggung bersama oleh semua pejabat melalui system tanggung renteng dimana setiap pejabat dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 350.000, untuk antisipasi kerugian yang diakibatkan oleh Force Majeure.

IV. SISTEM PEMELIHARAAN

Sistem pemeliharaan sapi bibit dengan mempedomani dan menerapkan teknologi pembibitan sapi potong secara IB, teknologi pemberian pakan bagi betina bibit dan teknologi pengendalian penyakit hewan sebagaimana yang dianjurkan oleh petugas peternakan.

V. PENGAWASAN

Pengawasan sehari – hari di lapangan pelayanan IB dan kesehatan hewan dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Dinas Peternakan Kabupaten Solok dan membuat serta menyampaikan laporan perkembangan kepada Dinas Peternakan Kabupaten Solok per Triwulan.

Arosuka, 28 Desember 2006
BURATI SOLOK,
GUSMAL





BUPATI SOLOK

PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR : 7 TAHUN-2008

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR 43 TAHUN 2006 TENTANG PROGRAM KERJASAMA INVESTASI PENGEMBANGAN PEMBIBITAN SAPI APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan program Sapi Investasi Aparatur Pemerintah telah ditetapkan Peraturan Bupati Solok Nomor 43 Tahun 2006 tentang Program Kerjasama Investasi Pengembangan Pembibitan Sapi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.
- b. bahwa demi kelancaran pelaksanaan program kerjasama investasi pengembangan pembibitan sapi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok di pandang perlu melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap lampiran Peraturan Bupati tersebut.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Solok Nomor 43 Tahun 2006 tentang Program Kerjasama Investasi Pengembangan Pembibitan Sapi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

KAMI BERTEKAD MENJADI KABUPATEN TERBAIK DARI YANG BAIK :

- ❖ Masyarakat Bangsa pada Usaha dan Daerahnya, Berkeadilan, Perbudhi Luhur dan Berdisiplin
- ❖ Perantau Bangsa pada Kanipung Halamannya
- ❖ Aparatur Bangsa dalam Pengabdianya

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro – Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 28);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006–2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 29);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006 Nomor 27);
17. Peraturan Bupati Solok Nomor 43 Tahun 2006 tentang Program Kerjasama Investasi Pengembangan Pembibitan Sapi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006 Nomor 8)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR 43 TAHUN 2006 TENTANG PROGRAM KERJASAMA INVESTASI PENGEMBANGAN PEMBIBITAN SAPI APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK.

Pasal I

Lampiran Peraturan Bupati Solok Nomor 43 Tahun 2007 tentang Program Kerjasama Investasi Pengembangan Pembibitan Sapi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Bab III poin b diubah sehingga berbunyi :

b. Pola Kerjasama

1. Paket inseminasi buatan (IB) dan kesehatan hewan ditanggung oleh pemilik modal ditetapkan sebesar Rp.450.000.-/ekor untuk tiga tahun pemeliharaan.
2. Untuk kelancaran dalam pelayanan dan administrasi pembayaran maka dana IB dan kesehatan hewan dititipkan pada Dinas Peternakan dengan Nomor Rekening 06.01.02.1000400-7 pada Bank Nagari Cabang Solok yang selanjutnya akan dipertanggungjawabkan penggunaannya kepada pejabat peserta Program Sapi Investasi Aparatur Pemerintah

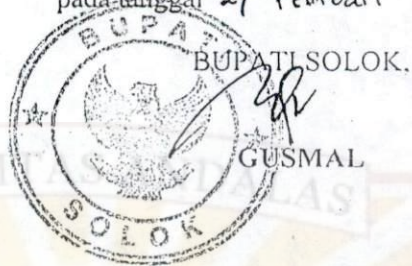
3. Pejabat Peserta Program Sapi Investasi Aparatur Pemerintah harus membayar biaya antisipasi kerugian sebesar Rp.350.000.-/orang yang disimpan pada Rekening 06.01.02.1000400-7 Bank Nagari Cabang Solok
4. Spesifikasi Sapi
Untuk kerjasama pembibitan, spesifikasi sapi adalah sebagai berikut :
 - a.) Sehat, tidak cacat dan layak untuk bibit;
 - b.) kelamin betina;
 - c.) jenis PO / brahman / simental; dan
 - d.) berumur 2 sampai 3 tahun
5. Untuk kelancaran pelaksanaan program kegiatan, baik dalam sosialisasi, monitoring dan pembinaan maka dialokasikan anggaran pada APBD Kabupaten Solok.
6. Resiko :
 - a.) Jika ternak sapi yang dipelihara mati atau hilang karena kelalaian peternak maka peternak tersebut harus mengganti dengan jenis, umur dan kelamin yang sama paling lambat 1 (satu) bulan sejak ternak tersebut mati atau hilang dan tetap memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian;
 - b.) Apabila terjadi keadaan Force Majeure, termasuk kejadian wabah penyakit menular seperti antrax, SE, BSC dan PMK dan menyebabkan ternak yang dipelihara mati, maka kerugian yang ditimbulkan ditanggung bersama oleh semua pejabat peserta program Sapi Investasi Aparatur Pemerintah melalui sistem tanggung renteng yang dibebankan pada biaya antisipasi kerugian.
 - c.) Apabila terjadi potong paksa karena melahirkan setelah dilakukan pertolongan oleh petugas teknis dan setelah mendapat persetujuan dari petugas teknis dapat dibantu melalui system tanggung renteng sebesar 50 % dari selisih harga beli sapi dengan harga jual sapi dibebankan pada biaya antisipasi kerugian.
 - d.) Kerugian akibat kematian anak sapi program Sapi Investasi Aparatur Pemerintah tidak ditanggung melalui system tanggung renteng

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 27 Februari 2008



Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 27 Februari 2008



BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2008 NOMOR ...7.....





BUPATI SOLOK

PERATURAN BUPATI SOLOK

NOMOR : II TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 43/BUP-2006 TENTANG PROGRAM KERJASAMA INVESTASI
PENGEMBANGAN PEMBIBITAN SAPI APARATUR DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan program Sapi Investasi Aparatur Pemerintah telah ditetapkan Peraturan Bupati Solok Nomor 43/BUP-2006 tentang Program Kerjasama Investasi Pengembangan Pembibitan Sapi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 7 Tahun 2008.
 - b. bahwa demi kelancaran pelaksanaan program kerjasama investasi pengembangan pembibitan sapi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok di pandang perlu melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap lampiran Peraturan Bupati tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Peraturan Bupati Solok Nomor 43/BUP-2006 tentang Program Kerjasama Investasi Pengembangan Pembibitan Sapi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);

KAMI BERTEKAD MENJADI KABUPATEN TERBAIK DARI YANG BAIK :

- ❖ Masyarakat Bangga perle Usaha dan Daerahnya, Bertakwa, Berbudhi Luhur dan Berdisiplin
- ❖ Perantau Bangga pada Kampung Halamannya
- ❖ Aparatur Bangga dalam Pengabdianya

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 28);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 29);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006 Nomor 27);
17. Peraturan Bupati Solok Nomor 43/BUP- 2006 tentang Program Kerjasama Investasi Pengembangan Pembibitan Sapi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006 Nomor 8); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Solok Nomor 43/BUP-2006 tentang Program Kerjasama Investasi Pengembangan Pembibitan Sapi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2008 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR 43 TAHUN 2006 TENTANG PROGRAM KERJASAMA INVESTASI PENGEMBANGAN PEMBIBITAN SAPI APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK.

Pasal I

Ketentuan Bab III Huruf b angka 6 dalam Lampiran Peraturan Bupati Solok Nomor 43/BUP-2006 tentang Program Kerjasama Investasi Pengembangan Pembibitan Sapi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Solok Nomor 43/BUP-2006 tentang Program Kerjasama Investasi Pengembangan Pembibitan Sapi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2008 Nomor 7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

6. Resiko :

- a.) Jika ternak sapi yang dipelihara mati atau hilang karena kelalaian peternak maka peternak tersebut harus mengganti dengan jenis, umur dan kelamin yang sama paling lambat 1 (satu) bulan sejak ternak tersebut mati atau hilang dan tetap memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian.
- b.) Apabila terjadi keadaan Force Majeure, termasuk kejadian wabah penyakit menular seperti antrax, SE. BSC dan PMK dan menyebabkan ternak yang dipelihara mati, maka kerugian yang ditimbulkan ditanggung bersama oleh semua pejabat peserta program Sapi Investasi Aparatur Pemerintah melalui sistem tanggung renteng yang dibebankan pada biaya antisipasi kerugian.
- c.) Apabila terjadi potong paksa karena melahirkan setelah dilakukan pertolongan oleh petugas teknis dan setelah mendapat persetujuan dari petugas teknis dapat dibantu melalui sistem tanggung renteng sebesar 50 % dari selisih harga beli sapi dengan harga jual sapi dibebankan pada biaya antisipasi kerugian.

- d.) Apabila akibat kematian sapi yang disebabkan oleh penyakit Tympani dapat dibantu melalui sistim tanggung renteng sebesar 50 % dari harga beli sapi yang dibebankan pada biaya antisipasi kerugian
- e.) Kerugian akibat kematian anak sapi program Sapi Investasi Aparatur Pemerintah tidak ditanggung melalui sistem tanggung renteng.
- f.) Apabila terjadi kematian sapi disebabkan oleh mal nutrisi tidak dapat dibantu dengan sistim tanggung renteng.
- g.) Peserta program SIAP yang tidak melaporkan secara tertulis pemindahan atau penggantian sapi kepada Dinas Perikanan dan Peternakan, maka segala resiko menjadi tanggungan pemilik.

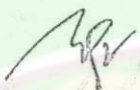
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 23 Februari 2009

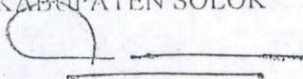
BUPATI SOLOK,



GUSMAL

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 23 Februari 2009.

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN SOLOK



ASRIZAL



BUPATI SOLOK

PERATURAN BUPATI SOLOK

NOMOR : 35 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 43/BUP- 2006 TENTANG PROGRAM KERJASAMA INVESTASI
PENGEMBANGAN PEMBIBITAN SAPI APARATUR DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan program Sapi Investasi Aparatur Pemerintah telah ditetapkan Peraturan Bupati Solok Nomor 43/BUP-2006 tentang Program Kerjasama Investasi Pengembangan Pembibitan Sapi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 11 Tahun 2009;
 - b. bahwa demi kelancaran pelaksanaan program kerjasama investasi pengembangan pembibitan sapi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok di pandang perlu melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap Lampiran Peraturan Bupati tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Peraturan Bupati Solok Nomor 43/BUP-2006 tentang Program Kerjasama Investasi Pengembangan Pembibitan Sapi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 28);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2008 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006 Nomor 27);

17. Peraturan Bupati Solok Nomor 43/BUP- 2006 tentang Program Kerjasama Investasi Pengembangan Pembibitan Sapi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali berakhir dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Peraturan Bupati Solok Nomor 43/BUP-2006 tentang Program Kerjasama Investasi Pengembangan Pembibitan Sapi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2008 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR 43/BUP-2006 TENTANG PROGRAM KERJASAMA INVESTASI PENGEMBANGAN PEMBIBITAN SAPI APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK.

Pasal I

Ketentuan Bab III Huruf b angka 6 dalam Lampiran Peraturan Bupati Solok Nomor 43/BUP-2006 tentang Program Kerjasama Investasi Pengembangan Pembibitan Sapi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Peraturan Bupati Solok Nomor 43/BUP-2006 tentang Program Kerjasama Investasi Pengembangan Pembibitan Sapi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2009 Nomor 11) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

6. Resiko :

- a.) Jika ternak sapi yang dipelihara mati atau hilang karena kelalaian peternak maka peternak tersebut harus mengganti dengan jenis, umur dan kelamin yang sama paling lambat 1 (satu) bulan sejak ternak tersebut mati atau hilang dan memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian, yang selanjutnya dibunyikan dalam perjanjian.

- b.) Apabila terjadi keadaan Force Majeure, termasuk kejadian wabah penyakit menular seperti antrax, SE, BSC dan PMK dan menyebabkan ternak yang dipelihara mati, maka kerugian yang ditimbulkan ditanggung bersama oleh semua pejabat peserta program Sapi Investasi Aparatur Pemerintah melalui sistem tanggung renteng yang dibebankan pada biaya antisipasi kerugian.
- c.) Apabila terjadi potong paksa karena melahirkan setelah dilakukan pertolongan oleh petugas teknis dan setelah mendapat persetujuan dari petugas teknis dapat dibantu melalui sistem tanggung renteng sebesar 50 % dari selisih harga beli sapi dengan harga jual sapi dibebankan pada biaya antisipasi kerugian.
- d.) Apabila akibat kematian sapi yang disebabkan oleh penyakit Tympani dapat dibantu melalui sistem tanggung renteng sebesar 50 % dari harga beli sapi yang dibebankan pada biaya antisipasi kerugian.
- e.) Kehilangan sapi Program Sapi Investasi Aparatur Pemerintah yang bukan disebabkan kelalaian pemelihara dapat dibantu melalui sistem tanggung renteng sebesar 30 % dari harga beli sapi yang dibebankan pada biaya antisipasi kerugian.
- f.) Kehilangan anak sapi program Sapi Investasi Aparatur Pemerintah tidak ditanggung melalui sistem tanggung renteng.
- g.) Kerugian akibat kematian anak sapi program Sapi Investasi Aparatur Pemerintah tidak ditanggung melalui sistem tanggung renteng.
- h.) Apabila terjadi kematian sapi disebabkan oleh mal nutrisi tidak dapat dibantu dengan sistem tanggung renteng.
- i.) Peserta program Sapi Investasi Aparatur Pemerintah yang tidak melaporkan secara tertulis pemindahan atau penggantian sapi kepada Dinas Perikanan dan Peternakan, maka segala resiko menjadi tanggungan pemilik.

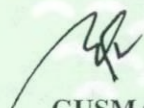
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

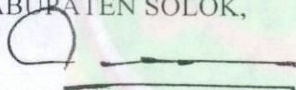
Ditetapkan di Arosuka.
pada tanggal 19 Agustus 2009

BUPATI SOLOK,


GUSMAL

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 19 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,



ASRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2009 NOMOR.....³⁵



BUPATI SOLOK

PERATURAN BUPATI SOLOK

NOMOR : 35 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 43/BUP- 2006 TENTANG PROGRAM KERJASAMA INVESTASI
PENGEMBANGAN PEMBIBITAN SAPI APARATUR DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan program Sapi Investasi Aparatur Pemerintah telah ditetapkan Peraturan Bupati Solok Nomor 43/BUP-2006 tentang Program Kerjasama Investasi Pengembangan Pembibitan Sapi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 11 Tahun 2009;
 - b. bahwa demi kelancaran pelaksanaan program kerjasama investasi pengembangan pembibitan sapi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok di pandang perlu melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap Lampiran Peraturan Bupati tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Peraturan Bupati Solok Nomor 43/BUP-2006 tentang Program Kerjasama Investasi Pengembangan Pembibitan Sapi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 28);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2008 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006 Nomor 27);

17. Peraturan Bupati Solok Nomor 43/BUP- 2006 tentang Program Kerjasama Investasi Pengembangan Pembibitan Sapi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali berakhir dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Peraturan Bupati Solok Nomor 43/BUP-2006 tentang Program Kerjasama Investasi Pengembangan Pembibitan Sapi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2008 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR 43/BUP-2006 TENTANG PROGRAM KERJASAMA INVESTASI PENGEMBANGAN PEMBIBITAN SAPI APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK.

Pasal I

Ketentuan Bab III Huruf b angka 6 dalam Lampiran Peraturan Bupati Solok Nomor 43/BUP-2006 tentang Program Kerjasama Investasi Pengembangan Pembibitan Sapi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Peraturan Bupati Solok Nomor 43/BUP-2006 tentang Program Kerjasama Investasi Pengembangan Pembibitan Sapi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2009 Nomor 11) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

6. Resiko :

- a.) Jika ternak sapi yang dipelihara mati atau hilang karena kelalaian peternak maka peternak tersebut harus mengganti dengan jenis, umur dan kelamin yang sama paling lambat 1 (satu) bulan sejak ternak tersebut mati atau hilang dan memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian, yang selanjutnya dibunyikan dalam perjanjian.

- b.) Apabila terjadi keadaan Force Majeure, termasuk kejadian wabah penyakit menular seperti antrax, SE, BSC dan PMK dan menyebabkan ternak yang dipelihara mati, maka kerugian yang ditimbulkan ditanggung bersama oleh semua pejabat peserta program Sapi Investasi Aparatur Pemerintah melalui sistem tanggung renteng yang dibebankan pada biaya antisipasi kerugian.
- c.) Apabila terjadi potong paksa karena melahirkan setelah dilakukan pertolongan oleh petugas teknis dan setelah mendapat persetujuan dari petugas teknis dapat dibantu melalui sistem tanggung renteng sebesar 50 % dari selisih harga beli sapi dengan harga jual sapi dibebankan pada biaya antisipasi kerugian.
- d.) Apabila akibat kematian sapi yang disebabkan oleh penyakit Tympani dapat dibantu melalui sistem tanggung renteng sebesar 50 % dari harga beli sapi yang dibebankan pada biaya antisipasi kerugian.
- e.) Kehilangan sapi Program Sapi Investasi Aparatur Pemerintah yang bukan disebabkan kelalaian pemelihara dapat dibantu melalui sistem tanggung renteng sebesar 30 % dari harga beli sapi yang dibebankan pada biaya antisipasi kerugian.
- f.) Kehilangan anak sapi program Sapi Investasi Aparatur Pemerintah tidak ditanggung melalui sistem tanggung renteng.
- g.) Kerugian akibat kematian anak sapi program Sapi Investasi Aparatur Pemerintah tidak ditanggung melalui sistem tanggung renteng.
- h.) Apabila terjadi kematian sapi disebabkan oleh mal nutrisi tidak dapat dibantu dengan sistem tanggung renteng.
- i.) Peserta program Sapi Investasi Aparatur Pemerintah yang tidak melaporkan secara tertulis pemindahan atau penggantian sapi kepada Dinas Perikanan dan Peternakan, maka segala resiko menjadi tanggungan pemilik.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka.
pada tanggal 19 Agustus 2009

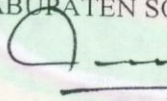
BUPATI SOLOK


GUSMAL



Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 19 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK


ASRIZAL



BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2009 NOMOR...35...



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Jl. Raya Kayu Aro - Sukarami Solok Telp (0755) 31147

Nomor : 520/101 /Nak-2011
Lampiran : -
Perihal : **Surat Keterangan**

Kayu Aro, 22 Februari 2011
Kepada
Yth. Bpk. Direktur Pasca Sarjana
Universitas Andalas Padang
di **Padang**

Dengan Hormat

Sesuai dengan Surat Direktur Pasca Sarjana Universitas Andalas Padang Nomor 40/H.16.S2/PL/2011, tanggal 14 Februari 2011 perihal Penelitian Instansi dengan ini kami terangkan bahwa :

Nama : Akmal Badri
No. BP : 0821202036
Program Studi : Politik Lokal dan Otonomi Daerah

Telah selesai melakukan penelitian di Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Solok.

Penelitian yang dilakukan oleh namanya yang tersebut diatas adalah dalam rangka penyelesaian study pada Program Pasca Sarjana (S2) Universitas Andalas Padang dengan judul : Analisis Implementasi Program Sapi Investasi Aparatur Pemerintah di Kabupaten Solok.

Demikian Surat Keterangan ini Kami buat dan diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



An. Kepala
Sekretaris

Ir. EMRI NURDIN

NIP. 19650504199103 1 009



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM PASCASARJANA

Alamat : Gedung E, Kampus Unand Limau Manis, PO Box. 271-PADANG 25163
Telp.0751-71686, Fax 0751 – 71691 Email : tatausaha@pasca.unand.ac.id

Nomor : 40/H.16.S2/PL/2011

14 Februari 2011

Lamp : -

Hal : *Penelitian Instansi*

Kepada Yth.

Sdr.

.....

.....

Dengan hormat, kami sampaikan kepada Saudara bahwa kami bermaksud menugaskan seorang mahasiswa Program Pascasarjana (S2) Universitas Andalas:

Nama : Akmal Badri
No. BP : 0821202036
Program Studi : Politik Lokal dan Otonomi Daerah

Untuk melakukan penelitian selama 1 bulan, terhitung mulai bulan Januari s/d Februari 2011. Pada Lembaga/Instansi yang berada dibawah pengawasan Saudara, dalam menyelesaikan studinya pada Program Pascasarjana (S2) Universitas Andalas dengan judul : "**Analisis Implementasi Program Sapi Investasi Aparatur Pemerintah di Kabupaten Solok**".

Sehubungan dengan maksud tersebut, kami harapkan Saudara berkenan memberi izin yang bersangkutan untuk **mengumpulkan data**, dalam rangka pelaksanaan penelitiannya.

Demikianlah semoga Saudara berkenan, dan atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Prof.Dr.Ir.H. Novirman Jamarun, M.Sc
NIP. 195511061980031001

Tembusan Yth

1. Ketua Program Studi Politik Lokal dan Otonomi Daerah
2. Ketua Komisi Pembimbing
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip